



PERATURANGUBERNURBANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal2

- (1) RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 2019; dan
 - b. Landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi Perangkat Daerah.

BABII RUANG LINGKUP

Pasal3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Bab VII Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya RPJMD menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai Visi “*Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah*” yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Sesuai Permendagri tersebut diatas, untuk tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:

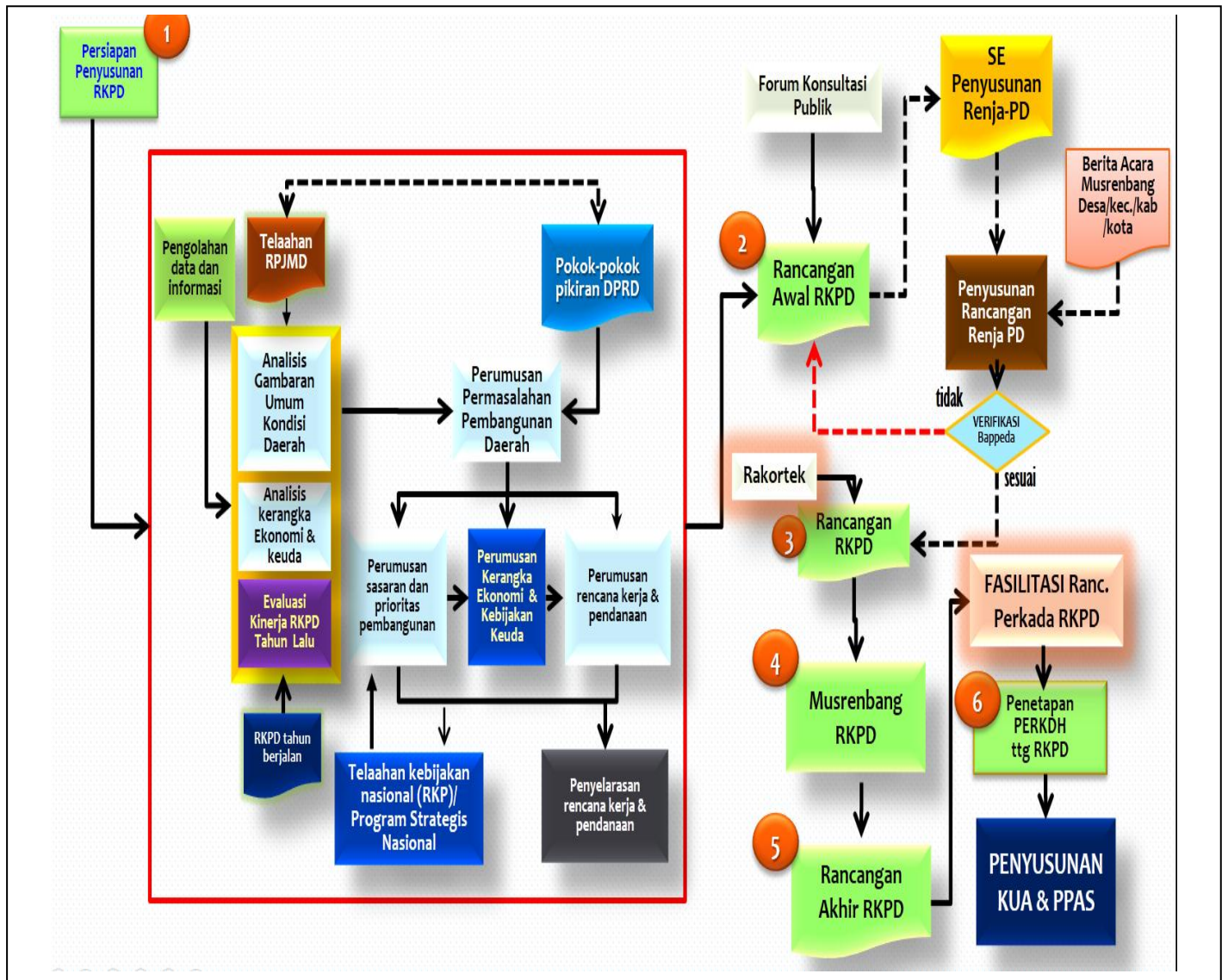
1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada BAPPEDA.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten
Sampai dengan Penyusunan APBD



Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi” tentunya tema ini telah selaras dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berdasarkan tema RKPD tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas;
 - b. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah, melalui :
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi;
 - b. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
 - c. Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
 - d. Penataan Kawasan Kesultanan Banten;
 - e. Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa);
 - f. Pembangunan/Normalisasi Sungai dan Waduk;
 - g. Pembangunan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - h. Pembangunan TPST Regional;
 - i. Penataan Kawasan Kumuh;
 - j. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU; dan
 - l. Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan.
3. Pembangunan Pendidikan, melalui :
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus;
 - b. Rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak berat;
 - c. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
 - d. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus; dan
 - e. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pembangunan Kesehatan, melalui:
 - a. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat;
 - c. Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan;

- d. Rekrutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan strategis lainnya;
 - e. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan buffer stock Provinsi;
 - f. Pengendalian penyakit menular;
 - g. Pengendalian peredaran obat dan makanan;
 - h. Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
 - i. Pengembangan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional.
5. Pembangunan Ekonomi, melalui:
- a. Peningkatan produksi pertanian;
 - b. Peningkatan produksi perikanan;
 - c. Penataan destinasi wisata;
 - d. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
 - e. Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif;
 - f. Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor;
 - g. Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja;
 - h. Pengawasan dan Penempatan Ketenagakerjaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor...);
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

- l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA Perangkat Daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;
4. Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Sistematika Dokumen

RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
1.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi Banten seluas 9.662,92 km² dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah:

- a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan).

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera

Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang teridentifikasi, antara lain:

a. Wilayah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol;
- 2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocokjaya, Serang, dan Walantaka;
- 3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
- 4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren;
- 5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
- 6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran, Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita;
- 7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka.

b. Wilayah Rawan Longsor

Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

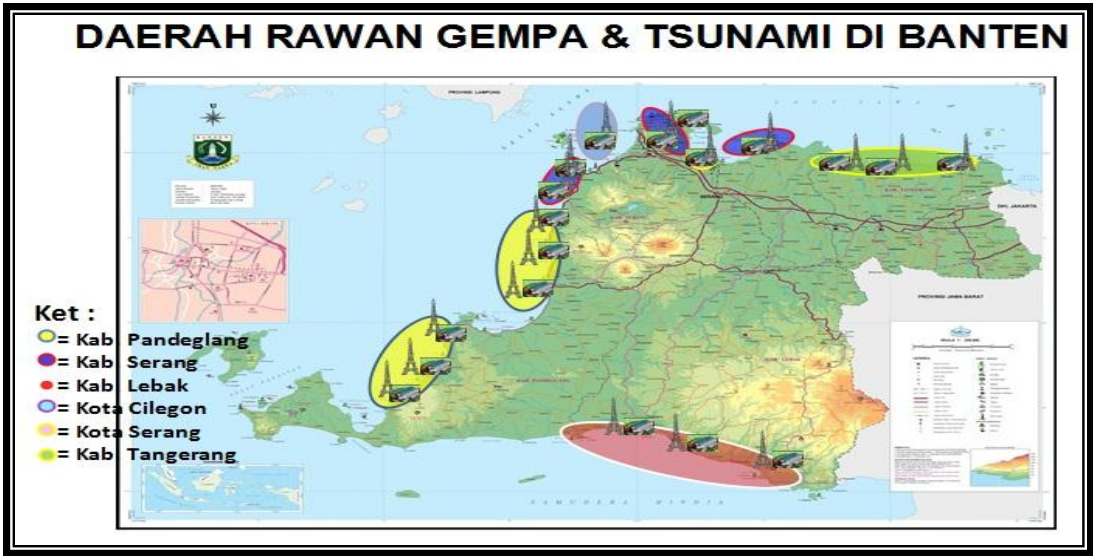
- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
- 2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
- 3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah;
- 4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi.

c. Tsunami

Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang,

Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten



4. Demografi

Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Penduduk Banten tahun 2017 mencapai 12.448.160 jiwa, Banten menduduki Peringkat ke-5 Nasional, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.01 persen menurun sebesar 0.06% bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015-2017

Kab/Kota	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	1.194.911	1.200.512	1.205.203
Kabupaten Lebak	1.269.812	1.279.412	1.288.103
Kabupaten Tangerang	3.370.594	3.477.495	3.584.770
Kabupaten Serang	1.474.301	1.484.502	1.493.591
Kota Tangerang	2.047.105	2.093.706	2.139.891
Kota Cilegon	412.106	418.705	425.103
Kota Serang	643.205	655.004	666.600
Kota Tangsel	1.543.209	1.593.812	1.644.899
Provinsi Banten	11.955.243	12.203.148	12.448.160

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017

Kab/Kota	Jumlah Penduduk								
	2015			2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Pandeglang	610.412	584.499	1.194.911	613.108	587.404	1.200.512	615.297	589.906	1.205.203
Kabupaten Lebak	650.912	618.900	1.269.812	655.607	623.805	1.279.412	659.796	628.307	1.288.103
Kabupaten Tangerang	1.724.915	1.645.679	3.370.594	1.779.102	1.698.393	3.477.495	1.833.470	1.751.300	3.584.770
Kabupaten Serang	747.808	726.493	1.474.301	752.703	731.799	1.484.502	757.089	736.502	1.493.591
Kota Tangerang	1.045.113	1.001.992	2.047.105	1.068.606	1.025.100	2.093.706	1.091.787	1.048.104	2.139.891
Kota Cilegon	210.505	201.601	412.106	213.803	204.902	418.705	217.000	208.103	425.103
Kota Serang	329.806	313.399	643.205	335.803	319.201	655.004	341.597	325.003	666.600
Kota Tangsel	777.713	765.496	1.543.209	802.908	790.904	1.593.812	828.392	816.507	1.644.899
Provinsi Banten	6.097.184	5.858.059	11.955.243	6.221.640	5.981.508	12.203.148	6.344.428	6.103.732	12.448.160

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten
Tahun 2015-2017

Kab/Kota	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	0,55	0,47	0,39
Kabupaten Lebak	0,83	0,76	0,68
Kabupaten Tangerang	3,24	3,17	3,08
Kabupaten Serang	0,77	0,69	0,61
Kota Tangerang	2,36	2,28	2,21
Kota Cilegon	1,68	1,60	1,53
Kota Serang	1,92	1,83	1,77
Kota Tangsel	3,36	3,28	3,21
Provinsi Banten	2,14	2,07	2,01

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2017 dihuni oleh sekitar 57,98% dari jumlah penduduk Banten meningkat 4.78% jika dibandingkan pada tahun 2016. Sedangkan 42,02% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 13.008 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten

Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 375 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 35 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2017, sebagaimana grafik dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Jumlah (ribu)	Persentase
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	676	13,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	37	0,74
3.	Industri	1.246	24,54
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	21	0,41
5.	Konstruksi	286	5,62
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.204	23,71
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	375	7,38
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Js Perusahaan	333	6,56
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	900	17,73
Total		5.077	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2017

Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017 sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			Agst 2015	Agst 2016	Agst 2017
1	Angkatan Kerja	Juta Orang	5,33	5,59	5,60
	a. Bekerja	Juta Orang	4,83	5,09	5,08
	b. Pengangguran Terbuka	Juta Orang	0,51	0,50	0,52
2	Bukan Angkatan Kerja	Juta Orang	3,24	3,19	3,38
3	Penduduk Usia Kerja	Juta Orang	8,57	8,78	8,98
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,24	63,66	62,32

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			Agst 2015	Agst 2016	Agst 2017
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,55	8,92	9,28

Sumber : BPS Provinsi Banten 2017

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, indeks gini ratio, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan lain-lain.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2017 sebagaimana pada Tabel berikut ini:

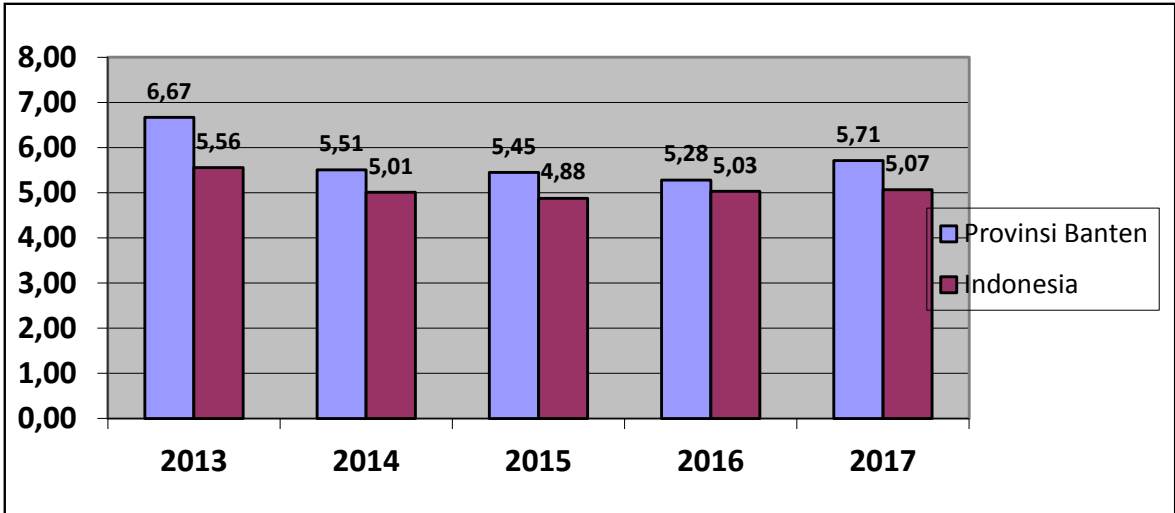
Tabel 2.6
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017 (Persen)

Kab/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Kabupaten Pandeglang	4,72	4,93	5,96	5,49	5,64
Kabupaten Lebak	6,30	5,83	5,80	5,70	5,85
Kabupaten Tangerang	6,41	5,37	5,36	5,32	5,87
Kabupaten Serang	6,04	5,39	5,02	5,00	5,52
Kota Tangerang	6,52	5,15	5,37	5,30	5,84
Kota Cilegon	6,69	4,62	4,78	5,05	5,57
Kota Serang	7,30	6,86	6,29	6,22	6,73
Kota Tangerang Selatan	8,75	8,05	7,20	6,98	7,55
Provinsi Banten	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71
Indonesia	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2017

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2013 – 2017, sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Banten, BDA Provinsi Banten Tahun 2017.

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 (%)

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	2015	2016	2017
1	Bahan Makanan	3,82	6,93	1,13
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,18	5,07	5,53
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,56	0,97	5,21
4	Sandang	1,90	1,70	2,26
5	Kesehatan	12,78	2,86	3,31
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	6,05	2,21	6,51
7	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-2,20	-1,92	3,67
	Umum	4,29	2,94	3,98

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2017

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Triliun Rp)

Lapangan Usaha (1)	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Tri IV-2016 (2)	Tri III-2017 (3)	Tri IV-2017 (4)	Tri IV-2016 (5)	Tri III-2017 (6)	Tri IV-2017 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,71	8,86	7,32	5,43	6,14	5,03
B. Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,05	1,04	0,72	0,72	0,71
C. Industri Pengolahan	43,20	45,22	46,36	35,44	36,09	36,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,88	2,99	3,08	1,03	1,05	1,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,12	0,09	0,10	0,10
F. Konstruksi	14,37	15,20	16,31	9,81	10,13	10,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,17	17,71	17,98	13,08	13,88	14,00
H. Transportasi dan Pergudangan	14,54	15,66	16,67	6,45	6,94	7,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,42	3,51	2,35	2,50	2,56
J. Informasi dan Komunikasi	4,74	5,29	5,30	5,48	5,95	5,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	4,28	4,46	2,96	3,01	3,10
L. Real Estate	9,57	10,79	10,91	8,20	8,83	8,92
M,N. Jasa Perusahaan	1,40	1,55	1,58	0,99	1,06	1,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,91	2,97	1,72	1,80	1,81
P. Jasa Pendidikan	4,32	4,78	4,99	2,90	3,08	3,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	1,71	1,76	1,17	1,24	1,27
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,11	2,29	2,36	1,44	1,53	1,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	133,66	143,83	146,72	99,27	104,05	104,97

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Tabel 2.10
 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten
 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2017 terhadap Triw II-2017	Triw IV-2017 terhadap Triw III-2017	Triw III-2017 terhadap Triw III-2016	Triw IV-2017 terhadap Triw IV-2016	Kumulatif Triw IV-2017 terhadap Triw IV-2016	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,17	(18,16)	4,12	(7,34)	4,12	(0,40)
B. Pertambangan dan Penggalian	3,04	(1,21)	(0,23)	(1,95)	(0,68)	(0,01)
C. Industri Pengolahan	0,79	1,96	2,54	3,83	3,70	1,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,29	2,50	5,18	4,90	0,50	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,09	0,66	8,24	8,37	7,30	0,01
F. Konstruksi	7,77	6,04	8,78	9,46	8,03	0,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,49	0,83	6,58	6,98	6,15	0,92
H. Transportasi dan Pergudangan	2,52	2,62	9,17	10,37	8,57	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	2,24	8,54	8,69	8,28	0,21
J. Informasi dan Komunikasi	3,09	0,23	8,77	8,77	8,42	0,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	2,97	2,84	4,67	3,81	0,14
L. Real Estate	3,23	1,03	8,77	8,82	7,92	0,73
M,N. Jasa Perusahaan	2,52	0,87	9,06	8,39	7,91	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,47	0,66	4,96	5,36	4,58	0,09
P. Jasa Pendidikan	0,76	2,07	8,24	8,28	7,42	0,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,46	8,54	8,76	7,94	0,10
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,36	2,48	8,49	8,90	8,14	0,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,41	0,89	5,63	5,75	5,71	5,75

Sumber: BPS Provinsi Banten
 No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

2. Fokus Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari IPM. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat

digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Ratarata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Provinsi Banten, sehingga nilai Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya.

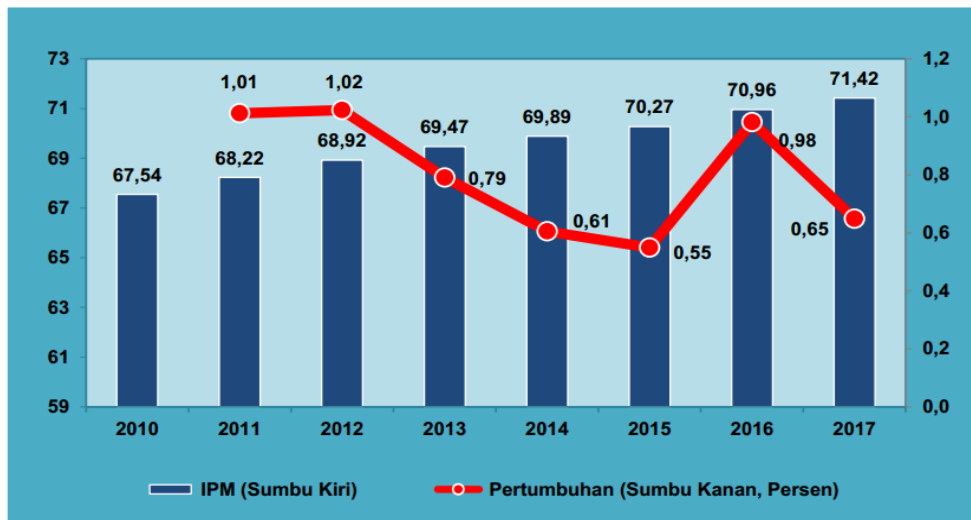
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

a. Perkembangan IPM Banten 2010-2017

Perkembangan IPM di Provinsi Banten 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten
Tahun 2010–2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

Secara umum pembangunan manusia Banten selama tujuh tahun terakhir ini, terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 71,42 pada tahun 2017 menjadikan Banten menduduki peringkat 8 Nasional. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2017 ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

b. Pencapaian Kapabilitas Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut Komponen
Tahun 2010–2017

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH, Tahun)	68,50	68,68	68,86	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	11,02	11,41	11,79	12,05	12,31	12,35	12,70	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	7,92	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.777	10.933	11.008	11.061	11.150	11.261	11.469	11.659
IPM	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
Pertumbuhan IPM (Persen)	-	1,01	1,02	0,79	0,61	0,55	0,98	0,65

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

- c. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
- Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2017 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (80,84) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (62,95). Kota Tangerang Selatan juga menjadi pemilik nilai tertinggi untuk setiap dimensi/komponen pembentuk IPM, sedangkan nilai terendah diduduki secara bergantian oleh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, seperti ditampilkan pada tabel 2.15 dibawah ini:

Tabel 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2016–2017

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)		IPM		
									Capaian		Pertum- buhan (Persen)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pandeglang	63,77	64,04	13,40	13,41	6,62	6,63	8.138	8.358	63,40	63,82	0,66
Lebak	66,43	66,59	11,91	11,92	6,19	6,20	8.308	8.372	62,78	62,95	0,27
Tangerang	69,37	69,47	12,11	12,51	8,23	8,24	11.863	11.914	70,44	70,97	0,75
Serang	63,81	64,02	12,37	12,38	6,98	7,17	10.317	10.466	65,12	65,60	0,74
Kota Tangerang	71,34	71,38	13,41	13,44	10,28	10,29	13.911	14.104	76,81	77,01	0,26
Kota Cilegon	66,24	66,32	13,11	13,12	9,68	9,69	12.326	12.562	72,04	72,29	0,35
Kota Serang	67,36	67,38	12,63	12,64	8,60	8,61	12.660	12.914	71,09	71,31	0,31
Kota Tangsel	72,14	72,16	14,08	14,39	11,58	11,77	14.972	15.291	80,11	80,84	0,91
Banten	69,46	69,49	12,70	12,78	8,37	8,53	11.469	11.659	70,96	71,42	0,65

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,04 tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 72,16 tahun (Kota Tangerang Selatan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,92 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 14,39 tahun (Kota Tangerang Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,20 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 11,77 tahun (Kota Tangerang Selatan). Adapun, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di berkisar antara 8,4 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 15,3 juta rupiah per tahun (Kota Tangerang Selatan).

Selain dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya. Tercatat, Kota Tangerang Selatan tumbuh 0,91 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya pada tahun 2017 mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Sementara yang paling lambat adalah Kota Tangerang, yang lebih banyak dipengaruhi oleh lambatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan.

d. Perbandingan Regional

Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan DKI Jakarta. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan kelima di Jawa. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,90 persen. Namun demikian, besaran angka dan peringkat IPM Banten, hanya kalah dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Betapapun juga, bila besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak ingin dilampaui oleh provinsi lain, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada peringkat terbawah di Jawa, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional.

Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini

karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Ratarata Lama Sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Banten sendiri masih berada di peringkat keempat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional. Dengan demikian, dalam jangka panjang terbuka peluang, terutama bagi Jawa Barat untuk meninggalkan Banten.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Regional se Jawa Menurut Komponen Tahun 2017

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM		Peringkat Nasional
					Nilai	Pertum- buhan (Persen)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	72,55	12,86	11,02	17.707	80,06	0,58	1
BANTEN	69,49	12,78	8,53	11.659	71,42	0,65	8
Jawa Barat	72,47	12,42	8,14	10.285	70,69	0,91	10
Jawa Tengah	74,08	12,57	7,27	10.377	70,52	0,77	13
DI Yogyakarta	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89	0,65	2
Jawa Timur	70,80	13,09	7,34	10.973	70,27	0,76	15
Indonesia	71,06	12,85	8,10	10.664	70,81	0,90	-

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas penduduk Banten sendiri sepanjang periode 2013-2015 meningkat cukup pesat. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,3 tahun dan 5,8% pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,8 tahun

dan 5,6%. Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2015 tidak bersekolah lagi.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Capaian Banten dalam bidang kesehatan dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini terlihat dari Angka harapan hidup (AHH) yang terus meningkat hingga mencapai 69,4 tahun pada tahun 2015. Hanya saja, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, pada periode yang sama juga meningkat hingga menjadi 30,3 persen. Selain itu, rata-rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan juga naik dari 4,9 hari menjadi 5,6 hari.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

- a) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan;
- b) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan, dan apoteker;
- c) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 88 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 4.439 dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, serta 4.949 bidan dan 8.072 perawat.

3. Urusan Wajib Perumahan

Berdasarkan data yang ada, sekitar 81% rumah tangga di Banten pada tahun 2015 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Artinya, kepemilikan rumah oleh rumah tangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (77,48% pada tahun 2013 dan 77,96% pada tahun 2015). Namun, luas rumah yang baru ditempati kebanyakan justru lebih sempit. Kondisi yang demikian setidaknya tercermin dari naiknya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal tujuh meter persegi. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2015 terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah dan berdinding dari tembok. Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2015 ini setidaknya masih ada tiga dari sepuluh rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk fasilitas sanitasi layak, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 Ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 Ha atau 12% dari luas wilayah. Mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis

sebelumnya yaitu 117.914,00 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

5. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon kabel cenderung mengalami penurunan yang hanya mencapai 7,84% pada tahun 2014 sedangkan persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon seluler cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 90,05 pada tahun 2014. Beberapa daerah perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/ *Universal Service Obligation (USO)* yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.

6. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, dan 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten pada Maret Tahun 2017 sebanyak 10.734 Orang,

jumlah laki-laki sebanyak 5.723 orang dan perempuan sebanyak 4.651 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melayani masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Urusan Wajib Perhubungan

Secara geografis, Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2013 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan Nasional dan jalan Provinsi) sepanjang 1.329,38 KM. Total panjang jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 KM dan total panjang jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 KM.

Wilayah Banten menjadi jalur penghubung darat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, ketersediaan jalan dalam kondisi baik menjadi faktor yang sangat strategis. Di Banten sendiri, pada tahun 2015 ini tersedia jalan utama sepanjang 6.907 KM, yang terdiri dari 565 KM jalan nasional dan 853 KM jalan Provinsi, serta 5.489 KM jalan Kabupaten/Kota. Namun demikian, ketersediaan jalan dengan kondisi yang baik kemungkinan kurang dari separuhnya. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari persentase panjang jalan Nasional dan Provinsi dalam kondisi baik yang pada tahun 2014 hanya sebesar 37 persen saja.

Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Stasiun Merak dengan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Jakarta Kota. Jumlah penumpang yang diangkut di beberapa stasiun KA yaitu Stasiun Merak, Cilegon, Cigading, Serang, Rangkasbitung, dan Stasiun Serpong pada tahun 2015 mencapai 4,9 juta orang, atau meningkat

0,5 juta orang dibandingkan tahun 2014. Hanya saja, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan dari 498 ribu ton menjadi 452 ribu ton.

Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi Banten adalah transportasi darat. Hal ini karena, darat merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya dan menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten. Ketersediaan terminal yang memiliki Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.

Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan Nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan Provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan Nasional serta jalan tol Jakarta-Merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan Provinsi. Jalan Kabupaten/Kota melayani akses ketiga jalan itu.

Banten juga memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug, Bandara Udara Pondok Cabe, dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Hanya saja Intensitas kegiatan transportasi udara pada bandara ini

selama periode 2013-2015 terlihat agak menurun. Kondisi ini dapat diketahui dari turunnya total jumlah penerbangan dan penumpang domestik serta internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, total jumlah kargo pada periode yang sama meningkat dari 368 ribu ton menjadi 374 ribu ton.

Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan dua pulau besar yaitu Jawa dan Sumatera. Lalu lintas penyeberangannya, selama periode 2013-2015 terasa semakin padat. Kondisi ini setidaknya terlihat dari jumlah trip penyeberangan yang meningkat hingga menjadi 34 ribu trip. Di sisi lain, jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut juga menurun, masing-masing dari 1,40 juta orang dan 2,01 juta unit kendaraan menjadi 1,27 juta orang dan 2,00 unit kendaraan.

2. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Pada Februari 2014 mencapai 66,47%, kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2014 sebesar 63,84 dan kembali meningkat pada Februari 2015 sebesar 67,28%. Pada tahun 2013, Kota Tangerang memiliki TPAK tertinggi 68,02%, sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki TPAK terendah (58.74%). Namun demikian pada tahun 2013 TPAK Kabupaten Pandeglang menjadi yang terendah yang hanya sebesar 58,25% sedangkan pada posisi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Lebak yaitu sebesar 71,40%.

Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 menjadi 9,9% pada tahun 2013 dan pada februari 2014 menjadi 9,87%, kemudian mengalami penurunan lagi pada bulan Februari 2015 menjadi 8,58%.

Upah minimum memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kabupaten Serang dari Rp1.320.500,00 pada tahun 2012 menjadi Rp2.080.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp2.340.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp2.700.000,00 pada tahun 2015. Secara rata-rata UMK di Provinsi

Banten mengalami peningkatan dari Rp1.170.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp1.325.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp1.600.000,00 pada tahun 2015.

Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 26,23%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 23,79% disusul kemudian oleh sektor jasa-jasa 18,23%, sektor pertanian sebesar 12,46%, dan sektor lainnya 19,28%.

3. Urusan Pilihan Pertanian

Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas yang meningkat. Luas panen bertambah karena adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, dan program pompanisasi.

Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi oleh kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Peningkatan/penurunan produksi tanaman palawija pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penambahan/penurunan luas panen. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh tanaman ubi kayu dan tanaman kacang hijau, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 178 kw/ha dan 8 kw/ha.

4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2014, di Provinsi Banten terdapat 6.623 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 6.065 rumah tangga atau 91,57 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2014 sebesar 59.538 ton, dimana 59.102 ton atau 99,27 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selain itu, di Provinsi Banten juga terdapat 25.169 rumah tangga perikanan budidaya, dengan total produksi sebesar 105.635 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya terbesar terdapat di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 11.391 rumah tangga, sementara untuk jumlah produksi terbesar dicapai oleh Kabupaten Serang yaitu sebesar 68.355 ton.

5. Urusan Pilihan Pertambangan dan Energi

Sektor energi listrik Banten menjadi salah satu sektor strategis, yang bukan saja untuk Banten, tapi juga bagi Jawa dan Bali. Kondisi yang demikian itu dapat terjadi karena dari sisi *supply*, Banten memiliki pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali. Pembangkit listrik tersebut adalah PTLU Suralaya dan PT Krakatau Daya Listrik (Kota Cilegon), PLTGU Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), dan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang). Kapasitas terpasang seluruh pembangkit listrik di Banten sendiri terus meningkat, yakni dari 11,3 ribu MW pada tahun 2012 menjadi 12,9 ribu MW pada tahun 2014. Seiring dengan itu, jumlah unit pembangkit listriknya juga mengalami kenaikan. Akibatnya, jumlah energi listrik yang dibangkitkan bertambah hingga mencapai 63,7 ribu GWh. Dari sisi *demand*, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten sangat unik. Hal ini karena penjualannya dilakukan oleh dua distributor, yaitu PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang serta PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN-nya terlihat semakin memburuk, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami kenaikan dari 10% pada tahun 2014 menjadi 11% persen pada tahun 2015. Sementara jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2015 justru mengalami penurunan hingga menjadi 18,6 juta MWh. Sekitar dua per tiga dari energi listrik yang terjual ini, ternyata dibeli oleh perusahaan/usaha dari kalangan

industri pengolahan. Adapun pelanggan rumah tangga yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya mengkonsumsi energi listrik sekitar seperlimanya saja.

6. Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 33,48%. Berdasarkan harga konstan 2010, Pada tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp134,33 Triliun.

Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Tahun 2015 sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 3,30%.

Pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten pada Tahun 2015, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 12,08%.

7. Urusan Pilihan Pariwisata

Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah, dan 232 makam sejarah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara.

Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan non bintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel non bintang.

8. Investasi

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2015 mencapai 10,70 triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2015 mencapai 2,54 miliar USD.

Selama periode Desember 2014-Juni 2016, peranan sektor perbankan bagi perekonomian Banten telah meningkat pesat. Kondisi ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, terutama jumlah nasabah. Dana perbankan yang berhasil dihimpun dari masyarakat juga meningkat hingga menjadi 144 triliun rupiah. Adapun pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan untuk lokasi proyek di Banten, sampai Juni 2016 mencapai 252 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Desember tahun 2014 dan 2015. Operasional perbankan sendiri, didukung oleh asset yang terus meningkat hingga mencapai 169 triliun rupiah pada Juni 2016.

Selain sebagai daerah penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, Banten juga memiliki berbagai fasilitas infrastruktur strategis, antara lain pelabuhan Merak dan Cigading, Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Jakarta-Merak, serta memiliki akses yang sangat mudah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, Banten menjadi salah satu daerah utama tujuan investasi di Indonesia, dengan nilai investasi yang terus bertambah. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten sendiri pada tahun 2015 menduduki peringkat keenam di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 10,7 triliun rupiah. Adapun realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun yang sama mencapai 2,5 miliar US\$, sehingga menduduki peringkat keempat tertinggi se-Indonesia.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten 2017 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2017 ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten.

2.2.1 Capaian Kinerja RPJMD

Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, dimana keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat ditunjukkan oleh realisasi indikator kinerja dalam menjawab target-target yang sudah ditentukan. Realisasi indikator kinerja ditunjukan oleh tabel berikut:

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Program
Provinsi Banten 2017

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pelayanan Dasar, Bukan Pelayanan Dasar, Pilihan, dan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah
		Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
		Rasio Pembangunan, Pengadaan,	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur				
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
Bidang Pendidikan						
4	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	65,92	75,89	115,12	Disdikbud
		APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	99,95	97,56	97,61	Disdikbud
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	100,00	91,14	91,14	Disdikbud
5	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	9,65	8,43	87,36	Disdikbud
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10,00	9,50	95,00	Disdikbud
Bidang Kesehatan						
7	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	86,00	72,05	83,78	Dinkes
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	92,00	82,00	89,13	Dinkes
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)	92,50	77,00	83,24	Dinkes
9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	77,00	75,00	97,40	Dinkes
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin	100,00	100,00	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		(%)				
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	100,00	100,00	100,00	RSUD Banten
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	70,00	70,00	100,00	RSUD Banten
11	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	100,00	80,10	80,10	Dinkes
		Prevalensi HIV (%)	<0,5	0,03	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	92,00	84,00	91,30	Dinkes
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	100,00	Dinkes
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	60,00	100,00	166,67	Dinkes
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	79,00	76,50	96,84	Dinkes
8	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100,00	93,74	93,74	Dinkes
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	80,00	80,00	100,00	Dinkes
10	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (%)	100,00	96,97	96,97	Dinkes
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (Unit)	222 Unit	222 Unit	100,00	Dinkes
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	60 Unit	161 Unit	268,33	Dinkes
		Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	100,00	0,00	0,00	Dinkes
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk	100,00	100,00	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		miskin peserta program Jamkesmas (%)				
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	27 Orang	28 Orang	103,70	RSUD Malingping
12	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	200 Industri	332 Industri	166,00	Dinkes
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	80,00	80,00	100,00	Dinkes
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100,00	100,00	100,00	RSUD Malingping
		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis	200 Orang	1.200 Orang	600,00	RSUD Malingping
		Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	100,00	100,00	100,00	RSUD Banten
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
13	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100,00	84,28	84,28	DPUPR
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	96,00	83,00	86,46	DPUPR

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	12,11	11,80	97,44	DPUPR
		Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	5.151,1 Ha	4.734 Ha	91,90	DPUPR
14	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	1 Paket	100,00	DPUPR
		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	2,50	2,50	100,00	DPUPR
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	BAPPEDA
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
17	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m³)	1.983,75 m3	734,40 m3	37,02	DPRKP
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113 Lokasi	71 Lokasi	62,83	DPRKP
		Penyelesaian Gedung KP3B	1 Gedung	1 Gedung	100,00	DPRKP
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3 Gedung	3 Gedung	100,00	DPRKP
16	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20,00	6,40	32,00	DPRKP
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
23	Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan Pembinaan lembaga yang sadar politik	363 Lembaga	363 Lembaga	100,00	Badan Kesbangpol
		Cakupan Pembinaan Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan	426 Lembaga	426 Lembaga	100,00	Badan Kesbangpol

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
24	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100,00	98,18	98,18	Satpol PP
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
		Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
25	Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Monitoring Rekontruksi Fisik di Kab. Lebak	100,00	60,00	60,00	BPBD
Bidang Sosial						
27	Penanganan Kemiskinan	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.420 KK	1.420 KK	100,00	Dinsos

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diberdayakan	1.370 KK	1.370 KK	100,00	Dinsos
29	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	3.500 Orang	3.500 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	2.210 Orang	2.210 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang direhabilitasi	530 Orang	530 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Lembaga sosial anak yang dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00	Dinsos
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	680 Orang	680 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	307 Orang	307 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	550 Orang	550 Orang	100,00	Dinsos
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)	366 Orang	366 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)	6.300 Orang	6.300 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)	1.452 Orang	1.452 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)	366 Orang	366 Orang	100,00	Dinsos

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
26	Pemberdayaan Sosial	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)	400 Orang	400 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	604 Orang	604 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	640 Orang	640 Orang	100,00	Dinsos
		Cakupan Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00	Biro Kesra
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/Lembaga/Oranganisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 Lembaga	600 Lembaga	100,00	Biro Kesra
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
Bidang Ketenagakerjaan						
30	Pengembangan kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	5,17	5,10	98,57	Disnakertrans
31	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya (%)	10,06	10,06	100,00	Disnakertrans
32	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan Kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	688 Orang	1.812 Orang	263,37	Disnakertrans
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
34	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	200,00	DP3AKKB

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja Lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%)	20,00	20,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS ,GSI,APE) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
Bidang Pangan						
35	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang
		Ketersediaan dokumen kebijakan infrastruktur dan pemberdayaan pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100,00	Dinas Ketapang
		Ketersediaan dokumen pasokan dan harga pangan lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)	200 Ton	125,67 Ton	62,84	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin/Rastra	100,00	100,00	100,00	Dinas Ketapang
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (CPP dan CPM)	807 Ton	780,10 Ton	96,67	Dinas Ketapang
		Jumlah Lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	82 Lembaga	112 Lembaga	136,59	Dinas Ketapang
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Skor PPH)	96,00	85,70	89,27	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	80,00	80,00	100,00	Dinas Pertanian
Bidang Lingkungan Hidup						
36	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
38	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000 Ha	5.236 Ha	65,45	DLHK
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
44	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan	100,00	100,00	100,00	DPMD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		masyarakat desa/kelurahan				
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	13,00	13,00	100,00	DPMD
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna	2 PosyanteK	10 PosyanteK	500,00	DPMD
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)	100,00	100,00	100,00	DPMD
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5,00	5,00	100,00	DPMD
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)	6,38	6,38	100,00	DPMD
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 Desa/Kel	5 Desa/Kel	80,81	DPMD
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1.261 Desa	1.238 Desa	98,18	DPMD
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
33	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana	890,00	890,00	100,00	DP3AKKB

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		(orang)				
		Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100,00	57,78	57,78	DP3AKKB
Bidang Perhubungan						
45	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	48,91	48,91	100,00	Dinas Perhubungan
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017	60,63	59,30	97,81	Dinas Perhubungan
Bidang Komunikasi dan Informatika						
46	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)	100,00	98,52	98,52	Diskominfo SP
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	75,00	75,00	100,00	Diskominfo SP
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	75,00	75,00	100,00	Diskominfo SP
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100,00	100,00	100,00	Diskominfo SP

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
48	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	18,28	18,28	100,00	Dinkop UKM
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	18,28	18,28	100,00	Dinkop UKM
47	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	29,00	29,00	100,00	Dinkop UKM
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	29,00	29,00	100,00	Dinkop UKM
49	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	20,66	20,66	100,00	Dinkop UKM
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	20,66	20,66	100,00	Dinkop UKM
Bidang Penanaman Modal						
50	Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	15,00	15,00	100,00	DPMPTSP
51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	10,34 Triliyun	40,68 Triliyun	393,00	DPMPTSP
		Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	4,47 Triliyun	15,14 Triliyun	339,00	DPMPTSP
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
52	Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah Organisasi pramuka yang mendapatkan	9 Kwartir	9 Kwartir	100,00	Dispora

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pelayanan Kepramukaan (Kwartir)				
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 Kelomp ok	25 Kelompok	250,00	Dispora
53	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (Event)	20 cabor/ 18 event	19 cabor/ 17 event	94,72	Dispora
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (Unit)	1 unit	1 unit	100,00	Dispora
Bidang Statistik						
3	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	40 Paket	40 Paket	100,00	40 Perangkat Daerah
Bidang Kebudayaan						
6	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	15,00	14,00	93,33	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20,37	19,00	93,27	Disdikbud
		Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
Bidang Perpustakaan						
61	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	500 (100%)	500 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	125 (100%)	125 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	42 (100%)	42 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Bidang Kearsipan						
59	Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	41 (100%)	41 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	41 (100%)	41 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan						
Bidang Kelautan dan Perikanan						
42	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1 Ha	1 Ha	100,00	DKP
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12 Kasus	13 Kasus	108,33	DKP
Bidang Pariwisata						
68	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)	23,08	23,08	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)	20,11	20,11	100,00	Dinas Pariwisata
69	Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan Lembaga/instansi pemerintah (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)	19,67	19,67	100,00	Dinas Pariwisata
		Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	18,75	18,75	100,00	Dinas Pariwisata
Bidang Pertanian						
43	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.396.699 Ton	2.405.501 Ton	100,37	Dinas Pertanian
		Surplus Beras (ton)	88.270 Ton	102.314 Ton	115,91	Dinas Pertanian
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	34.000 Ha	90.205 Ha	265,31	Dinas Pertanian
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	100.000 Ha	128.600 Ha	128,60	Dinas Pertanian
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	28.263 Ton	44.209 Ton	156,42	Dinas Pertanian
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	37.069,66 Ton	55.729,84 Ton	150,34	Dinas Pertanian
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman tanaman perkebunan (ha)	500 Ha			DLHK
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (Unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	DLHK
		Jumlah Unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (Unit)	1 Unit			DLHK
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	3 Unit			DLHK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pendukung pengembangan perkebunan (Unit)				
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107.000 Batang	200.000 Batang	186,92	DLHK
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70.050 Ton	56.222 Ton	80,26	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	>100	106,77	106,00	DKP
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1,7 Milyar	6 Milyar	342,00	DKP
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	190.000 Ton	105.426 Ton	55,49	DKP
41	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,00	99,73	94,98	Dinas Pertanian
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (Unit)	3 Unit	4 Unit	133,33	Dinas Pertanian
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (Unit)	11 Unit	11 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DLHK
		Cakupan tingkat kemandirian tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (Unit)	250 Unit	250 Unit	100,00	DLHK
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,85	0,53	62,35	DKP
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	5.000 Ton	4.122 Ton	82,44	DKP

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	30 Kg/Kapita	33 Kg/Kapita	110,00	DKP
39	Pemberdayaan kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Pertanian (Unit)	5 Unit	5 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (Unit)	30 Unit	30 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (Unit)	30 Unit	26 Unit	86,67	Dinas Pertanian
40	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Cakupan ketersediaan Traktor (Unit)	200 Unit	228 Unit	114,00	Dinas Pertanian
		Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (Unit)	5 Unit	11 Unit	220,00	Dinas Pertanian
		Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	4.000 Ha	1.500 Ha	37,50	Dinas Pertanian
Bidang Kehutanan						
37	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DLHK
		Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10 Kelompok	15 Kelompok	150,00	DLHK
Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						
63	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan	7.045 SS	6.903 SS	97,98	Dinas ESDM

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Sambungan Rumah Terpasang (SS)				
		Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	Dinas ESDM
		Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	100,00	100,00	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi (Dokumen)	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi (Laporan)	17 Laporan	17 Laporan	100,00	Dinas ESDM
62	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (Unit)	31 Unit	31 Unit	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air bersih (lokasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	100,00	Dinas ESDM

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan keterselenggaranya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7 Laporan	7 Laporan	100,00	Dinas ESDM
64	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	193 Ijin	193 Ijin	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (Paket)	1 Paket	1 Paket	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (Kegiatan)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraanny a Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Laporan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	Dinas ESDM
Bidang Perdagangan						
65	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
Bidang Industri						
66	Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
Bidang Administrasi Pemerintahan						
55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	100,00	98,88	98,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	100,00	63,72	63,72	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	100,00	88,88	88,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100,00	99,77	99,77	Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100,00	80,11	80,11	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
22	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100,00	95,83	95,83	Biro Pemerintahan, Biro ARTP, Biro Umum
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)	100,00	100,00	100,00	Biro BISDA
		Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Biro Adpem
		terserenggara layanan barang dan jasa secara terpusat	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
		rasio ketersediaan dokumen ketatausahaan Biro	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
		Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	Diskominfo SP
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)	100,00			Biro Bina Perekonomian
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	15 Unit			Biro Bina Perekonomian
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00	Biro Bina Perekonomian

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	Biro Kesra
58	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20,00	20,00	100,00	Biro Hukum
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)	100,00	100,00	100,00	Biro Hukum
56	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)	100,00	95,00	95,00	Biro Organisasi
Bidang Pengawasan						
70	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)	100,00	95,00	95,00	INSPEKTORAT
Bidang Perencanaan						
19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen perencanaan dan	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		penganggaran pembangunan (%)				
18	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00	BAPPEDA, Biro Pemerintahan
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100,00	83,33	83,33	Biro Pemerintahan
Bidang Keuangan						
54	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	4.431 T	5.695 T	129,00	BAPENDA
		Ketersediaan jumlah sistem/data/Dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	BAPENDA, BPKAD
		Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	BAPENDA, BPKAD
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00	BAPENDA, BPKAD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	BAPENDA, BPKAD
57	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)	100,00	31,66	31,66	Biro Umum
		Persentase Pengelolaan Perlengkapan Asset	100,00	100,00	100,00	BPKAD
		Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	7.256 T			BPKAD
Bidang Kepegawaian						
71	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)	100,00	100,00	100,00	BKD
		Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)	100,00	95,00	95,00	BKD
		Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur. (%)	100,00	95,00	95,00	BKD
Bidang Pendidikan dan Pelatihan						
67	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00	96,29	96,29	BPSDM
		Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00	100,00	100,00	BPSDM
Bidang Penelitian dan Pengembangan						
20	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan Dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA
	71 Program	254 Indikator	Rata-rata (%)		108,30	43 PD

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah diatas secara umum pelaksanaan kinerja program sudah berjalan baik, namun masih terdapat 15 indikator kinerja program yang belum tercapai, kondisi tersebut karena beberapa permasalahan yang akan dijelaskan pada sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Tabel 2.16
Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2018

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi TW I TA 2018	
			Fisik	Keuangan
1	Badan Kependidikan Daerah	26.846.714.000	14.08	11.39
2	Badan Kesbangpol	23.656.362.000	13.76	12.92
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.641.985.500	18.12	13.03
4	Badan Pendapatan Daerah	262.910.514.000	15.87	13.60
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.946.759.806.528	2.47	2.47
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.890.963.000	13.84	9.97
7	Badan Penghubung	10.302.880.000	26.50	20.36
8	Badan Perencanaan Pembangunan	62.154.400.000	14.79	11.57
9	Biro Administrasi Pembangunan	8.945.000.000	16.66	14.76
10	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	41.422.852.000	13.88	5.51
11	Biro Infrastruktur	2.384.210.000	14.71	14.24
12	Biro Perekonomian	3.880.000.000	16.32	9.48
13	Biro Hukum	4.247.257.000	25.84	20.11
14	Biro Kesra	5.947.186.000	15.70	9.61
15	Biro Organisasi	2.719.438.000	12.52	5.07

16	Biro Pemerintahan	2.816.260.000	21.46	7.19
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	49.746.832.000	11.64	10.58
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.776.220.200	12.24	11.45
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.599.800.000	13.32	5.88
20	Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping	203.747.378.000 263.581.241.931 77.534.174.069	2.12 11.10 13.61	2.29 6.61 6.90
21	Dinas Ketahanan Pangan	23.519.207.000	22.47	15.18
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.800.074.800	20.24	10.22
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.995.396.500	15.51	6.42
24	Dinas Koperasi dan UMKM	27.650.973.200	2.60	2.60
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.501.100.000	15.96	14.95
26	Dinas Pariwisata	31.261.920.000	13.05	12.69
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.038.400.000	11.36	9.69
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	40.613.841.000	9.11	8.59
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.685.775.000	11.46	4.20
30	Dinas Pendidikan	1.898.308.177.909	14.05	10.31
31	Dinas Perhubungan	77.077.000.000	14.56	7.08
32	Dinas Perindustrian	117.371.093.080	6.34	3.63

	dan Perdagangan			
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31.133.270.000	21.65	12.17
34	Dinas Pertanian	83.392.038.000	19.50	12.26
35	Dinas Sosial	49.295.680.000	12.16	11.22
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	482.357.545.000	4.21	1.03
37	Inspektorat	51.892.076.000	14.67	12.05
38	Satpol PP	28.358.400.000	16.44	15.71
39	Sekretariat DPRD	733.578.000.000	18.20	17.23
40	Biro Umum	143.719.959.000	17.01	16.56
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.399.559.844.000	1.595	0.707

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik dan keuangan yang paling rendah yaitu 1.59% dan 0.707%, dan yang paling tinggi realisasinya yaitu Badan Penghubung dengan realisasi fisik 26.50% dan realisasi keuangan 20.36%.

Rencana Pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN. Adapun perkembangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Rekapitulasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
Menurut Perangkat Daerah
Triwulan IV Tahun 2017

No	Perangkat Daerah	Pagu	Penyerapan (Rp)		Penyerapan (Fisik)	
1	BAPPEDA Provinsi Banten	583.546.000,00	100 100	92,00 92,00	100 100	95,50 95,50
2	Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Banten	429.052.000,00	100	56,60	100	60,10
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	2.048.111.000,00	100	87,14	100	90,64
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	3.209.321.000,00	100	99,29	100	100
5	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	32.956.499.000,00	100	86,18	100	89,68
6	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	24.750.180.000,00	100	99,83	100	100
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.293.519.000,00	100	99,15	100	100
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	1.354.760.000,00	100	94,54	100	98,04
9	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1.719.200.000,00	100	80,79	100	84,29
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	27.508.220.000,00	100	86,60	100	90,10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.300.000.000,00	100	97,71	100	100
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	300.000.000,00	100	94,54	100	98,04
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	17.078.445.000,00	100	94,89	100	98,39
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.756.129.000,00	100	96,55	100	100
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.166.191.000,00	100	94,10	100	97,60
16	Dinas Pertanian Provinsi Banten	26.465.940.000,00	100	97,89	100	100
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi	874.211.000,00	100	78,21	100	81,71

	Banten					
18	Dinas Sosial Provinsi Banten	16.971.858.000,00	100	98,43	100	100
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	6.960.080.000,00	100	87,83	100	91,33
	TOTAL	172.725.262.000,00	100	92,94	100	96,44

Dari tabel di atas realisasi dana dekonsentrasi sudah cukup baik, untuk realisasi keuangan sebesar 92.94% dan realisasi fisik sebesar 96.44%.

Berikut ini Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018:

Tabel 2.18
 Rekapitulasi Alokasi Dekonsentrasi Provinsi Banten
 Tahun Anggaran 2018

Perangkat Daerah/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.200.000.000,00	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	304.900.000,00	-	-
BAPPEDA Provinsi Banten	1.026.431.000,00	-	-
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	2.609.274.000,00	-	-
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten	3.352.342.000,00	-	-
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	28.056.802.000,00	156.195.000,00	0.56
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	17.362.900.000,00	3.156.224.989,00	18.18
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.510.232.000,00	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten	1.315.259.000,00	-	-
Dinas Pariwisata Provinsi Banten	2.369.665.000,00	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	30.432.189.000,00	1.961.276.190,00	6.44

Banten			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	953.008.000,00	-	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	12.264.718.000,00	2.296.000,00	0.02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.866.565.000,00	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.028.568.000,00	-	-
Dinas Pertanian Provinsi Banten	19.119.151.000,00	532.900.000,00	2.79
Dinas Sosial Provinsi Banten	18.889.672.000,00	-	-
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten	5.453.463.000,00	-	-
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten	223.940.000,00	-	-
Total	153.339.079.000,00	5.804.300.179,00	3.79

Dari tabel tersebut penyerapan Triwulan I TA 2018 masih rendah (3.79%) dari pagu Rp153.339.079.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.804.300.179,00

Tabel 2.19
Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Rp	(%)
1	DEKONSENTRASI	153.339.079.000,00	5.804.300.179,00	3,79
2	DESENTERALISASI	1.570.105.138.000,00	47.876.639.400,00	3,05
	- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	629.188.785.000,00	-	-
	- DANA DESA	940.916.353.000 ,00	47.876.639.400,00	5,09
3	KANTOR DAERAH	7.598.890.960.000,00	533.500.811.386,00	7,02
4	KANTOR PUSAT	1.703.155.695.000,00	44.775.053.066,00	2,63
5	TUGAS PEMBANTUAN	213.851.276.000,00	1.390.458.297,00	0,65
Grand Total		11.239.342.148.000,00	633.347.262.328,00	5,64

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2017 telah melaksanakan 35 bidang urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 15 Urusan

Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 71 program dan 1.109 kegiatan yang dilaksanakan oleh 43 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang 22 program dan 307 kegiatan yang tersebar di 11 (sebelas) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Malingping; RSUD Banten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp2.355.073.727.839,00 dan realisasi sebesar Rp1.935.179.191.946,00 atau sebesar 82,17% dengan realisasi fisik sebesar 94,64%. Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.3.1.1 Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 4 program dan 50 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp592.449.296.232,00 dan realisasi sebesar Rp490.219.131.468,00 atau sebesar 82,74% dengan realisasi fisik sebesar 86,37%.

2.3.1.2 Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 8 program dan 66 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan

Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp394.646.517.690,00 dan realisasi sebesar Rp293.677.690.064,00 atau sebesar 74,42% dengan realisasi fisik sebesar 93,26%.

2.3.1.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 84 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.001.898.774.684,00 dan realisasi sebesar Rp903.624.178.223,00 atau sebesar 90,19% dengan realisasi fisik sebesar 94,32%.

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, adalah:

2.3.1.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp256.470.604.638,00 dan realisasi sebesar Rp144.205.431.394,00 atau sebesar 56,23% dengan realisasi fisik sebesar 90,99%.

2.3.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 5 program dan 47 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp62.912.608.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.532.443.425,00 atau sebesar 91,45% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.3.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 6 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp46.695.926.595,00 dan realisasi sebesar Rp45.920.317.372,00 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 99,85%.

2.3.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 15 Urusan Bidang 25 program dan 290 kegiatan yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya tidak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah : RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp361.175.238.217,00 dan realisasi sebesar Rp324.918.285.875,00 atau sebesar 89,96% dengan realisasi fisik sebesar 90,42%.

2.3.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp63.628.690.600,00 dan realisasi sebesar Rp55.406.482.806,00 atau sebesar 87,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.194.733.600,00 dan realisasi sebesar Rp13.054.070.140,00 atau sebesar 91,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,07%.

2.3.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp9.838.485.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.143.252.523,00 atau sebesar 92,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 4 program dan 39 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp42.713.347.250,00 dan realisasi sebesar Rp39.625.790.500,00 atau sebesar 92,77% dengan realisasi fisik sebesar 99,36%.

2.3.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp8.677.192.800,00 dan realisasi sebesar Rp7.391.717.850,00 atau sebesar 85,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,07%.

2.3.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.951.566.200,00 dan realisasi sebesar Rp2.243.011.264,00 atau sebesar 75,99% dengan realisasi fisik sebesar 87,45%.

2.3.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 3 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp56.548.788.215,00 dan realisasi sebesar Rp53.259.341.889,00 atau sebesar 94,18% dengan realisasi fisik sebesar 98,41%.

2.3.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp40.976.956.153,00 dan realisasi sebesar Rp36.373.395.158,00 atau sebesar 88,77% dengan realisasi fisik sebesar 98,40%.

2.3.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.025.619.550,00 dan realisasi sebesar Rp14.802.718.871,00 atau sebesar 86,94% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.3.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 4 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp20.855.061.750,00 dan realisasi sebesar Rp17.539.661.856,00 atau sebesar 84,10% dengan realisasi fisik sebesar 90,01%.

2.3.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp39.513.373.900,00 dan realisasi sebesar Rp36.953.791.234,00 atau sebesar 93,52% dengan realisasi fisik sebesar 97,81%.

2.3.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada 40 Perangkat Daerah Provinsi Banten, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya yang tidak melaksanakan Urusan di Bidang Statistik adalah RSU Malingping dan RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.773.347.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.384.550.378,00 atau sebesar 80,93% dengan realisasi fisik sebesar 97,42%.

2.3.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.029.378.049,00 dan realisasi sebesar Rp6.540.063.400,00 atau sebesar 93,04% dengan realisasi fisik sebesar 96,00%.

2.3.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 4 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.852.965.650,00 dan realisasi sebesar Rp14.773.785.006,00 atau sebesar 93,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.3.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.595.732.500,00 dan realisasi sebesar

Rp3.426.653.000,00 atau sebesar 95,30% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 189 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp137.159.121.419,00 dan realisasi sebesar Rp125.288.963.312,00 atau sebesar 91,35% dengan realisasi fisik sebesar 97,88%.

2.3.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.867.814.050,00 dan realisasi sebesar Rp12.886.214.027,00 atau sebesar 81,21% dengan realisasi fisik sebesar 94,25%.

2.3.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp21.490.544.470,00 dan realisasi sebesar Rp19.608.547.122,00 atau sebesar 91,24% dengan realisasi fisik sebesar 95,25%.

2.3.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.983.086.124,00 dan realisasi sebesar Rp47.263.987.082,00 atau sebesar 94,56% dengan realisasi fisik sebesar 98,32%.

2.3.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.016.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp971.512.500,00 atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.256.976.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.932.350.780,00 atau sebesar 89,01% dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

2.3.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.801.070.950,00 dan realisasi sebesar Rp3.541.279.846,00 atau sebesar 93,17% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3.7 Urusan Pilihan Bidang Industri

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.743.629.825,00 dan realisasi sebesar Rp14.085.071.955,00 atau sebesar 95,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 323 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penghubung, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah,

Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp718.349.233.721,00 dan realisasi sebesar Rp586.327.145.530,00 atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 97,35%. Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.3.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan didukung oleh 6 program dan 144 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp393.291.522.074,00 dan realisasi sebesar Rp353.474.491.952,00 atau sebesar 89,88% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.3.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.932.228.652,00 dan realisasi sebesar Rp46.308.207.555,00 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik sebesar 98,96%.

2.3.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.399.387.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.039.748.000,00 atau sebesar 60,00% dengan realisasi fisik sebesar 87,32%.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Bidang Pendidikan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan khusus yang terjadi terkait pelaksanaan kegiatan dengan serapan rendah yaitu :

1. Pada Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran rendah disebabkan adanya efisiensi, meliputi : Efisiensi sisa kontrak atas pengadaan barang dan jasa, akomodasi sewa Kamar/Tempat Penginapan dan uang saku peserta, Belanja Listrik dan Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, belanja makan minum, Telepon/Faksimili/Internet, listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, dan adanya keterlambatan administrasi;
2. Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun pada Kegiatan yang serapannya rendah, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK terdapat satu tolok ukur (pengadaan buku perpustakaan) tidak direalisasikan karena sudah tidak relevan dengan kurikulum terbaru;
 - Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pendidikan terkendala pada pengiriman peserta pelatihan bagi operator data GTK di SMK/SMA harus PNS;
 - Kegiatan Pengembangan SDM Pendidikan terdapat Efisiensi kontrak atas pengadaan Bahan US, Blanko Ijazah, dan SKHUS SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017 dan efisiensi akomodasi;

Permasalahan secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sehingga sering terjadi miskomunikasi mengenai prioritas pendidikan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu contoh masalah adalah belum optimalnya komunikasi antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menanggapi masalah-masalah pembangunan pendidikan di tiap Kabupaten/Kota.
2. Desentralisasi pendidikan membutuhkan pembiayaan dana yang tidak kecil sehingga pembangunan pendidikan harus berakar dari masyarakat dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah. Namun demikian, di Provinsi Banten masih banyak Kabupaten/Kota yang mengandalkan bantuan atau alokasi pembangunan pendidikan dari Provinsi sehingga memperlambat upaya kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan;
3. Masih belum meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya di daerah pedesaan akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga penghargaan atas pendidikan sebagai investasi masa depan di kalangan sebagian masyarakat di Provinsi Banten masih sangat rendah sehingga himbauan Pemerintah untuk mensekolahkan anak didik ke jenjang yang lebih tinggi kurang mendapat respon positif dari masyarakat;
4. Jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (kekurangan daya tampung siswa);
5. Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalanya harga lahan, terutama di daerah perkotaan dan industri;
6. Masih banyak anak usia sekolah yang belum seluruhnya dapat bersekolah baik pada jalur Informal maupun non formal;
7. Masih banyak anak usia sekolah yang berkebutuhan Khusus belum dapat bersekolah;
8. Rasio buku dan siswa belum sesuai dengan kebutuhan (1:1);

9. Nilai rata-rata ujian sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dengan angka/jumlah lulusan yang belum mencapai 100% pada SMA dan SMK;
 10. Masih banyaknya kualifikasi pendidikan guru yang belum sesuai kelayakan mengajar, terutama tingkat pendidikan dasar;
 11. Lulusan sekolah kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (masih banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum siap kerja) dan belum mampu menciptakan lulusan kejuruan yang siap untuk mandiri/menciptakan lapangan kerja sendiri (berjiwa *enteurpreneurship*);
 12. Sering berganti kebijakan pda enerapan kurikulum pendidikan. Kurikulum KTSP belum berjalan efektif, saat sudah berganti kembali ke Kurikulum tahun 2013 (K-13);
 13. Masih rendahnya SMP/MTs walaupun adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Wajar 12 Tahun;
 14. Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
 15. Kekurangan tenaga pengajar dan kualifikasi pendidikan belum memadai (*mis match*);
 16. Belum baiknya sistem pengawasan pendidikan termasuk dalam menjamin kualitas pendidikan;
 17. Dukungan terhadap MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang;
 18. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
 19. Masih ada sekolah yang belum representatif sesuai dengan standar nasional;
 20. Tanah tidak sesuai dengan standar nasional, masih ada yang belum memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga dan perpustakaan;
 21. Dana bantuan DAK untuk tiap sekolah masih kurang dibandingkan dengan harga bahan bangunan pada saat ini.
- b. Solusi dari permasalahan umum tersebut diatas, antara lain :
1. Perlu penambahan daya tampung melalui pembangunan/penambahan ruang kelas baru;
 2. Perlu penyediaan dana yang lebih besar untuk pengadaan lahan UGB/USB baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

3. Perlu dibangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas atau pembukaan kelas jauh, atau sekolah satu atap;
4. Pada jalur non formal, perlu dikembangkan program kejar paket (A, B, dan C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM);
5. Perlu adanya penambahan jumlah buku untuk rasio siswa/buku 1:1 melalui program BOS Buku dan pendampingan melalui APBD;
6. Anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan runag penunjang lainnya dan pemenuhan media/alat pendidikan perlu ditingkatkan, baik yang bersumber dari APBD dan APBN;
7. Perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program diklat/penataran/lokakarya dan peningkatan/penambahan sarana prasarana PBM/KBM (media pendidikan, alat pendidikan atau alat peraga pendidikan lainnya);
8. Harus dilakukan upaya pemerataan guru, diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pendukungnya dan peningkatan kesejahteraan guru dan penyetaraan pendidikan guru ke lembaga LPTK yang telah diakui baik melalui sumber pendanaan Pemerintah Pusat dengan tugas belajar ataupun dengan swadana;
9. Perlu dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda yang ada di sekolah kejuruan melalui optimalisasi kesepakatan (MoU) antara pihak sekolah dengan dunia industri/kerja dan penyempurnaan kurikulum sekolah kejuruan yang lebih menekankan pada kebutuhan dan tuntutan *oriented life skill*;
10. Mengintensifkan kemitraan secara berkesinambungan melalui forum sosialisasi dengan membangun kapasitas stakeholders dan pembinaan manajemen pendidikan dalam berbagai diklat dengan meningkatkan tata kelola dan advokasi kelembagaan serta dengan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang dan pembinaan SDM yang membidangi secara intensif;
11. Dana bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi pendidikan dasar (SD-SMP-SMA) diupayakan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran mengingat masih banyaknya siswa SD-SMP yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu;
12. Bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi dan bantuan khusus murid (BKM) bagi pendidikan menengah diupayakan

peruntukannya tidak hanya kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetapi dapat digunakan sebagai transport siswa, mengingat akses pendidikan menengah belum menjangkau di setiap kecamatan, sehingga siswa berpotensi putus sekolah dapat diselamatkan;

13. Perlunya kualifikasi pendidikan guru secara berkala, diklat guru mata pelajaran dan pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan;
14. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan melalui program terpadu monitoring dan evaluasi;
15. Meningkatkan kesiapan sekolah, kemampuan kepala sekolah dan guru, periodisasi SDM dan akreditasi lembaga dengan cara sertifikasi dan advokasi;
16. Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta pengembangan networking dengan stakeholders pendidikan didanai oleh Pusat dan Provinsi;
17. Perlu perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
18. Perlu penambahan tanah atau dengan merelokasi ke tempat yang strategis dengan cara merevitalisasi gedung sekolah dasar yang lebih representatif.

2.3.2 Permasalahan Bidang Kesehatan

- a. Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah:

Permasalahan

1. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat terkait dengan Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu;
2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) sebanyak 82,00% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 7,60% karena Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata (tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun dan Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes. Capaian

Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 1,60% karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan;

3. Kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan terkendala masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih;
4. Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan dimana masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok masyarakat;
5. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terkendala masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat/suspek terkena *vector* nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten (*Malaria Import*);
6. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa 'E-Katalog'. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok;
7. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Telah dilaksanakan 88,89%, diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp400.000.000,00 dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan;
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin melalui tolok ukur bakti sosial operasi bibir sumbing dan operasi katarak, terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan permintaan dari

Kabupaten/Kota maupun pihak yang memerlukan kegiatan bakti sosial;

9. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja Pekerjaan Telah dilaksanakan 90,00%, adapun permasalahan diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi;
10. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%, hal ini dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat tentang metode pelaksanaannya yaitu pada anggaran perubahan sudah dianggarkan pada pengadaan langsung, akan tetapi sesuai dengan tidak ada anggaran untuk pengawasan, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
11. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah penyerapan anggaran sebesar 62,85% dikarenakan anggaran digunakan pada perjalanan dinas luar daerah yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan undangan/perjalan dinas yang ada pada Tahun 2017;
12. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yaitu pada belanja mesin kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal tersebut terdapat penolakan pada E-katalog yaitu Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, dan Partus Set;
13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK);

14. Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada tolak ukur Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) sebesar 60,18%, Belum dilaksanakan penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan daya;
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 42,04% dan realisasi fisik mencapai 51,25%, adapun permasalahan yaitu tidak ada kesesuaian pada belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana;
16. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran sebesar 24,88%, rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan, mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan dinas;
17. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terhadap Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidak patuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal;
18. Permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih minim baik pada tatanan

pelayanan primer maupun sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa masih rendah;

19. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga.

Solusi

1. Solusi pada Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat agar diberikan penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang Ke Posyandu, dan dilakukannya Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Solusi pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan terbentuknya rumah tunggu kelahiran, Penempatan tenaga kesehatan yang merata, dan Fasilitas kesehatan yang memadai;
3. Solusi dari kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan, antara lain:
 - Dilakukan Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih;
 - Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi. (melalui tokoh masyarakat, PKK, dll;
 - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat dalam respon KLB;
 - Pengembangan sistem dan penguatan jejaring Surveilans di level komunitas/masyarakat;
 - Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma penyakit potensial KLB.

4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
5. Sebagai masukan/usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.

b. Permasalahan dan Solusi RSUD Malingping

Permasalahan

1. Permasalahan Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan anggaran sebesar 77,00% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu: pemulasaran jenazah; sewa rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah; dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi;
2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik;
3. Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.
4. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 79,74% hal ini disebabkan belanja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan RSUD Malingping.

Solusi

Solusi yang harus dilakukan kedepan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan.

c. Permasalahan dan Solusi RSUD Banten

Permasalahan

1. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 36,81% hal ini disebabkan Proses tahun pertama pola PPK BLUD terdapat beberapa aturan masih di susun, serta kehati-hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya;
2. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas (Pelayanan Mata dan Gigi) dan kebutuhan berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan;
4. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua pekerjaan Gagal lelang yaitu: Pengadaan IPAL dan Genset terkendala karena belum tersedianya rumah genset serta tidak cukup waktu pelaksanaanya;
5. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban TA.2016) penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dengan pekerjaan pembangunan gedung 9 lantai, hal tersebut dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI dan dan sesuai surat Inspektorat No.700/783.1-Inspektorat/2017 tanggal 06 Oktober 2017 bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terrealisasi) bila pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak jadi dilaksanakan;
6. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RS (DAK) DPA Kewajiban penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI bahwa pembayaran

pembangunan gedung rawat inap dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;

7. Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan;
8. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian 94,00% dikarenakan penyediaan peralatan jaringan SIM RS yang tidak cukup waktu untuk di lelang dan penyedia tidak bisa menyediakan alat sesuai dengan spesifikasi yang di pesan;
9. Pada Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, capaian 68,51% pada kegiatan pemeliharaan alat kesehatan suku cadang alat dari vendor yang sesuai spec terbatas dan kebutuhan berbeda dengan pengajuannya, dari sebelas (11) uraian kegiatan terlaksana 8 kegiatan, sedang 3 (tiga) uraian kegiatan terlaksana sesuai dengan kebutuhan;

Solusi

1. Dibutuhkan Evaluasi perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi pengelolaan BLUD nya;
2. Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan out put kegiatan yang diharapkan;
3. Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan standar satuan harga yang sudah di tetapkan;
4. Untuk pengadaan IPAL dan Genset serta Rumah Genset pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) dianggarkan di DPA Tahun 2018;
5. Sinkronisasi yang baik dalam perencanaan kegiatan pada bidang dan bagian agar teranggarkan atau menghindari dobel pembiayaan;
6. Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan matang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal kegiatan dan target.

2.3.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencapai target disebabkan terdapat kendaraan yang rusak berat dan akan dihapuskan;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan tuisi ke PU-an;
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang terdapat efisiensi sisa kontrak;
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang tidak tercapai disebabkan :
 - kelebihan anggaran dari premi asuransi barang milik daerah;
 - untuk jasa servis dan penggantian suku cadang sebagian kendaraan rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diserap;
 - Terdapat kelebihan anggaran untuk pajak kendaraan bermotor;
 - Terdapat efisiensi sisa kontrak dari pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja;
 - Terdapat Kendaraan roda tiga yang mengalami rusak berat.
5. Kegiatan Pembangunan Jembatan Terdapat perpanjangan waktu selama 50 hari untuk pekerjaan Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Saketi-Malingping (9 Jembatan);
6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan tidak Tidak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatan karena adanya penambahan paket pekerjaan (52 paket terealisasi sebanyak 26 Paket);
7. Penetapan SOTK baru pada tahun 2017 dan pelantikan Kepala OPD baru dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga dan pelantikan PPTK pada minggu keempat. Hal ini turut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Lelang yang direncanakan mulai bulan Januari, baru dapat diusulkan ke ULP pada bulan April 2017. Pengajuan lelang ke ULP menunggu penetapan surat keputusan pejabat pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada struktur organisasi baru yang terbit pada bulan Maret.
9. Beberapa paket pekerjaan di anggaran murni memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 7 (tujuh) bulan, sehingga sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan lelang dan pekerjaan

kontruksi. Lelang yang direncanakan Januari agar terkontrak bulan Maret, lelang baru terlaksana bulan April.

10. Waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang terbatas untuk melakukan lelang dan pelaksanaan konstruksi sehingga ada beberapa pekerjaan tidak terserap optimal dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
11. Permasalahan non teknis dilapangan terkait dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam pengadaan lahan kebinamargaan, warga menolak harga ganti rugi yang ditetapkan Tim appraisal. Dalam kegiatan pengamanan pantai, pemilik lahan tidak mengijinkan lahan digunakan akses jalan kendaraan proyek. Hal ini menyebabkan pekerjaan kontruksi tidak dapat dilanjutkan.
12. Aturan baru tentang pencairan GU dan TU pada domlak APBD. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 2017 tentang UP dan TU yang mengharuskan revolving minimal 75,00% dari UP yang telah dipertanggungjawabkan.
13. Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air yang dianggarkan di APBD Murni Tahun Anggaran 2017 ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan berikut:
 - a. Pelaksanaan persiapan pengadaan lahan pad APBD-P 2017 tidak dapat dilaksanakan karena belum ada izin lingkungan dari Bupati Pandeglang sehingga menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan (dalam dokumen UKL/UPL dari Kegiatan Dinas SDAP TA.2016 hanya dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang);
 - b. Pembebasan lahan di DI Cikadueun tidak dapat dilaksanakan karena dalam studi komprehensif/studi kelayakan, batasan lokasi yang akan dibebaskan hanya sampai pada saluran induk (primer) saja, dikhawatirkan pengelolaan kurang optimal. Pembebasan seharusnya sampai pada jaringan tersier sehingga penanganan DI menyeluruh sampai lahan petak pertanian (single managemen);
 - c. Bidang PJPA mulai tahun 2017 hingga tahun kedepan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi eksisting hingga mencapai kondisi baik 100% dan

didukung oleh kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pada setiap DI kewenangan Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Provinsi Banten;

- d. Setelah tercapai kondisi DI baik 100% dan setiap DI terpelihara dan terkendalikan dengan baik maka akan dilakukan pengembangan DI baru (DI Cikadueun, DI Cihara, DI Cipatujah, DI Ciseukeut, DI Cibama, DI Cibareno dan DI Cimadur).

14. Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang PJSA tahun anggaran 2017 mempunyai anggaran pengadaan lahan Sungai Cilimer. Pekerjaan ini tidak dilaksanakan dan anggaran tidak terserap dengan pertimbangan berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau disebutkan bahwa:

- Bab II pasal 6 huruf 3 Garis Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
- BAB IV Ketentuan Peralihan Pasal 26 huruf c bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau.

- b. Hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undang II Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 28/PRT/M/2015:

- Tanah sempadan yang diperoleh dengan benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan (yang sudah mempunyai sertifikat bisa diganti rugi)
- Tanah yang belum jelas kepemilikannya (Tidak mempunyai sertifikat atau girik) *tidak boleh ada ganti rugi tanah sempadan*, yang diperbolehkan *ganti rugi kerohiman* untuk tegakan maupun bangunan yang berada di atasnya.
- Perhitungan kerohiman harus melalui Penaksir Harga Apraisal

- Tanah sempadan sungai bisa disertifikasi atas nama Pemerintah.
 - c. Hasil koordinasi dengan Kasubag Evaluasi dan Pengawasan Produk HUKUM Kab/Kota Biro Hukum Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 26 huruf c Permen PU 28/PRT/M/2015 yaitu untuk *sempadan sungai tidak perlu pembebasan lahan*.
15. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air terdapat 3 paket pekerjaan konsultan pengawas tidak dilaksanakan karena pekerjaan fisik tidak dilaksanakan;
16. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) tidak dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan DI Cihara. Adapun terkendala pengadaan lahan, yaitu:
- a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pengambilan Intake Daerah Irigasi Cihara yang dilaksanakan pada TA.2016 belum sepenuhnya diselesaikan dan fungsional sehingga pekerjaan saluran induk yang sudah dianggarkan pada TA 2017 tidak dapat dikerjakan.
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan tertentu No 700/063-Inspektorat/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 disarankan:
 - Pekerjaan di Daerah Irigasi Cihara tidak dilanjutkan sementara karena dinilai Pekerjaan Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Cihara tidak efektif dan efisien serta belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar;
 - Apabila pekerjaan dilanjutkan, pekerjaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan kontrak multiyear;
 - Perlu didesain ulang secara komprehensif dari aspek ketersediaan air, jaringan irigasi dan pemanfaatannya.
 - c. Hasil konsultasi dengan Puslitbang Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direkomendasikan untuk dilakukan stock opname serta dilengkapi analisa hidrologi, hidrolika dan geoteknik yang lebih mendalam terkait kejadian rubuhnya retaining wall;
 - d. Keterbatasan waktu yang tersisa dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran, sehingga Pekerjaan Pembangunan Saluran Induk DI Cihara (DAK) tidak dapat

dilaksanakan dan tidak dapat disarap anggaran pada tahun 2017.

17. Kegiatan pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi masih belum terserap/terrealisasi sesuai yang direncanakan. Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
 - a. Pengadaan Ruas Jalan Siliwangi (Pamulang):
 - Terdapat tanah PLN dengan status Barang Milik Negara (BMN). Perlu surat dari Direksi PLN mengenai rekomendasi pembongkaran/hibah lahan.
 - Terdapat 2 (dua) persil lahan yang belum jelas kepemilikannya.
 - b. Pengadaan Tanah pengganti yang diusulkan Pengadilan Agama tidak jelas status kepemilikannya sehingga perlu dicari usulan tanah yang lain.
 - c. Warga menolak hasil penilaian Tim appraisal terhadap lahan yang diusulkan untuk pengganti Kecamatan Kopo dan Desa Nanggung. Akibat penolakan ini proses pengadaan tanah tidak dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
 - d. Pengadaan Tanah di ruas Sempu-Dukuh Kawung:
 - Terdapat 4 tanah wakaf yang harus ruislag sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Kementerian Agama Pusat.
 - Ada tanah Aset Pemerintah yaitu Kepolisian
 - e. Pengadaan Tanah di Ruas Jalan Palima-Pakupatan
 - Terdapat tanah milik swasta Perumahan BMS yang belum jelas status lahan sebagai Fasum/Fasos atau bukan;
 - Ada tanah wakaf berupa masjid, dan terdapat salah satu tanah milik warga yang menolak hasil penilaian Tim Appraisal.
18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak terdapat Efisiensi dari sisa kontrak pengadaan *Excavator Long Arm, Wheel Excavator Mini, breaker*;
19. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang Terdapat Pembatalan Kontrak untuk pengadaan Compressor + Jack Hammer, karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;

20. Pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai progres fisik dan penyerapan anggaran kecil. Hal ini disebabkan karena tidak dapat diselesaikannya Pembangunan Pengaman Pantai Carita (Lanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan pengaman Pantai Carita (Lanjutan), pihak kontraktor tidak mendapatkan ijin dari pemilik tanah di Kawasan Lombok 2 Pantai Carita untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan/tanah sebagai akses jalan kegiatan proyek;
21. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (Review dan Harmonisasi Master Plan Kawasan Banten Lama), karena terkendala waktu.

b. Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi :

1. Pemanfaatan belanja aparatur hendaknya diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional;
2. Proses perencanaan harus dibuat lebih matang dan lebih baik lagi serta lebih terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menimbulkan permasalahan;
3. Proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak (masyarakat pemilik lahan, BPN dan konsultan appraisal). Perlu peningkatan koordinasi antar pihak terkait sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat;
4. Penganggaran kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan untuk lokasi yang sama tidak dianggarkan pada tahun anggaran yang sama. Ketika ada kendala dalam pengadaan lahan tidak akan menghambat kegiatan pembangunan jalan;
5. Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada PPTK dan staf administrasi yang menangani SPJ tentang perubahan aturan GU dan TU sehingga proses SPJ dapat berjalan lancar dan sesuai terget;
6. Berkaitan dengan pengadaan lahan PJSA, pada tahun anggaran 2018 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR Provinsi Banten akan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau kepada Dinas terkait dan warga sekitar Sungai Cilemer. Selain perlu dibuatkan

Peraturan Daerah tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dengan Kajian Akademis oleh instansi yang berwenang.

7. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
 - a. Sosialisasi intensif kepada Pemilik Lahan. Dalam menyampaikan hasil taksiran harga, Tim Appraisal perlu menjelaskan lebih detail mengenai data dan Peraturan yang mendasarinya;
 - b. Mencari alternatif tanah pengganti dari usulan Pengadilan Agama dan tanah pengganti untuk tukar guling dengan tanah wakaf dan Kantor Kecamatan Kopo serta Desa Nanggung;
 - c. Membuat surat konsinyasi yaitu surat penitipan uang di pengadilan untuk ganti rugi tanah di Jl.Siliwangi (Pamulang) dan Jalan Palima-Pakupatan (Jembatan Bogeg);
 - d. Meminta surat rekomendasi/keterangan dari Pemerintah Kota Serang mengenai peruntukan lahan di Perumahan BMS. Jika peruntukan lahan untuk fasilitas umum/fasilitas social maka tidak perlu diberikan ganti rugi. Namun jika peruntukan lahan bukan untuk fasum/fasos, maka DPUPR Provinsi Banten akan memberikan ganti rugi.
8. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan. (warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.
9. Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan stakeholders yang membahas perlu tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para

pengelola kegiatan untuk memudahkan dalam operasional kegiatan yang akan berjalan.

2.3.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan dengan penyerapan dibawah 85,00% dikarenakan pada saat perencanaan menggunakan asumsi harga satuan tertinggi pada SSH sehingga terdapat efisiensi karena realisasi belanja menyesuaikan harga pasaran (belanja jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan, penggandaan, ATK dll), belanja sewa ruang rapat/ tempat penginapan yang tidak diserap sesuai arahan/ kebijakan Gubernur untuk menyelenggarakan rapat di ruang kantor;
2. Terdapat beberapa kegiatan Konsultansi dengan penyerapan dibawah 85,00% karena efisiensi harga satuan tenaga ahli menyesuaikan pengalaman pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu:
 - Pengadaan lahan KP3B untuk pembebasan lahan seluas 14.390 m2 dan konsultan apraisal lahan yang dianggarkan pada APBD-P TA. 2017 tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
 - Pekerjaan pemagaran masjid kecil (Masjid Gowok) dikawasan KP3B dan Konsultan Pengawasan tidak dilaksanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi.
4. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan tolok ukur Penyediaan Air Bersih pada Kawasan strategis sebanyak 47 paket, diantaranya 6 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, karena mobilisasi material terkendala lokasi/akses jalan yang tidak bisa

dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Selain itu terdapat efisiensi dari beberapa paket yang sudah dilaksanakan.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat item pekerjaan pengadaan lahan seluas 4,6 Ha di Banten Lama yang dianggarkan pada APBD-P TA.2017 karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut untuk periode ke depan antara lain, sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kondisi yang ada;
3. Persiapan pengadaan lahan lebih matang/intensif;
4. Perlunya perencanaan yang lebih akurat dalam menentukan harga satuan dengan melakukan survey harga pasaran setempat;
5. Agar lebih teliti mencermati hasil lelang pekerjaan dari ULP terutama berkaitan dengan tenaga ahli;

2.3.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta tidak mengalami hambatan. Namun demikian khusus bagi kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di kabupaten/kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
- 2) Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis;
- 3) Belum optimalnya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.

b. Solusi

- 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 4) Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat.
- 6) Untuk tahun depan Anggaran untuk pemeliharaan gedung tidak dianggarkan lagi.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

- 1) Terkendala aturan yang berbeda itulah Anggaran Monev dalam Perencanaan mengikuti Juknis APBN BNPB yang memperbolehkan mengalokasikan untuk Honor Pengelola, sementara Anggaran Hibah dimaksud masuk di Anggaran APBD Provinsi Banten harus mengikuti Aturan APBD Provinsi Banten yang tidak memperbolehkan adanya alokasi untuk

Honor Pengelola, sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tidak terlaksana dengan optimal;

- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Provinsi Banten yang berkualitas dan berintegritas sehingga berdampak lambatnya penyelesaian Administrasi terutama SPJ;
- 3) Adanya ketidak sinkronan pada Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah di susun dengan pelaksanaan dilapangan.

b. Solusi

- 1) Pada penyerapan Triwulan IV direncanakan diadakan perubahan mengikuti aturan APBD Provinsi Banten Khususnya anggaran Honor Pengelola kegiatan diubah ke alokasi Perjalanan Dinas, Namun Perubahan Anggaran Tidak dapat direalisasi karena Tim Anggaran Daerah dari BAPPEDA mensyaratkan harus ada JUKNIS APBN dan JUKNIB BPBD Prov. Banten;
- 2) Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan Profesional serta berintegritas melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD dan perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan;
- 3) Dilakukan Perbaikan dan Penjadwalan ulang untuk triwulan berikutnya pada anggaran Perubahan.

2.3.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada Belanja Tidak Langsung capaian realisasi keuangan sebesar Rp15.297.194.166,00 (87,91%) dengan sisa anggaran Rp2.102.805.834,00 (12,09%), hal tersebut dikarenakan adanya pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten yang pensiun sebanyak 4 orang, meninggal sebanyak 2 orang, pindah ke SKPD lain sebanyak 2 orang sehingga Gaji dan Tunjangan Kinerja tidak dapat diserap.

2. Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana terdapat tolok ukur Asuransi Jiwa TAGANA sebesar Rp145.200.000,00 tidak dapat dicairkan karena sebagian besar peserta TAGANA tidak dapat melampirkan KTP dan KK.
 3. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name byadress*, sedangkan untuk pelaksanaan pendataan menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.
- b. Solusi
1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2017 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
 2. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.
 3. Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, baik melalui dana APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

2.3.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Permasalahan utama dalam penyerapan adalah Terlambatnya pengesahan APBD perubahan sedangkan banyaknya kegiatan yang berada pada anggaran perubahan, sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatannya;
2. Ada keterlambatan pengajuan pencairan kontrak pengadaan barang jasa, sehingga berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Adanya pengurangan anggaran (efisiensi) untuk belanja makan dan minum kegiatan;

4. Kurang matangnya dalam menyusun perencanaan Program Kegiatan yang berakibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;
5. Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang yang berakibat kepada besarnya nilai SilPa.

b. Solusi

1. Perlu adanya perencanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga di tahun selanjutnya pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dalam hal penjadwalan waktu penyusunan, penginputan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
2. Agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;
3. Setiap penganggaran belanja barang dan jasa yang dilaksanakan agar berpatokan kepada Standar Satuan Harga yang berlaku, sehingga adanya selisih perbedaan harga dapat diminimalisir;

Pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) setiap bidang agar berpatokan kepada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan.

2.3.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan terkait Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat mengingat kewenangan Pengadaan Sarana Kantor berupa Meja dan Kursi menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten selaku pengelola Gedung Kantor Bersama SKPD Provinsi Banten;

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas serta Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten;
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp10.000.000,- berupa Dekorasi Kendaraan Hias HUT Banten yang diikuti oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan;
4. Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi Penyusunan Anggaran esponsif Gender (ARG) bag SKPD Provinsi, Kab/Kota dan PSW sebesar Rp12.000.000,00 yang disesuaikan dengan metoda kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi;
5. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan agar tidak digunakan terutama pada Belanja Narasumber Penguatan Pengembangan Industri Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas Program Bagi Pelaku IR di Wilayah Lebak dan Pandeglang sebesar Rp10.000.000,00 yang disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir;
6. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga anggaran tidak digunakan antara lain:
 - Uang Saku Peserta Integrasi Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) Dengan P4K sebesar Rp11.250.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran peserta;
 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi Program PKK yang merupakan Paket Fullday sebesar Rp15.820.000,00 dan Kegiatan Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja yang merupakan Paket Fullboard sebesar Rp123.504.000,00 yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pembatasan

pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Fullboard, Fullday dan Halfday;

- Belanja Narasumber Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja sebesar Rp15.000.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber;
 - Belanja Cetak dan Penggandaan Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.300.000,00 yang disesuaikan dengan materi kegiatan yang disampaikan;
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp163.247.300,00 yang disesuaikan dengan banyaknya undangan yang diterima untuk ditindaklanjuti;
 - Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.900.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber dan moderator;
7. Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :
- Percepatan Pembentukan Kota Layak Anak sebesar Rp40.490.000,00 melalui sosialisasi Permen PPPA tentang Pembentukan Kota Layak Anak tidak dilaksanakan, mengingat Permen PPPA dimaksud telah beberapa kali dilakukan sosialisasi pada periode pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya;
 - Uang Saku Peserta dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembinaan dan Peningkatan Anak yang disesuaikan dengan kehadiran.
8. Permasalahan Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh PPTK;
9. PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada saat dilakukannya perubahan anggaran;
10. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak tergambarkan secara mendetail dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
11. Target Sasaran tidak tidak tergambarkan secara mendetail dalam Term of Reference (TOR);

12. Penetapan target kinerja tolok ukur belum mencerminkan target sasaran jangka menengah perangkat daerah (Renstra).

b. Solusi

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan.

2.3.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan, disebabkan diluar kewenangannya sebagaimana arahan Inspektorat, yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN 2017 dan tolok ukur Kegiatan APIP.

2.3.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan terdapat tolok ukur kegiatan Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tidak dilaksanakan disebabkan telah terdapat target output sejenis melalui Dana Alokasi Khusus;
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kependudukan (DAK) anggaran yang tidak diserap antara lain :
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebesar Rp13.846.326,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan

- penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp96.272.310,00 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya 25,00% dikarenakan pelaksanaan Rakornas Kependudukan yang semula diagendakan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri dilaksanakan diluar pulau jawa namun dialihkan di Jakarta.
3. Pada Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK) terkendala pada beberapa Tolok Ukur Kegiatan, antara lain : Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp55.034.500,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK), anggaran yang tidak digunakan antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Pemanfaatan Data dan PIAK Kependudukan Tingkat Provinsi sebesar Rp12.500.000,00 yang disesuaikan dengan materi pada saat pelaksanaan kegiatan, Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester Tingkat Provinsi sebesar Rp20.300.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Terkait PIAK dan Pemanfaatan Data yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 5. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang

bersumber dari PAD Provinsi Banten maupun DAK dan DAU meliputi :

- Review atas Pelaksanaan Anggaran terhadap Standar Satuan Harga Tahun 2017;
- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan;
- keterbatasan waktu pelaksanaan DAK sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Review atas anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya untuk menghadiri Rakornas Kependudukan.

b. Solusi

1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan anggaran serta tahapan proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
3. Mempedomani Standar Satuan Harga serta peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan anggaran.

2.3.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa;
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan, oleh karena penetapan APBD Perubahan TA.2017 tidak sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkecakupan Khusus (kompeten);

5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan.

b. Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, dimasa mendatang diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal. Sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, antara lain:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat, akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

2.3.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat efisiensi Belanja Listrik, belanja makan minum rapat, dan belanja makan minum kegiatan;
2. Kegiatan Pendayagunaan Telematika, dikarenakan Bintek system informasi perencanaan penganggaran dan laporan tidak dapat dilaksanakan;
3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan, dikarenakan Penerbitan Tabloid Menara Banten;
4. Kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak Untuk Tahun sedunia tidak dapat dilaksanakan dan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI tidak disetujui oleh Tim Penataan UPT.

b. Solusi

1. Harus dilakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan;
2. Akan lebih selektif dalam menentukan penjadwalan yang melibatkan unsur narasumber luar pada Kegiatan Pendayagunaan Telematika dengan tolok ukur Bintek system informasi perencanaan penganggaran;

3. Harus dilakukan penyesuaian pada pola penganggaran terhadap Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan;
4. Kedepan untuk kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak untuk Tahun sedunia realisasi keuangan agar dapat disesuaikan dengan kesesuaian waktu pelaksanaan dan Tolok Ukur kegiatan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI Tidak dianggarkan lagi karena usulan pendirian UPT tidak disetujui oleh tim penataan UPT.

2.3.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Permasalahan

1. Pembangunan gedung PLUT tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang oleh LPSE;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi pada tolok ukur Pemeringkatan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persiapan dan terkendala dengan aturan yang mengharuskan dilaksanakan oleh lembaga survey yang berakreditasi;
3. Terdapat efisiensi pada tolok ukur kegiatan bimbingan koperasi pada jumlah koperasi dari 138 koperasi ternyata dalam kondisi terahir berjumlah 125 koperasi, hal ini dikarenakan koperasi tidak aktif.

b. Solusi

1. Agar proses lelang diajukan di awal tahun, karena pengajuan pembangunan gedung PLUT diajukan pada bulan agustus sehingga tidak cukup waktunya;
2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.

2.3.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pelaksanaan progam Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jadwal kegiatan yang masih belum pasti terutama

kegiatan promosi yang dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam pengalokasian anggaran;

2. Belum optimalnya penerapan dari standar operasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan;
3. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik;
4. Permasalahan Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;
5. Lemahnya perencanaan awal penganggaran dan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. Pelarangan melaksanakan kegiatan/rapat di luar kantor, sehingga Perjalanan Dinas, sewa ruang rapat, penginapan, dan makan minum yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal;
7. Dampak meletusnya Gunung Agung di Bali yang menyebabkan batalnya penyelenggaraan pameran penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa honorarium tim terkoordinasi tidak lagi diperkenankan dibayarkan;
9. Terlambatnya proses lelang.

b. Solusi

1. Melakukan koordinasi dengan BKPM RI mengenai perubahan jadwal promosi;
2. Penerapan kedisiplinan bagi tiap-tiap pelaksana penyelenggaraan perizinan dalam melaksanakan proses perizinan agar sesuai dengan standar yang diterapkan;
3. Komunikasi yang intensif dan optimal dengan OPD teknis dan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten/Kota demi tercapainya sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Mengikutsertakan pegawai BPPT dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/kursus yang dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja organisasi;

5. Secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, termasuk didalamnya penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki.
6. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
7. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
8. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal.

2.3.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor efisiensi Pada Belanja Kendaraan;
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dikarena Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah di fasilitasi oleh penyelenggara, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

b. Solusi

Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam penganggaran.

2.3.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik, adalah:

a. Permasalahan

1. Masih belum maksimalnya pengumpulan data yang dilakukan baik dari internal SKPD, Stakeholder, Kab/Kota yang berakibat kompilasi data masih belum lengkap;
2. Tenaga ahli IT dalam pengelolaan website masih belum mencukupi, menyebabkan informasi yang disampaikan belum maksimal dan updating data masih tersendat;

3. Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat terkait kebutuhan informasi publik masih belum maksimal.

b. Solusi

1. Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyiapkan tenaga IT yang handal dan profesional;
3. Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan website melalui updating dan upgrade website.

2.3.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya terdapat 2 (dua) kegiatan yang serapan rendah, meliputi :

- Kegiatan Pemanfaatan Taman Budaya terdapat efisiensi dari SPPD, belanja Modal barang meubelair dan pendataan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu;
- Kegiatan Pemanfaatan Museum terdapat Belanja jasa konsultasi disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan.

b. Solusi

Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Belum meratanya minat baca antara daerah perkotaan dan pedesaan;
2. Belum meratanya akses layanan perpustakaan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan;
3. Belum maksimalnya difersifikasi layanan perpustakaan digital;

4. Kurangnya promosi perpustakaan;
5. Belum maksimalnya capaian perpustakaan standar nasional dikarenakan wewenang akreditasi perpustakaan ada pada Perpustakaan Nasional RI;
6. Perlunya dukungan/tambahan sumber daya manusia yang memadai dalam bidangnya (IT, Akuntansi, Pelaporan) dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
7. Pengadaan koleksi E-Book ada yang tidak dilaksanakan karena kendala kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi pihak penyedia.
8. Masih terdapatnya kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja kegiatan yang belum tepat, sehingga membutuhkan perubahan anggaran.
9. Kesalahan perencanaan Tolok Ukur pengadaan DED Diorama arsip sehingga anggaran tidak bisa diserap karena harus membuat Elementary Design dan Story Line terlebih dahulu.
10. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Tidak Langsung sehingga mengakibatkan silpa yang cukup besar.
11. Permasalahan Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan informasi kearsipan.
12. Sarana teknologi informasi yang belum memadai dalam mendukung pemanfaatan IT dalam kearsipan.
13. Belum maksimalnya konektivitas jaringan informasi kearsipan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Memperluas kegiatan pengembangan minat baca melalui berbagai seminar, lomba, gebyar ke pelosok kab/kota se Provinsi Banten.
2. Memperbanyak jumlah titik layanan kunjungan mobil unit perpustakaan keliling di 8 kab/kota se Provinsi Banten sehingga dapat menjembatani masyarakat yang jauh aksesnya dari layanan perpustakaan tetap dapat memanfaatkan perpustakaan.
3. Pengembangan perpustakaan digital melalui e-Banten, yang merupakan layanan perpustakaan digital berbasis e-Book.

4. Meningkatkan promosi perpustakaan melalui berbagai cara baik media cetak, media elektronik dan media sosial.
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan guna menyiapkan sebanyak mungkin perpustakaan yang siap dilakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional.
6. kualitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memenuhi kualifikasi SDM yang di butuhkan.
7. PPTK dan PEP lebih cermat dalam menyusun perencanaan dengan berdasarkan Regulasi yang ada dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Koordinasi yang lebih intensif baik dengan leading sektor Pemerintahan maupun mitra kerja.
9. Sisa Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam teknologi informasi melalui berbagai pelatihan dan magang.
10. Peningkatan sarana teknologi informasi dalam menunjang digitalisasi Arsip.
11. Melakukan langkah koordinasi yang intensif dengan berbagai leading sektor yang terkait dengan konektifitas jaringan kearsipan seperti ANRI, Dinas Kominfo dan Bappeda Provinsi Banten.

2.3.19 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan Kegiatan pengadaan sarana prasarana lampu suar (BBAT) realisasi anggaran kegiatan tidak terlaksana dikarenakan dalam suatu akan merencanakan dan sampai pelaksananya pembangunan harus ada beberapa tahapan, seperti dalam kegiatan ini bahwa untuk kegiatan ini bahwa belum adanya dari pada bangunan *breakwater*.

b. Solusi

Perlu adanya perencanaan, yang lebih maksimal lagi, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

2.3.20 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang hanya terserap sekitar 56,26% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp354.590.000,00. Hal ini disebabkan minimnya aktifitas kendaraan operasional kantor (non operasional jabatan) dalam penggunaannya sehingga kendaraan – kendaraan tersebut belum memerlukan service berkala serta pergantian suku cadang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Peremajaan kendaraan bermotor roda 4 yang tidak terserap sejumlah pagu tolok ukur sebesar Rp195.300.000,00. Hal ini disebabkan minimnya persiapan dalam menyusun spesifikasi kendaraan yang diajukan sehingga penjadwalan pelaksanaan *e-purchasing* terhambat selain itu terdapat nilai belanja karoseri/peremajaan lebih besar daripada perolehan aset sehingga disarankan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk tidak dilaksanakan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Fasilitasi bimbingan teknis yang hanya terserap sekitar 2,90% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp30.000.000,00, Hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, adapun undangan bimtek yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan.

b. Solusi

1. Memahami analisa perencanaan berbasis SMART (specific, measurement, reliable dan time bond);
2. Melaksanakan pengawasan atas penguasaan barang milik daerah yang dikuasai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemahaman tentang "program follow function" dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai landasan

dalam menyusun anggaran agar terciptanya anggaran profesional, yang responsif terhadap efektifitas dan efisiensi sehingga tepat guna dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.

2.3.21 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian, adalah:

a. Permasalahan

1. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pada kantor Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner realisasi keuangan terserap 84,35%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada pembayaran listrik, telpon serta makan minum rapat;
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) hanya terserap 88,27%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi dari belanja pupuk dan efisiensi belanja sewa ruang;
3. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Pakan Ternak sebesar 84,54%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi pada belanja makan minum kegiatan dan sewa ruang rapat;
4. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun sisa anggaran yang ada dikarenakan terdapat efisiensi pada rekening belanja makan minum kegiatan, sewa ruang kegiatan, maupun honorarium internal. Salah satu factor adanya efisiensi ini adalah belum jelasnya peraturan yang mengatur pengeluaran biaya pada honorarium internal, serta kebijakan penggunaan ruang rapat pada hotel.

b. Solusi

1. Sisa Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi pemerintah terhadap pelaksanaan APBD.

2.3.22 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat target kinerja di 4 (empat) kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan yang tidak seluruhnya terealisasi, yaitu hanya terelaborasi 6.903 RTS dari target 7.045 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan sehingga terdapat 142 RTS tidak terealisasi. Sehingga mengakibatkan timbulnya deviasi fisik (capaian kinerja *output*) sebesar 0,39% dan berimbas pada capaian kinerja *output* pelaksanaan APBD;
2. Permasalahan realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) pada pelaksanaan 2 kegiatan yaitu BANSOS Listrik Pedesaan dan hibah Sumur Bor Produksi Air Tanah dikarenakan realisasi anggaran untuk kedua kegiatan tersebut baru selesai di akhir bulan Nopember 2017, sedangkan dalam dokumen Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diplot selesai pada bulan Juni-Juli 2017. Sehingga ada keterlambatan selama 5 bulan (Agustus-Nopember). Selama kurun waktu 5 bulan tersebut, deviasi negatif penyerapan anggaran Dinas ESDM Provinsi Banten cukup besar (30-40%), dimana 60-75% adalah kontribusi dari permasalahan hibah dan BANSOS ini.

Kendala dan hambatan yang dihadapi pelaksanaan kegiatan hibah dan bansos adalah diantaranya sebagai berikut, yaitu :

- Kendala penyiapan dokumen pelelangan (adanya proses verifikasi ulang calon penerima bansos dan proses pergeseran anggaran);
 - Proses pelelangan dilakukan sampai 3 kali (2 kali gagal lelang);
 - Terlambatnya penetapan calon penerima hibah dan BANSOS oleh Gubernur.
3. Permasalahan realisasi belanja perjalanan dinas dan makan minum kantor;
 4. Alokasi berlebih perencanaan anggaran untuk pembayaran rekening PJU (perbatasan dan kawasan pariwisata);
 5. Sisa anggaran di DPA yang berasal dari sisa kontrak.

b. Solusi

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi internal setiap bulannya di SKPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus penyiapan bahan rapat pimpinan dengan Gubernur;
2. Koordinasi terpadu dengan PT. PLN terkait penyiapan dokumen verifikasi calon penerima BANSOS Listrik Perdesaan;
3. Koordinasi terpadu dengan POKJA ULP Provinsi Banten terkait percepatan dan penyelesaian proses pelelangan untuk paket-paket pembangunan Listrik Perdesaan;
4. Menetapkan calon penerima hibah dan bantuan sosial melalui Surat Keputusan Kepala OPD setelah diterbitkannya SK Pelimpahan wewenang penetapan penerima hibah dan BANSOS dari Gubernur ke kepala OPD;
5. Optimalisasi anggaran yang tidak digunakan di DPA dengan mengubahnya di APBD Perubahan TA.2017.

2.3.23 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah;
2. Masih ditemui barang kadaluwarsa yang beredar;
3. Meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten.

b. Solusi

1. Penyelesaian masalah terhadap dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya ini tidak bisa dilakukan secara parsial, namun perlu kebijakan nasional;
2. Dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluwarsa;

3. Strategi yang dilakukan terhadap meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017 harus berorientasi pada bagaimana IKM di Banten tetap terpancang kuat dan berdaya saing.

2.3.24 Urusan Pilihan Bidang Industri

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Bagi beberapa pelaku industri, permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk. Para pelaku IKM di beberapa wilayah Kabupaten/Kota biasanya masih bertransaksi dengan cara konvensional sedangkan saat ini konsumen sedang gemar bertransaksi *online*. Idealnya, para pelaku industri sudah dapat menguasai teknologi informasi sederhana khususnya berbasis android;
2. Keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala;
3. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang penyediaan bahan mentah maupun pemasaran.

b. Solusi

1. Langkah yang ditempuh berkaitan dengan pemasaran produk diantaranya dengan melibatkan praktisi marketing yang berkolaborasi dengan praktisi IT (*information technology*) untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku IKM;
2. Untuk mengatasi keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian harus melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi;
3. Perlu ditingkatkan kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik dalam hal ketersediaan bahan mentah maupun dalam pemasaran.

2.3.25 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

- Sekretariat DPRD
 - a. Permasalahan

Pada Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, penyerapan belanja masih rendah realisasinya diantaranya adalah pembahasan Raperda.
 - b. Solusi

Dilakukan dengan upaya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani produk hukum pemerintah daerah selaku leading sector penyusunan dan pembahasan hasil legislasi daerah dengan mempertimbangkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD sehingga Raperda dapat dibahas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Biro Hukum
 - a. Permasalahan
 1. Pada beberapa kegiatan yang serapan kurang dari 80,00% disebabkan adanya efisiensi anggaran;
 2. Belanja Promosi dan Publikasi kegiatan Penyusunan Raperda (1 Raperda x 1 kali tayang x 1 keg) tidak terlaksana, disebabkan Raperda yang diterima Biro Hukum, tidak ada yang layak untuk dipublikasikan karena masih dikembalikan ke pengusul serta jumlah halaman Raperda yang diusulkan tidak terjangkau oleh anggaran penayangan sebesar Rp30.000.000,00 untuk Raperda RPJMD;
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Biro Hukum, realisasi keuangan hanya terserap 37,54%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Keuangan pada belanja cetak dan belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah terdapat beberapa perjalanan dinas yang semula direncanakan, tidak bisa dilaksanakan karena belum ada undangan masuk ke

Biro Hukum, sehingga adanya efisiensi pengeluaran anggaran belanja perjalanan dinas;

5. Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa tolok ukur, meliputi :

- Terdapat efisiensi pembiayaan, dan terdapat prestasi terhadap Jumlah Perda yang dilakukan Pengkajian dianggarkan 3 Kajian namun dihasilkan 5 Kajian Perda, serta terdapat prestasi dalam Asistensi, dimana raperda yang dibahas bersama dengan DPRD dianggarkan 6 Asistensi terlaksana 8 Asistensi;
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya 2 kegiatan yaitu 1 Harmonisasi dan Sinkronisasi, dan 1 Pemantapan Konsepsi. Hal ini karena Raperda yang dibahas belum diterima oleh Biro Hukum.

6. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum hanya terlaksana 2 kegiatan Forum Diskusi dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu tidak mencukupi, selebihnya karena efisiensi pada belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja jasa tenaga ahli.

b. Solusi

Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk tahun yang akan datang program dan kegiatan pada Biro Hukum perencanaanya akan disusun dengan lebih cermat dan teliti sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan yang lebih optimal untuk mencapai target yang telah direncanakan.

- Biro Organisasi

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah terdapat kendala pada 2 tolok ukur kegiatan, yaitu:

- Tolok ukur Kegiatan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari ren aksi KPK mengalami hambatan pada saat penyusunan/proses input data pada aplikasi Sinjab (www.sinjab.bantenprov.info) ini disebabkan kurang pemahaman dalam mengidentifikasi analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagian OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan adanya regulasi

- baru terkait nomenkatur JFU (Jabatan Fungsional Umum) Permendagri Nomor 25 Tahun 2016;
- Tolok ukur Penyusunan Standar kompetensi teknis dan manajerial Jabatan tidak bisa dilaksanakan karena penyusunan Anjab dan ABK belum tuntas.
2. Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Perangkat Daerah Kab/Kota, pada tolak ukur kajian penataan lembaga tertentu sebagai bagian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehubungan dengan perubahan perundang-undangan tersebut maka Peraturan Pemerintah yang mengatur Perangkat Daerah turut mengalami perubahan yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, klausul tentang lembaga tertentu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten, pada tolak ukur Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten, tidak dapat dilaksanakan karena sampai masa ahir periode anggaran tahun 2017 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan keputusan terkait evaluasi Lakip Provinsi Banten;
 4. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur pada tolak ukur Penyusunan Rapergub *Reward* dan *Panishment* Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Banten yang diinisiasi BKD telah menerbitkan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah oleh Pergub Nomor 31 Tahun 2017

tentang perubahan Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh Perangkat Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara mengenai Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Teknis Masing masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Banten akan selalu mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut;
4. Segera berkoordinasi dan konfirmasi ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi LAKIP Provinsi Banten;
5. Akan mempedomani dan mengikuti peraturan yang telah diterbitkan sesuai amanat Pergub.

- Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Permasalahan

Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang datang sehingga terjadi efisiensi anggaran;

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Bina Infrastruktur dan SDA dengan serapan 79,97% karena terdapat kelebihan biaya Transportasi pada belanja Perjalanan Dinas.

- Biro Umum
- a. Permasalahan
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan tidak dapat di realisasikan terkait dengan surat edaran Inspektorat Provinsi Banten perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan. Sehingga berpengaruh besar pada persentasi capain realisasi kegiatan;
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terkendala pada penyerapan pengadaan APK barang yang tidak di laksanakan sebesar Rp557.000.000,00;
 3. Kegiatan terdapat efisiensi pada belanja Pengadaan Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp150.000.000,00 dan Pengadaan Pagar Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp65.000.000,00;
 4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi terdapat efisiensi pada beberapa belanja di antaranya sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas berjenis Land Cruiser & Nissan X Trail dengan Efisiensi sebesar Rp900.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (9 Unit) dengan Efisiensi sebesar Rp320.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Golf dengan Efisiensi sebesar Rp120.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (2 unit) dengan Efisiensi sebesar Rp430.000.000,00.
 5. Pada tolok ukur kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan dan tolok ukur kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan tahun 2017 terkait dengan surat edaran Inspektorat perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan.

- Biro Administrasi Pembangunan Daerah
- a. Permasalahan
1. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah
 2. Adanya perubahan/pergeseran kode rekening di tiap kegiatan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
 3. penerapan SOTK baru sehingga perlu adanya pemahaman terhadap pola/penerapan yang lebih matang.
 4. Efisiensi sebesar Rp1.614.543.999,00 dari Honorarium Non PNS, Pelengkapan Peserta, Makan minum kegiatan, Belanja internet, Dekorasi, Promosi dan Publikasi, kegiatan yang dikontraktualkan (Fullboard, Kajian) dan tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, SPPD Koordinasi untuk Tim Pokja ULP tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan dari tiap OPD Provinsi Banten.
- b. Solusi
1. Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
 2. Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan, yaitu :
 - Peningkatan pengelolaan dengan mengoptimalkan SDM dan Pelatihan - pelatihan sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur;
 - Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perlu adanya kecermatan dan perencanaan yang baik sehingga Capaian Program dan Kegiatan dapat di Optimalkan.

- Biro Kesejahteraan Rakyat

a. Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang dating sehingga terjadi efisiensi anggaran;
2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdapat beberapa fungsi/kewenangan yang tumpang tindih dengan OPD lain;
3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Biro yang membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerja Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan data yang valid dan up date dari OPD teknis diatas.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD Teknis dan terkait dengan penyediaan data pembangunan dan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan.

- Biro Pemerintahan

a. Permasalahan

Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :

1. Penyerapan anggaran baru dapat di laksanakan pada bulan Maret 2017;
2. Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhirnya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan;

3. Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.

b. Solusi

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

- Badan Penghubung

a. Permasalahan

1. SPJ kantor (Badan) harus 75 % bila belum mencapai 75 % belum dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan yang sudah selesai belum dapat mengajukan kembali karna harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak tidak terserapnya masing-masing objek rekening Kegiatan;
3. Proses Penatausahaan Keuangan melalui data base SIMDA online masih terkendala of line sehingga menghambat

pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;

4. Penentuan GU UP per SKPD dihitung dengan formulasi $GU\ SKPD = \frac{1}{12} \times (\text{Jumlah pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS})$, tidak berdasarkan Estimasi pengeluaran alokasi triwulan pada anggaran kas yang sesuai dengan Pergub Banten 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sehingga GU UP nilainya tidak sesuai dengan Anggaran Kas/ROK;
5. Pada Kegiatan Sarasehan belum ada tindak lanjut nota dinas kegiatan;
6. Konsep Pembinaan dan Rakor mahasiswa, serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan tujuan dan masalah dan Tufoksi serta PP 18 Tahun 2016;
7. Pengelolaan Wisma tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Pemda agar disesuaikan dengan fungsinya;
8. Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi Badan Penghubung;
9. Hubungan Kelembagaan kurang efektif apabila jadi satu dengan promosi dan investasi karna di Badan Penghubung lain Hubungan Kelembagaan jadi Fasilitas Pimpinan dan Pelayanan Masyarakat;
10. Badan penghubung yang mengkoordinasi. Tugas badan penghubung mengikuti event promosi? Uraian tugas . Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi;
11. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKA, KL, DPA, ROK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
12. Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;
13. Belum semua OPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
14. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
15. Belum ada database investor/pengusaha dalam dan luar negeri;

16. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jati diri Provinsi Banten;
 17. Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan sepatutnya perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
 18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
 19. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
 20. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder;
 21. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
 22. Belum terbentuknya Tim Koordinasi terkait dengan Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat;
- b. Solusi
1. Dilakukan Penentuan SPJ kantor (Badan) harus 75% agar dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan tidak harus menunggu kegiatan lain selesai;
 2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat dilakukan seharusnya pada masa Penyusunan RKA sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diserap sesuai dengan DPA;
 3. Kedepan Tim SIMDA Provinsi Banten dan Dinas Kominfo agat meningkatkan peran aktifnya untuk keberlangsungan SIMDA online sehingga tidak terjadi kembali SIMDA of line yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;
 4. Penentuan GU UP per SKPD agar ditinjau dan dihitung kembali sehingga proses ganti uang dan kesedian anggaran tiap OPD dapat mendukung kelancaran kegiatan;
 5. Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra OPD yang menangani produk kesenian;
 6. Perlu dibuat Nota Dinas tindak lanjut hasil narasumber Instrumen sebagai bahan perencanaan kegiatan saresahan dan pengendalian

dan evaluasi kegiatan. Sehingga ada kesinambungan pertemuan. Topik/Tema yang berkaitan dengan tupoksi/IKU Badan Penghubung

7. Agar dilakukan mapping antara Badan Penghubung dengan ARTP terkait kegiatan (lihat PP nomor 18 tahun 2016).
8. Pengelolaan Wisma tidak berhubungan dengan nomenklatur penyelenggaraan pemerintah daerah di Sarankan tupoksinya dipindah/ dirubah;
9. Perlu adanya Koordinasi dan mapping antara badan penghubung dan dinas penanaman modal terkait pembagian tugas;
10. Akan dibuat rumusan, usulan kajian dan konsep tentang hubungan kelembagaan, dan usulan tentang kerjasama pembangunan. Serta hubungan kelembagaan dipindahkan ke fasilitasi penyelenggaraan;
11. Agar ditampilkan kegiatan yang terkait dengan investasi serta dikoordinasikan, mapping dengan dinas terkait;
12. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
13. Kedepan harga satuan harus disesuaikan dengan kondisi di Jakarta dan dimasukkan dalam Pergub;
14. Kedepan akan dilaksanakan dan koordinasi untuk semua SKPD Provinsi Banten agar melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
15. Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
16. Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
17. Perlu ditinjau kembali beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan Penghubung sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja;
20. Harus mengoptimalkan kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder;

21. Perlu membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
22. Akan mengusulkan Tim Koordinasi tentang Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat.

2.3.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp18.797.378.100,00 dan realisasi sebesar Rp15.222.005.477,00 atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 95,00%.

Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai target, antara lain : disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai kontrak, nilai barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, penginapan, honorarium pengawas, honorarium panitia dan honorarium narasumber;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor disebabkan pengadaan kendaraan roda 2 yang dibatalkan, dan Alat komunikasi;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur disebabkan tolok ukur kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
4. Kegiatan penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah disebabkan pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat.

2.3.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Pemerintahan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp41.637.536.400,00 dan realisasi sebesar Rp35.140.132.543,00 atau sebesar 84,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,28%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, adalah:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Tenaga Pendidik, pada kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

2.3.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan didukung oleh 4 program dan 103 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Umum Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp199.717.953.995,00 dan realisasi sebesar Rp126.055.220.948,00 atau sebesar 63,12% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, adalah:

- Badan Pendapatan Daerah

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri

penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah *out of stock/discountinue* atau *indent*;

3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang jumlah anggaran sebesar Rp2.413.963.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.765.380.291,00 atau 73,13%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Penyediaan BBM. Terdapat kekeliruan penganggaran belanja BBM yang tidak sesuai standar satuan harga Provinsi Banten maka PPTK berinisiatif merubah alokasi belanja tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran namun usulan pergeseran tidak terlaksana, maka belanja tersebut disesuaikan dengan proses perubahan anggaran yang menyebabkan jadwal pelaksanaan berubah dan proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal;
- Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Jasa Listrik. Karena terdapat rencana menaikkan kapasitas daya listrik pada UPT Pandeglang dari daya 1005.000Kwa menjadi 135.000Kwa, maka PPTK berinisiatif mengalokasikan dalam usulan pergeseran anggaran TA.2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal;
- Belanja Perjalanan Dinas. karena dibulan Januari terdapat pengisian jabatan pada UPT Pandeglang yang bertambah jumlah pegawainya sehingga jumlah belanja perjalanan dinas memerlukan penyesuaian, maka PPTK berinisiatif mengusulkan usulan pergeseran anggaran TA. 2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal.

4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung jumlah anggaran sebesar Rp350.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.631.035,00 atau 27,28%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Terdapat rehab gedung kantor pada kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan karena pada bulan Mei 2017 pegawai pada

UPT Rangkasbitung menempati gedung baru dan gedung tersebut dan gedung tersebut belum bisa dilakukan renovasi/rehab karena masih dalam pemeliharaan pihak ketiga;

- Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dinas yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan kendaraan;
- Efisiensi Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan alat perlengkapan kantor tersebut.

5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja jumlah anggaran sebesar Rp1.975.566.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.366.094.320,00 atau 69,15%, rendahnya penyerapan diakibatkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses *e-Catalog*, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja modal alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock atau indent.

6. Beberapa kegiatan terdapat efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perauran Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel, meliputi :

- Kegiatan Keberatan dan Restitusi jumlah anggaran sebesar Rp268.728.000,00 dan realisasi sebesar Rp159.696.000,00 atau 59,43%;
- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi jumlah anggaran sebesar Rp172.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.131.000,00 atau 56,97%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu :

- Efisiensi terkait adanya kebijakan pimpinan untuk tidak melaksanakan rapat di luar kantor (Hotel), uang saku peserta tidak diserap karena peserta yang hadir hanya dari OPD Provinsi Banten dan perlengkapan peserta berupa tas tidak diserap karena tidak sesuai dengan SSH;
 - Efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel.
 - Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota jumlah anggaran sebesar Rp301.104.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.420.500,00 atau 53,94%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu adanya kebijakan tidak diperbolehkannya Rapat di luar Kantor, narasumber maksimal 4 orang yang bisa di realisasikan, dan Perlengkapan Peserta yang tidak boleh di serap; dan
7. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lain-lain di wilayah UPT DPPKD Cilegon jumlah anggaran sebesar Rp22.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.100.000,00 atau 79,74%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
- Dalam pendataan pemakaian BBM pada SPBU dan sektor industri, anggaran penyerapan hanya sebesar 79,74% dikarenakan dalam pengeluaran uang saku pendataan pemakaian BBM Nilai Penyerapan Anggaran sebesar Rp14.600.000,00 sehingga sisa yang tidak terserap sebesar Rp4.600.000,00 yang diakibatkan terdapat kesalahan perhitungan alokasi anggaran kas perubahan yang seharusnya untuk dua bulan tetapi diinput satu tahun anggaran.

b. Solusi

Solusi yang dapat ditempuh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:

1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
 2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
 3. Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi;
 4. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat; dan
 5. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a. Permasalahan
- Permasalahan yang dihadapi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah di beberapa kegiatan yang serapan anggaran dibawah 85,00%. hal ini disebabkan karena efisiensi, yaitu: Efisiensi pada Belanja Jasa Narasumber, Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Efisiensi dari kontrak/LS, Belanja Sewa Tempat/Ruang Rapat (Pelaksanaan kegiatan dikantor), Belanja Sertifikasi, dan Pelaksanaan kegiatan diluar kendali Pengguna Anggaran (Verifikasi DPA 2018, Bimtek Simral, Sosialisasi Perda BMD).
- b. Solusi
- Solusi dari permasalahan yang terjadi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah, antara lain:
1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA;
 3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.

- Biro Umum

a. Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten dengan pekerjaan Pengadaan Tanah Rencana Waduk Sindang Heula lanjutan seluas ±71,1 Ha terlaksana 89 bidang dengan luas 225,054 m² (22,5 Ha). Sisanya tidak terlaksana karena lahan seluas 35 Ha dalam sengketa hukum dan 13,6 Ha dengan bukti kepemilikan tanah belum jelas.

b. Solusi

1. Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2018 untuk sisa tanah seluas 48,6 Ha yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2017;
2. Melakukan pembayaran melalui konsinyasi terhadap tanah sengketa pada tahun anggaran 2018.

2.3.8 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.573.227.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.091.089.055,00 atau sebesar 69,91% dengan realisasi fisik sebesar 89,53%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pengadaan Mesin Absensi untuk SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengesahan DPPA Tahun 2017 ditetapkan dengan waktu yang sedikit sehingga jadwal pelaksanaan tidak memungkinkan untuk direalisasikan, sehingga rencana pemasangan jaringan dan instalasi mesin absensi bagi SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pegawai tidak dapat dilakukan mengingat teknis pelaksanaan sesuai perencanaan tidak mungkin dilakukan;

2. Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada tolok ukur Pengukuran kinerja pegawai terkendala oleh pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan sistem kinerja, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memahami secara utuh system kinerja dimaksud;
3. Dalam rangka pengoptimalisasi pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional penganggaran kegiatan tersebut dirasionalisasi, akan tetapi pada perubahan anggaran tidak dirubah sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
4. Pelaksanaan beberapa tolok ukur seperti Pelantikan dan Sidang Baperjakat Jabatan Struktural tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 sedangkan komponen lainnya terdapat rasionalisasi terkait dengan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten;
5. Pelaksanaan Seleksi Perpindahan PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Badan Kepegawaian Daerah masih menganalisa terkait kebutuhan pegawai didasarkan oleh Analisis Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

b. Solusi

1. Proses perencanaan harus dianggarkan pada DPA murni sehingga ketersediaan waktu sangat banyak;
2. Harus ada sosialisasi, pendampingan dari Tim terkait OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pengelolaan Manajemen Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov Banten akan lebih efektif dijalankan dengan cara langsung berkoordinasi dengan OPD terkait karena karakteristik di tiap-tiap OPD berbeda-beda;
4. Dalam penyusunan anggaran kedepan harus mempedomani ketentuan yang berlaku.

2.3.9 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Teknis Substantif, Fungsional, Manajemen dan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terdapat efisiensi kontrak, efisiensi honor narasumber dan efisiensi uang saku peserta. Selain itu terdapat peserta yang dipanggil untung mengikuti Diklat, namun tidak menghadiri baik dikarenakan ketidaksesuaian kriteria, mendapatkan penugasan lain, maupun tidak ada konfirmasi ketidakhadiran;
2. Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, terdapat perubahan alokasi anggaran jumlah peserta Diklat dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang;
3. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor , Terdapat efisiensi kontrak dan anggaran yang tidak digunakan pada honorarium pejabat/ pokja/ panitia pengadaan barang dan jasa, belanja premi asuransi BMD, dan belanja pajak BBNKB;
4. Pada kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Terdapat efisiensi dan anggaran tidak digunakan karena; adanya perubahan harga, stok yang masih tersedia, pemakaian dibawah perkiraan anggaran;
5. Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak, honorarium narasumber, maupun anggaran yang tidak digunakan karena efisiensi.
6. Pengesahan APBD Perubahan pada triwulan ke-empat (Bulan November) berimplikasi pada padatnya kegiatan di dua bulan terakhir, sedangkan sarana dan prasarana kediklatan khususnya kelas dan asrama masih terbatas;
7. Kurangnya dukungan OPD untuk mengirimkan peserta Diklat sesuai dengan kompetensi/ Kriteria yang dipersyaratkan;
8. Tingginya Kebutuhan Diklat melalui usulan yang disampaikan baik oleh OPD Provinsi Banten, BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten, maupun Lembaga/ Instansi Vertikal belum seiring dengan ketersediaan sarana utama maupun sarana penunjang Kediklatan;

9. Rencana Operasional Kegiatan (ROK) belum dapat di laksanakan Tepat waktu.

b. Solusi

1. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun 2018 melalui proses *e-planning* (SIMRAL), sehingga diharapkan serapan antara realisasi sejalan dengan perencanaan;
2. Telah dibuat kalender penyelenggaraan Diklat Tahun 2018, tujuannya agar OPD dapat menyiapkan ASN yang akan mengikuti Diklat selama Tahun 2018 agar sesuai dengan peta kebutuhan kompetensi. Selain itu kalender menjadi kontrol agar terdapat kesesuaian antara jadwal Diklat dengan ketersediaan pengajar, ketersediaan ruang kelas dan asrama;
3. Selesaiya pembangunan Gedung Assessment, Gedung Kantor, Asrama VIP dan Gedung Ruang makan/ dapur menjadi solusi keterbatasan sarana;
4. Diharapkan BKD memberikan teguran kepada Intansi yang tidak mengirimkan Peserta Diklat yang telah ditetapkan;
5. OPD diharapkan melakukan proses seleksi internal sebelum mengirimkan peserta Diklat, agar sesuai dengan kompetensi, ketentuan serta kebutuhan;
6. Terkait perubahan peraturan terkait penyelenggaraan Diklat yang bersifat Dinamis baik pada Diklat Pim, Diklat Teknis dan Fungsional akan dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan LAN, BPSDM Kemendagri, serta lembaga terkait.

2.3.10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten; dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemitraan SMK Industri di Provinsi Banten, pada kegiatan Penelitian Sosial, Pemerintah, Ekonomi, Dan Pembangunan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama

dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2017, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2019.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ke 2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai misi ke 5 RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Secara detail, misi ke 2 bermakna Pembangunan Ekonomi Banten melalui peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perikanan, penataan destinasi wisata, pembangunan pusat distribusi provinsi, peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perijinan bagi investor, peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja dan pengawasan dan penempatan ketenagakerjaan.

Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
Angka Kemiskinan	Persen	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
Gini Ratio	Poin	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37

Sumber : RPJMD Banten 2017-2022

Angka-angka target pembangunan ekonomi tersebut sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional dalam kondisi baik.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

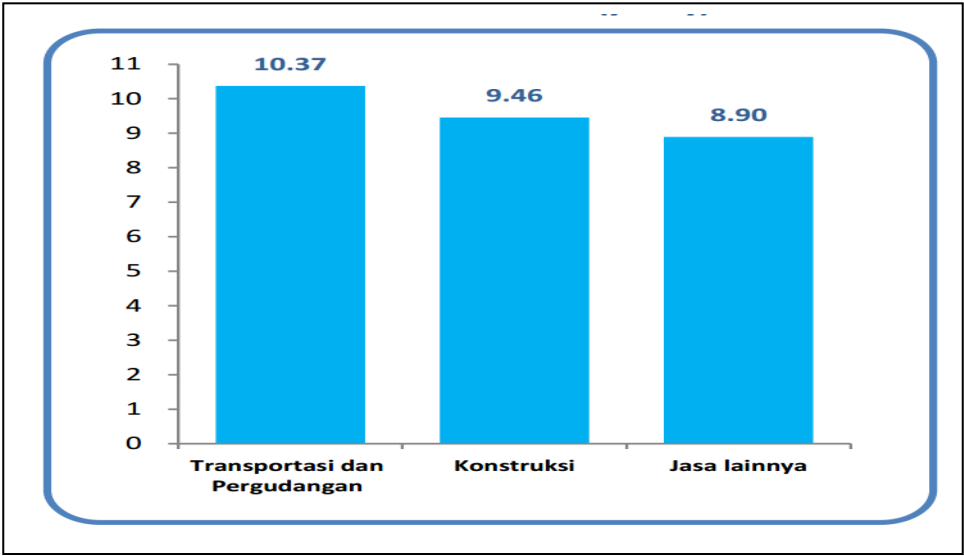
PDRB Provinsi Banten menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor- faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Banten yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan.

a. PDRB menurut Lapangan Usaha

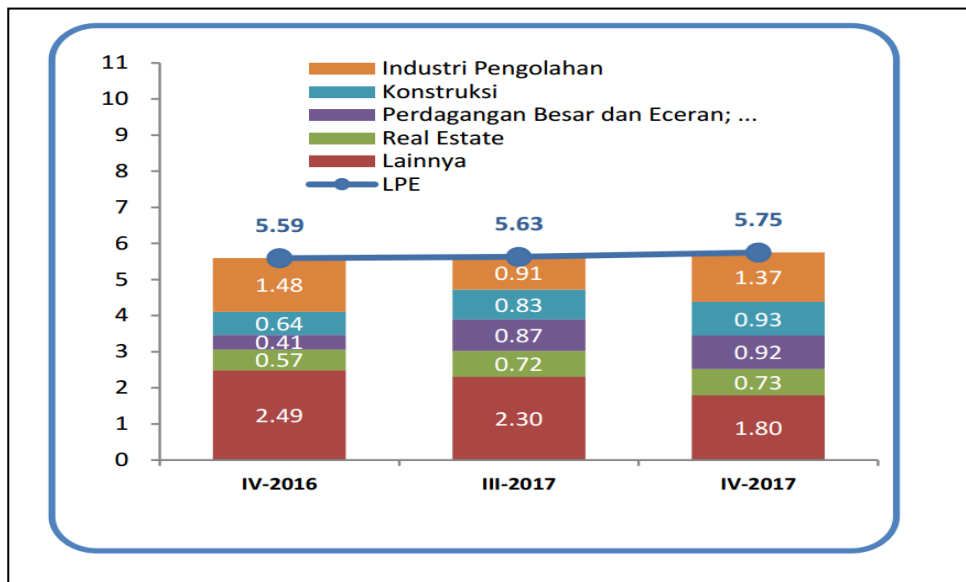
Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 mencapai Rp 146,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,97 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75% Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,37 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,34 persen dan 1,95 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 9,46 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 8,90 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Gambar 3.2
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Struktur PDRB Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan masih mendominasi PDRB Banten.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,93 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,92 persen; Real Estate sebesar 0,73 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,67 persen.

b. PDRB menurut Pengeluaran

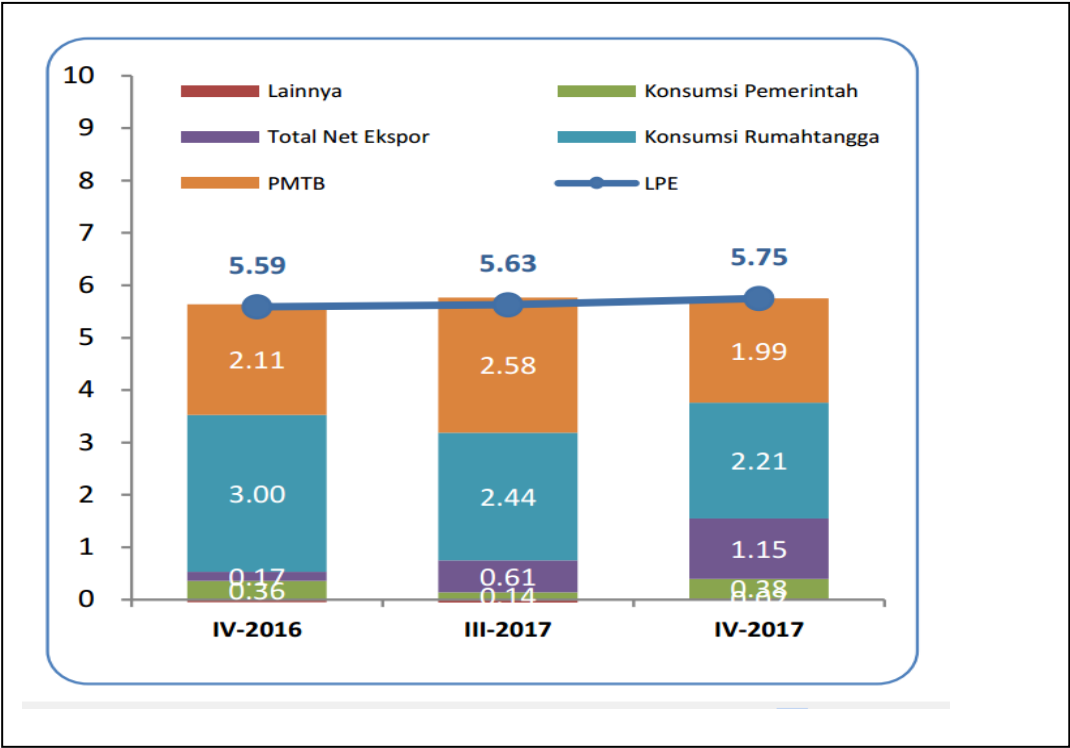
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,71 persen; diikuti komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 6,89 persen; dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,35 persen.

Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 51,14 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berurutan adalah Komponen PMTB sebesar 31,34 persen; Total Net Ekspor sebesar 11,24 persen; dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,77 persen, sedangkan peranan Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) dan Perubahan inventori relatif kecil yaitu kurang dari 1 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 2,21 persen; diikuti Komponen Pengeluaran PMTB sebesar 1,99 persen; dan komponen Total Net Ekspor yang memberikan andil sebesar 1,15 persen.

Gambar 3.3
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Tabel 3.2
Struktur PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 dan 2017 (Persen)

Lapangan Usaha (1)	2016			2017		
	Tri II-2016 (2)	Tri III-2016 (3)	Tri IV-2016 (4)	Tri II-2017 (5)	Tri III-2017 (6)	Tri IV-2017 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07	6,30	5,77	6,04	6,16	4,99
B. Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,78	0,77	0,73	0,73	0,71
C. Industri Pengolahan	32,59	32,36	32,32	32,00	31,44	31,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	2,14	2,16	2,16	2,08	2,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	10,02	10,28	10,75	10,05	10,57	11,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,32	12,13	12,09	12,34	12,32	12,26
H. Transportasi dan Pergudangan	10,46	10,87	10,88	10,80	10,89	11,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,35	2,38	2,42	2,38	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	3,52	3,55	3,55	3,68	3,68	3,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,03	3,06	3,00	2,98	3,04
L. Real Estate	7,18	7,16	7,16	7,45	7,50	7,44
M,N. Jasa Perusahaan	1,04	1,04	1,05	1,08	1,08	1,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	2,03	2,02	2,06	2,03	2,02
P. Jasa Pendidikan	3,28	3,21	3,23	3,34	3,32	3,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,15	1,16	1,17	1,19	1,20
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,56	1,54	1,58	1,61	1,59	1,61
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten
 Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Perkembangan PDRB Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Banten semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB Provinsi Banten ini di sebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB Provinsi Banten adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi Provinsi Banten baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan.

Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB Provinsi Banten. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB Banten seperti *regional spillover* atau pengaruh daerah batas. Perkembangan

daerah perbatasan atau daerah sekitar Banten tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB Banten.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaissance* Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Banten. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat *Renaissance* Provinsi Banten, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Target laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,8-7,0% pada Tahun 2017 sebagai tahun akhir dari RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Sedangkan pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel 3.4. Kota Tangerang dan Kota Cilegon adalah dua daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi terendah. Di Tahun 2016, namun pada tahun 2018 di proyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon Mengalami kenaikan dan tumbuh sebesar 5,96%, untuk Kota Tangerang masih yang terendah hanya tumbuh sebesar 5,38%. Sementara Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 8,51% pada tahun 2018.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2015-2018 (dalam %)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018*
01 Kab. Pandeglang	5.01	5.97	6.01	6.31	6.43
02 Kab. Lebak	6.04	5.93	5.75	6.04	6.16
03 Kab. Tangerang	5.76	5.39	5.17	5.64	5.69
04 Kab. Serang	5.99	5.14	5.04	5.39	5.50
05 Kota Tangerang	5.64	5.58	5.03	5.23	5.38
06 Kota Cilegon	4.93	4.81	4.71	5.42	5.96
07 Kota Serang	7.07	6.43	6.37	7.13	8.20
08 Kota Tangsel	8.50	7.25	7.10	7.81	8.51

Keterangan: angka Tahun 2016*, 2017*, dan 2018* adalah hasil proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Sumber : BPS dan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2015-2016 terjadi perlambatan sebesar 0,14% (5,40 ke 5,26) hal ini disebabkan krisis

ekonomi global sampai saat ini belum selesai di berbagai belahan dunia terutama di Negara-negara Eropa. Krisis tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di seluruh Indonesia. Provinsi Banten dikenal sebagai provinsi industri dimana hampir semua perusahaan besar yang ada pangsa pasarnya adalah Negara-negara Eropa, dikarenakan sampai hari ini kondisi ekonomi Negara-negara tersebut belum menunjukkan perbaikan maka permintaan terhadap produk-produk industri Banten sampai saat ini masih melemah. Kondisi ini dibuktikan selisih ekspor impor dua tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten.

Namun demikian perkembangan ekonomi dunia Tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan Tahun 2016-2017, adapun yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2018 adalah prospek dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Perkembangan ekonomi nasional juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah sebagaimana tercermin pada percepatan belanja modal awal Tahun 2017.

Investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan dukungan dari pemerintah. Rating investasi Indonesia juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup stabil ditengah ketidakpastian eksternal, disertai dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh terbatas seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih moderat. Namun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2018 diperkirakan tumbuh dikisaran 5,85%.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Banten akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini lebih banyak fokus kepada industri manufaktur dan jasa, sektor industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri kecil dan menengah. Kedua sektor andalan Provinsi Banten tersebut (UMKM-K dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di Provinsi Banten yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkan maka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi masyarakat juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi publik maupun swasta; kedua, tren positif kondisi perekonomian Banten ini akan semakin menarik investor untuk berinvestasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Provinsi Banten Tahun 2013- 2017

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (milyar rupiah)	Proyek	Investasi (US\$. Juta)
2013	100	4.008,66	592	3.720,2
2014	100	8,081.3	709	2,034.6
2015	367	10,709.9	1.737	2,542.0
2016	496	12,426.3	2.161	2,912.1
2017	699	15.141,9	2.479	3,047.5

Sumber: BKPM RI Tahun 2017

Pada tahun 2017, untuk PMDN Banten masuk peringkat lima setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi investasi mencapai Rp 15.141,9 triliun, dibanding capaian tahun 2016 sebesar Rp 12.426,3 triliun. Ada pun periode januari – desember 2017 menjadi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 3.047,5 triliun dibanding capaian 2016 sebesar Rp 2.912,1 triliun.

3.1.2 Inflasi

a. Inflasi Menurut Pengeluaran

Memasuki bulan Januari tahun 2018, harga barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK)

dari 138,47 pada bulan Desember menjadi 138,77 pada bulan Januari atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,22 persen.

Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,26 persen; kelompok sandang naik sebesar 0,24 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,16 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang naik sebesar 0,11 persen serta kelompok kesehatan naik sebesar 0,10 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan turun sebesar 0,97 persen;

Tabel 3.5

IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2017	IHK Desember 2017	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Laju Inflasi Tahun 2018 **)	Inflasi "Year on Year" ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U M U M	134,13	138,47	138,77	0,22	0,22	3,47
1. Bahan Makanan	147,89	148,93	150,81	1,26	1,26	1,98
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	146,76	153,88	154,06	0,11	0,11	4,97
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	125,12	130,14	130,35	0,16	0,16	4,18
4. Sandang	111,97	114,64	114,91	0,24	0,24	2,63
5. Kesehatan	131,31	135,57	135,71	0,10	0,10	3,35
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	127,73	136,08	136,38	0,22	0,22	6,77
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	128,14	130,96	129,69	-0,97	-0,97	1,21

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

b. Perkembangan Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon Bulan Januari 2018

Pada bulan Januari 2018, perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) di tiga kota IHK di Banten adalah sebagai berikut : Kota Serang 0,91 persen, Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen. Laju

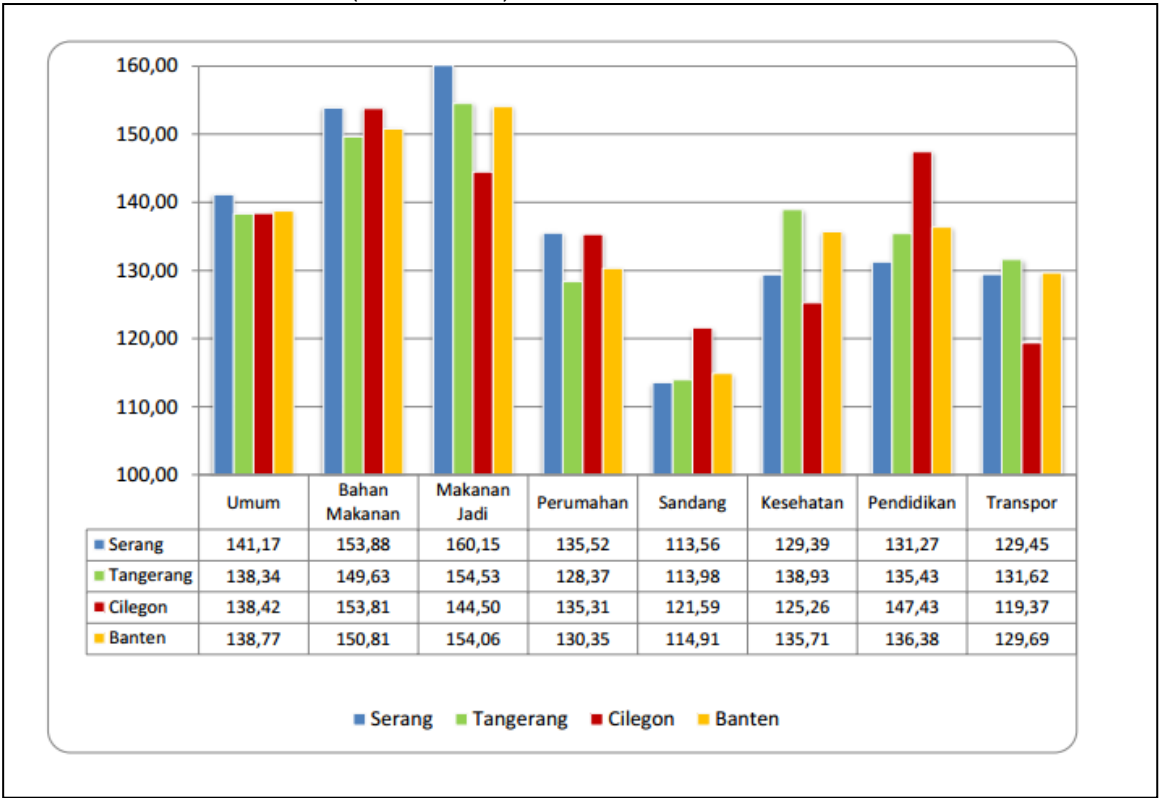
inflasi tahun kalendernya adalah Kota Serang 0,91 persen; Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen.

Tabel 3.6
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	Serang			Tangerang			Cilegon		
	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
U M U M	141,17	0,91	0,91	138,34	0,04	0,04	138,42	0,41	0,41
1. Bahan Makanan	153,88	2,56	2,56	149,63	0,96	0,96	153,81	1,40	1,40
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	160,15	0,54	0,54	154,53	0,03	0,03	144,50	0,04	0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	135,52	1,03	1,03	128,37	0,02	0,02	135,31	-0,09	-0,09
4. Sandang	113,56	0,34	0,34	113,98	0,28	0,28	121,59	-0,12	-0,12
5. Kesehatan	129,39	0,19	0,19	138,93	0,04	0,04	125,26	0,36	0,36
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	131,27	-0,02	-0,02	135,43	0,32	0,32	147,43	-0,01	-0,01
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	129,45	-0,15	-0,15	131,62	-1,33	-1,33	119,37	0,28	0,28

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Gambar 3.4
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten
(2012=100) Bulan Januari 2018



Sumber: BPS Provinsi Banten
 Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Tabel 3.7
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten
Tahun 2017-2018 (%)

Indikator	2016	2017 (Angka Proyeksi)*			2018 (Angka Proyeksi)*		
		Optimis	Moderat	Pesimis	Optimis	Moderat	Pesimis
Inflasi (Persen)	2.77	3.00	4.00	5.00	2.94	4.50	5.50

Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten
 Sumber: No. 06/02/36/Th.XI, 1 Februari 2017

3.1.3 ICOR

3.1.3.1 Nilai ICOR Total

Pertumbuhan ekonomi Banten selama periode Tahun 2014-2017 rata-rata sebesar 5,42 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 5,51 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 5,26 persen. Sedangkan nilai PDRB Banten (adh Berlaku) selama periode Tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan

signifikan dari 428.740,06 milyar rupiah menjadi 563.820,35 milyar rupiah.

Adapun pengeluaran untuk kapital (PMTB) selama periode tahun 2014-2016 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 32-34 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 92.388,650 milyar rupiah. Data pada tabel 3.8 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014-2018 dengan proyeksi tahun 2018 cenderung meningkat dari 2,91 persen (2014) menjadi 5,16 persen (2016).

Tabel 3.8
Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Banten, 2014—2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)*	2018 (Angka Proyeksi)*
1. PMTB adhb	124,100,207	139,910,911	152,042,587	168,062,707	188,102,025
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	81,902,666	92,729,170	102,534,116		
a. 2.Persentase	66.00	66.28	67.44		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	42,197,541	47,181,741	49,508,471		
b. 2.Persentase	34.00	33.72	32.56		
2. PMTB adhk 2010	103,115,307	108,982,067	114,601,617	120,629,119	127,290,865
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	69,848,849	74,592,481	79,620,457		
a. 2.Persentase	67.74	68.44	69.48		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	33,266,458	34,389,587	34,981,160		
b. 2.Persentase	32.26	31.56	30.52		
3. Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen)	2.91	5.69	5.16	5.26	5.52
a. Bangunan	4.31	6.79	6.74		
b. Non Bangunan	0.10	3.38	1.72		

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi*

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2014 – 2016. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada Tahun 2014 sebesar 4,31 persen. Keadaan ini meningkat di Tahun 2016 yaitu menjadi 6,74 persen, meskipun pada Tahun 2015 sempat pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen. Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada Tahun 2014 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 0,10 persen. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat menjadi sebesar 3,38 persen (2015), sedangkan pada Tahun 2016 menurun sebesar 1,72 persen.

Secara umum, selama kurun waktu Tahun 2014-2016 pertumbuhan PMTB terus mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai besaran 5,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2014 yaitu hanya sebesar 2,91 persen, dengan proyeksi tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,26%.

3.1.3.2 Nilai ICOR Sektoral

Sebagaimana diketahui koefisien ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Dalam pembahasan ini tambahan kapital (investasi) baru adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan output. Karena unit PMTB bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Tabel 3.9 menunjukkan besaran koefisien ICOR akumulasi periode 2010-2014 di Provinsi Banten menurut kategori industri. Kategori yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan koefisien ICOR hanya 0,87. Artinya setiap penambahan Rp.1 milyar output hanya memerlukan PMTB sebesar 870 juta rupiah. Hal

ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat efisien, karena untuk meningkatkan ouputnya memerlukan investasi fisik (PMTB) yang lebih sedikit. Berikutnya kategori dengan koefisien ICOR kurang dari 2 adalah kategori Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan (1.17), Jasa keuangan (1.53), dan Kategori Konstruksi (1,84). Kategori industri dengan koefisien ICOR antara 2 dan 3 berikutnya adalah kategori Real Estate (2,18), Jasa Lainnya (2.73), serta Kategori Jasa Perusahaan (2,78).

Dalam hal ini dapat dilihat juga rata ICOR secara keseluruhan periode 2011-2015, 2012-2016 dan persentase proyeksi 2013-2017.

Tabel 3.9
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2014
di Provinsi Banten Menurut Kategori

ICOR lag 5 Tahun Menurut Katagori		2010-2014
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,87
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,20
3.	Industri Pengolahan	7,06
4.	Pengadaan Listrik, Gas	8,74
5.	Pengadaaan Air	6,80
6.	Konstruksi	1,84
7.	Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Kendaraan	1,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66
10.	Informasi dan Komunikasi	5,01
11.	Jasa Keuangan	1,53
12.	Real Estate	2,18
13.	Jasa perusahaan	2,78
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,18
15.	Jasa Pendidikan	3,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,69
17.	jasa Lainnya	2,73
Total		4,55

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kategori industri yang lainnya mempunyai koefisien ICOR lebih besar dari 3. Dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi/PMTB pada kategori industri tersebut kurang efisien jika dibandingkan dengan kategori industri yang tersebut di atas. Kategori industri Transportasi dan Pergudangan, serta Kategori Administrasi Pemerintahan Umum dan Jaminan Sosial wajib mempunyai koefisien ICOR yang besar yaitu 10,58 dan 13,18. Artinya PMTB pada kedua sektor tersebut tidak efisien. Khusus untuk Kategori Administrasi Pemerintah ketidakefisienan investasi pada kategori ini menyangkut investasi besar pada sektor layanan dan fasilitas umum

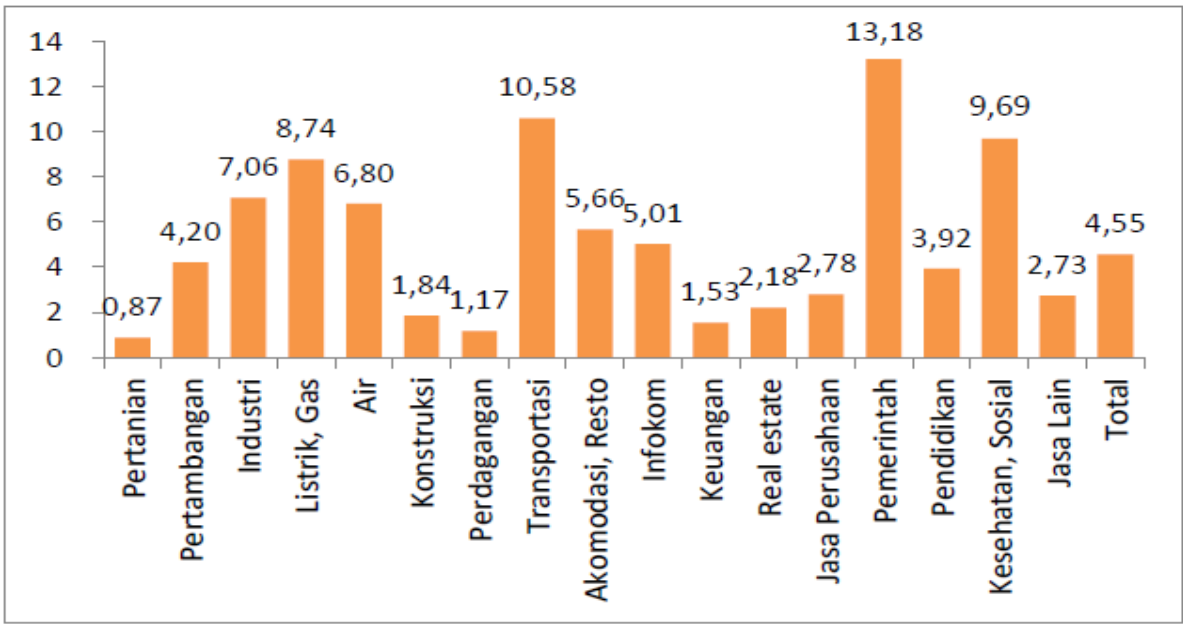
dimana nilai outputnya dijual dibawah harga pasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta konstruksi publik lainnya.

Tabel 3.10
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2017
di Provinsi Banten Menurut Kategori

Indikator	2010-2014	2011-2015	2012-2016	Angka Proyeksi 2013-2017	Angka Proyeksi 2014-2018
ICOR Tahunan	4.97	5.14	5.39	5.56	5.65

Sumber : Bappeda Provinsi Banten proyeksi

Gambar 3.5
Grafik Nilai ICOR Akumulasi 2010-2014 Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Perkembangan ICOR lag 0 dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 di Provinsi Banten. Koefisien ICOR yang terbentuk mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, dimana penurunan ICOR terjadi pada Tahun 2011 dari 4,88 menjadi 4,65, serta Tahun 2013 dari 4,87 menjadi 4,53. Sementara kenaikan tertinggi koefisien ICOR terjadi pada Tahun 2014 dari 4,53 tahun sebelumnya menjadi 5,69, Hal ini kemungkinan terjadi karena situasi ekonomi global yang mempengaruhi proses produksi domestik ditambah situasi politik dalam negeri yang sedang melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tabel 3.12
Nilai Koefisien ICOR Lag 0 Menurut Kategori
Provinsi Banten Tahun 2010-2014

ICOR lag 0 Menurut Katagori		2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	1,18	1,09	0,80	1,82	1,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,59	0,37	(27,31)	(0,57)	0,24	2,73
3.	Industri Penolahan	9,08	6,49	8,16	3,79	123,72	6,88
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1,08	43,78	8,80	(29,29)	10,57	6,82
5.	Pengadaaan Air	5,92	2,90	36,64	9,33	7,39	12,44
6.	Konstruksi	3,61	2,42	2,06	1,71	1,29	2,22
7.	Perdagangan Besar, Eceram, dan Reparasi Kendaraan	1,34	0,83	1,07	1,78	1,72	1,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,91	9,37	7,72	17,70	14,41	12,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,72	5,60	9,63	10,25	4,45	7,13
10.	Informasi dan Komunikasi	5,07	7,45	5,24	8,91	4,20	6,17
11.	Jasa Keuangan	2,54	1,22	1,29	1,52	1,52	1,62
12.	Real Estate	1,78	2,55	2,69	3,10	2,13	2,45
13.	Jasa perusahaan	3,27	3,11	3,40	4,13	2,04	3,19
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,82	25,33	16,59	92,11	7,10	31,39
15.	Jasa Pendidikan	3,43	4,71	5,21	7,53	4,72	5,12
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,39	11,07	5,52	31,02	11,25	15,45
17.	jasa Lainnya	3,22	3,80	4,13	3,91	1,59	3,93
Total		4,88	4,65	4,87	4,53	5,69	4,92

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Pada ICOR log 0, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kategori industri yang memiliki efisiensi investasi yang paling efisien dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 1,06, disusul kemudian oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Kendaraan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,35, serta kategori Jasa Keuangan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,62. Sementara kategori dengan rata-rata ICOR besar, terdapat pada kategori Administrasi Pemerintahan Umum (31,39), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (15,45), serta kategori Pengadaan Air Bersih (12,44).

Tabel 3.13
Nilai Koefisien ICOR

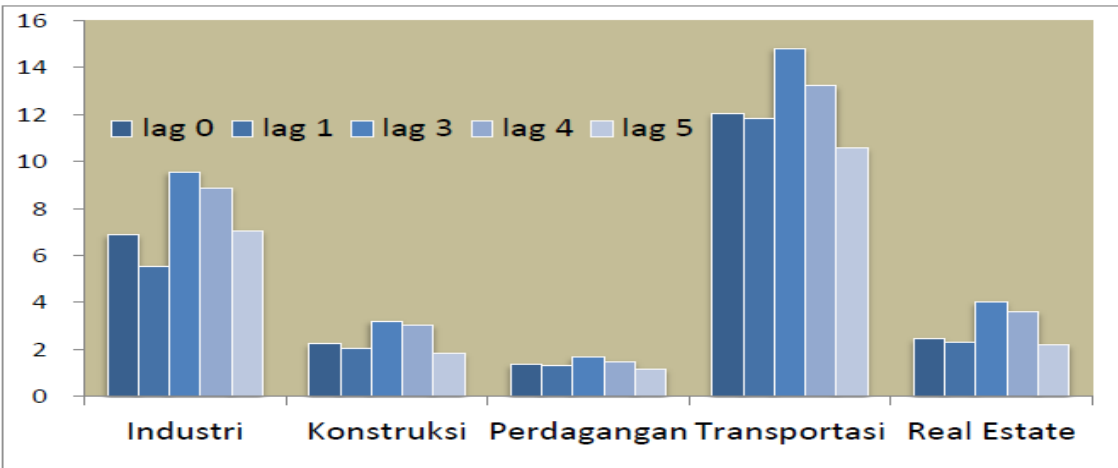
Provinsi Banten Tahun Proyeksi Tahun 2015 – 2018

Indikator	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)	2018 (Angka Proyeksi)
ICOR Tahunan	5.78	5.91	5.66	5.32

Perekonomian Banten selama periode Tahun 2010-2014 didominasi oleh aktifitas kategori manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan real estate hingga sebesar 71 persen dari total PDRB Banten. Dari kelima kategori industri utama tersebut kategori Perdagangan Besar Eceran, dan Reparasi Kendaraan serta merupakan kategori paling efisiensi dalam investasi dibandingkan kategori utama lainnya pada berbagai lag ICOR yang diamati. Sedangkan kategori industri manufaktur atau industri pengolahan sebagai kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Banten ternyata kurang efisien dilihat dari koefisien ICOR baik di lag 0, lag 3, maupun lag 5.

Namun demikian perkembangan ICOR setiap tahunnya akan mengalami peningkatan pada tahu 2014 sampai dengan tahun 2016, namun proyeksi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,66% dan proyeksi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,32%.

Gambar 3.6
 Grafik Perbandingan ICOR Kategori Utama Menurut Lag



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kecenderungannya semakin panjang lag, semakin efisien investasi yg dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Banten mulai melambat dari 7,03 persen di Tahun 2011 menjadi 6,83 persen, padahal arus investasi masih tinggi di Tahun 2012-2013 terutama investasi pada industri padat modal seperti industri logam dasar, dan barang dari logam. Akibatnya nilai koefisien ICOR naik pada lag 3 dan turun kembali pada lag 4 dan lag 5.

Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya;

Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di Provinsi Banten maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat Provinsi Banten.

3.1.4 Ketenagakerjaan

Pada periode Agustus 2016 - Agustus 2017 jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,59 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 5,60 juta orang pada Agustus 2017. Namun sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran sebesar 21 ribu pada periode tersebut. Jumlah penduduk bekerja justru mengalami penurunan dari 5,09 juta orang menjadi 5,08 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 63,66 persen menjadi 62,32 persen. Menurunnya TPAK ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja.

Tabel 3.14
 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Februari 2016-Agustus 2017

	Jenis Kegiatan Utama	2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1.	Penduduk 15+ (000)	8.673	8.775	8.879	8.981
2.	Angkatan Kerja	5.686	5.587	5.969	5.597
	Bekerja (000)	5.234	5.088	5.507	5.077
	Penganggur(000)	452	499	462	520
3.	Bukan Angkatan Kerja (000)	2.987	3.188	2.909	3.384
	Sekolah	875	722	731	852

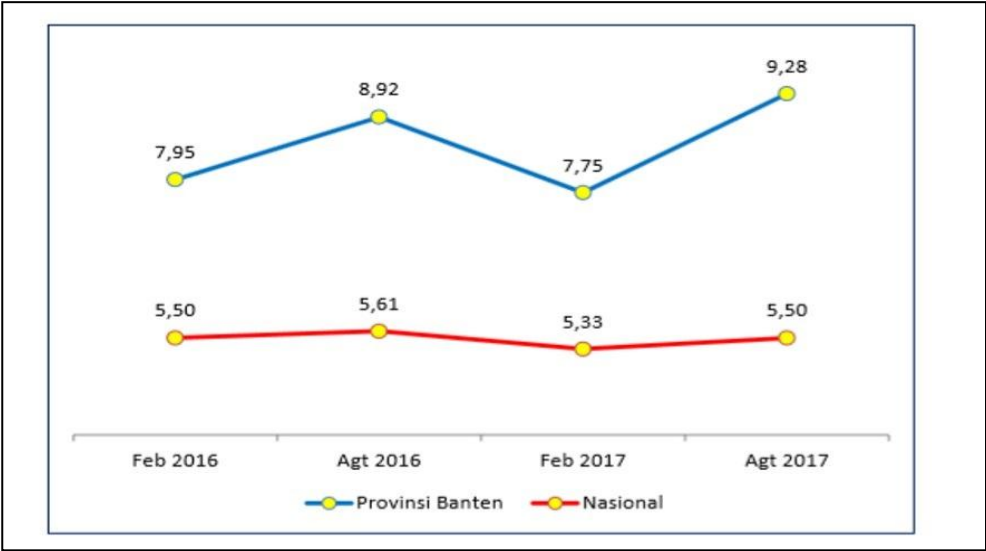
	Mengurus Rumah Tangga	1.748	2.066	1.845	2.133
	Lainnya	363	399	333	399
4.	TPAK (%)	65,56	63,66	67,23	62,32
5.	TPT (%)	7,95	8,92	7,75	9,28
6.	Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran	1.089	936	1.086	864
	Setengah penganggur/ST Terpaksa	407	398	317	249
	Paruh Waktu/SP Sukarela	681	537	769	615

Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2017, setengah pengangguran berjumlah 864 ribu atau 17,02 persen dari penduduk bekerja. Sedikit menurun dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 936 ribu (18,40 persen).

Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu tahun dari 398 ribu pekerja menjadi 249 ribu pekerja.

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari 2016- Agustus 2017 (persen)



Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Secara relatif angka pengangguran menunjukkan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Kondisi terbaru angka pengangguran di Banten mengalami penurunan yang signifikan menjadi 7,77 persen pada Februari 2018 dibandingkan pada bulan Agustus 2017 yang mencapai 9,28 persen.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2016, setengah pengangguran berjumlah 936 ribu atau 18,39 persen dari penduduk bekerja. Menurun dibanding Februari 2016 yang sebanyak 1.089 ribu (20,81 persen). Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan naiknya produktivitas. Dari dua jenis setengah pengangguran, Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu semester dari 407 ribu pekerja menjadi 398 ribu pekerja.

Dilihat dari sisi komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten umumnya berpendidikan menengah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dari 7,86 persen menjadi 8,03 persen dari total penduduk bekerja. Begitu juga, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 41,28 persen menjadi 48,17 persen.

Sebaliknya pencari kerja pendidikan rendah mengalami penurunan (SMP ke bawah) dari 50,85 persen menjadi 43,80 persen.

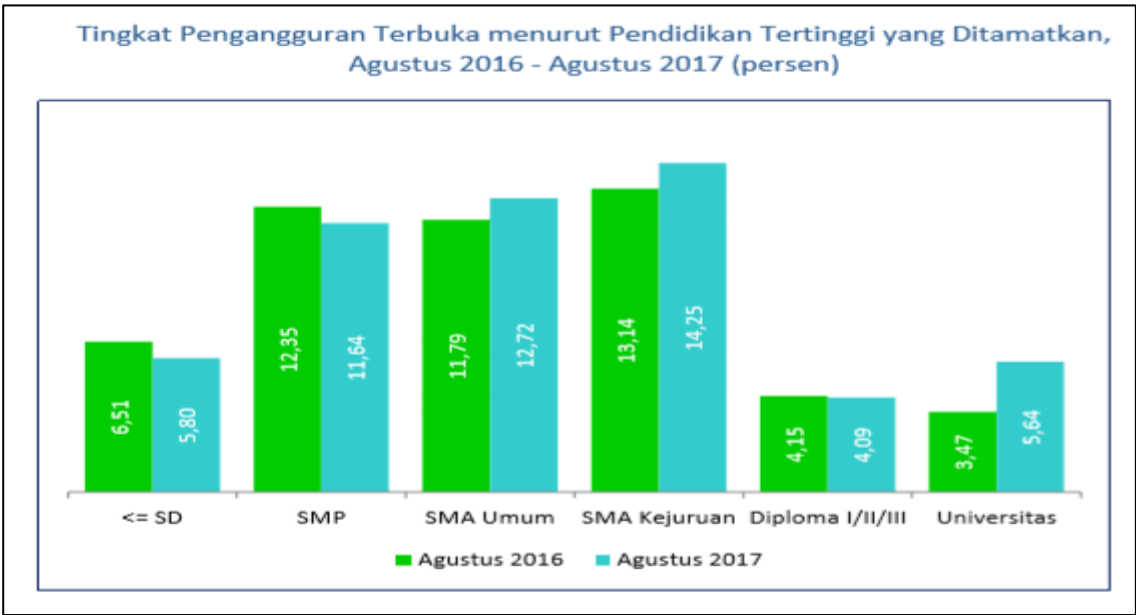
Tabel 3.15

Komposisi Penduduk Bekerja dan Pengangguran menurut Pendidikan di Provinsi Banten, Februari 2016- Agustus 2017 (persen)								
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja				Pengangguran			
	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SD Ke bawah	34,73	34,45	36,43	36,12	32,19	24,48	23,04	21,72
SMP	15,85	16,73	16,85	17,15	18,66	24,07	18,28	22,08
SMA	20,46	18,57	16,91	19,60	17,64	25,34	23,16	27,91
SMK	13,03	12,53	12,90	12,47	23,64	19,34	23,63	20,26
Diploma I/II/III	3,75	3,65	4,67	3,16	2,00	1,61	4,10	1,32
Universitas	12,18	14,07	12,24	11,50	5,86	5,16	7,80	6,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BRS No. 66/ 11/36/Th.XI, 6 November 2017

Dilihat dari lulusan jenjang pendidikan, lulusan SMK paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,25 persen). Angka ini lebih banyak dari lulusan SMU yang 12,72 persen. Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 4,09 persen lulusan Diploma dan 5,64 persen lulusan Sarjana yang menganggur. Pada lulusan pendidikan rendah (SD ke bawah) juga banyak terserap di lapangan kerja tetapi mereka biasanya adalah pekerja informal dan bukan new entry.

Gambar 3.8



Sumber : BRS No. 66/ 11/36/Th.XI, 6 November 2017

3.1.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017 sebesar 5,45 persen. Angka ini berarti terjadi kenaikan 0,09 poin dibanding semester sebelumnya yang 5,36 persen.

Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada Maret 2017.

Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017.

Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September 2016 menjadi 391,03 ribu orang pada Maret 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang (dari 277,58 ribu orang pada September 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2017 mencapai 5,45 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,09 poin setelah rilis semester sebelumnya menunjukkan angka 5,36 persen. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017.

Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama terjadi penambahan sebesar 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada bulan Maret 2017.

Tabel 3.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2016-Maret 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2016	380,16	4,49
Maret 2017	391,03	4,52
<u>Perdesaan</u>		
September 2016	277,58	7,32
Maret 2017	284,00	7,61
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
September 2016	657,74	5,36
Maret 2017	675,04	5,45

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Faktor-faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Banten periode September 2016-Maret 2017 diantaranya adalah:

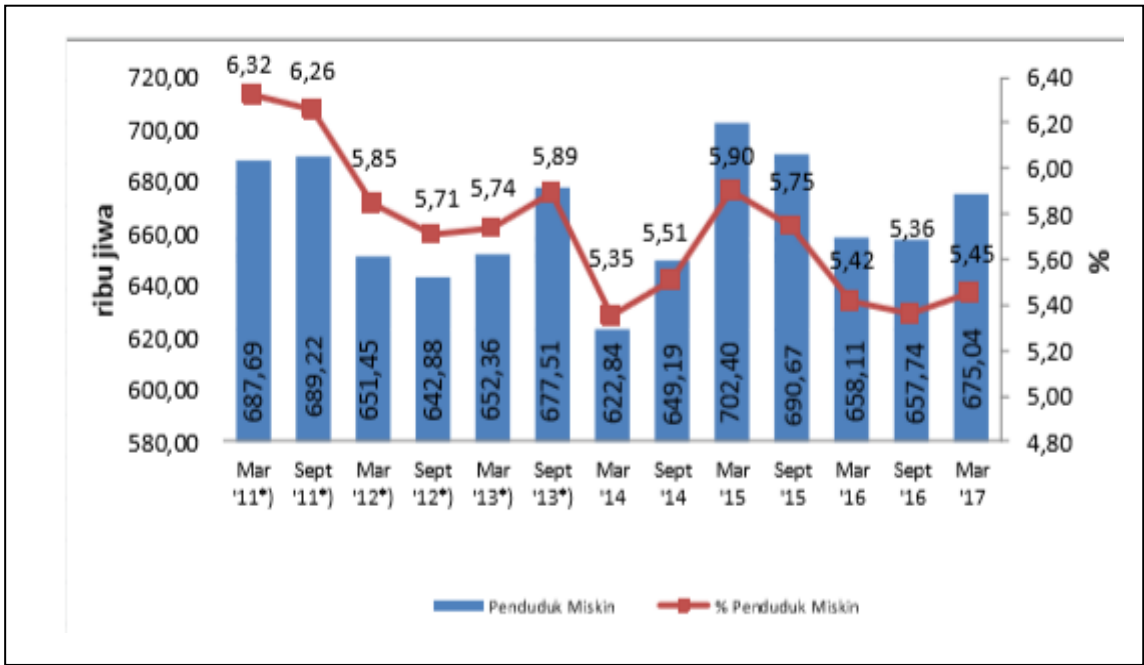
1. Inflasi umum September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, pada periode Maret 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September 2016 mencapai 100,47.

Selang periode Maret 2011 sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup fluktuatif. Pada September 2013, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 677,51 ribu orang pada September 2013 menjadi 622,84 ribu orang.

Penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2014 bertambah 4,23 persen dibanding periode sebelumnya. Periode Maret 2015 jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan sebesar 53,21 ribu orang. Pada periode-periode selanjutnya, penduduk miskin di Banten terus mengalami penurunan, hingga pada September 2016 persentase penduduk miskin mencapai 5,36 persen atau berkurang sebanyak 370

orang. Keadaan kemiskinan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Banten kembali meningkat sebanyak 17,3 ribu orang dari periode sebelumnya menjadi 675,04 ribu orang.

Gambar 3.9
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2011-2017



Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3.5 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada periode September 2016-Maret 2017.

Selama periode September 2016-Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,59 persen, yaitu dari Rp 373.365,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 386.753,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2017 adalah sebesar 70,47 persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2016 yang sebesar 70,29 persen.

Tabel 3.17
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah
September 2016-Maret 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
September 2016	261.285	121.618	382.903
Maret 2017	271.751	124.857	396.608
Perubahan (%)	4,01	2,66	3,58
<u>Perdesaan</u>			
September 2016	264.755	86.952	351.708
Maret 2017	274.157	89.431	363.588
Perubahan (%)	3,55	2,85	3,38
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
September 2016	262.442	110.923	373.365
Maret 2017	272.552	114.201	386.753
Perubahan (%)	3,85	2,96	3,59

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016-Maret 2017

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2019

NO	URAIAN	APBD TA 2018	RKPD TAHUN 2019	+ / (-)
a	B	C	d	e = d - c
4	PENDAPATAN DAERAH	10.365.616.979.717	10.844.595.570.400	478.978.590.683
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.183.868.751.717	6.680.710.148.400	496.841.396.683
4.1.1	Pajak Daerah	5.836.683.600.000	6.303.618.288.000	466.934.688.000
4.1.2	Retribusi Daerah	20.177.648.520	21.791.860.401,60	1.614.211.882
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54.644.492.380	55.300.000.000	655.507.620
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	272.363.010.817	300.000.000.000	27.636.989.183
4.2	Dana Perimbangan	4.176.078.228.000	4.157.815.422.000	(18.262.806.000)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000	707.384.582.000	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000	1.072.903.468.000	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000	2.377.527.372.000	(18.262.806.000)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.670.000.000	6.070.000.000	400.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.670.000.000	6.070.000.000	400.000.000
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
4.3.3	Tambahan penghasilan Guru PNSD	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	11.362.380.964.717	11.598.960.292.700	236.579.327.983
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.704.423.824.437	7.486.630.709.400	782.206.884.963
5.1.1	Belanja Pegawai	1.757.664.017.909	2.301.876.000.000	
5.1.2	Belanja Hibah	2.153.751.721.820	2.128.212.850.000	(25.538.871.820)
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	67.790.400.000	54.479.000.000	(13.311.400.000)
5.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.213.484.881.366	2.621.269.383.000	407.784.501.634
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	460.506.831.000	325.793.476.400	(134.713.354.600)
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	51.225.972.342	55.000.000.000	3.774.027.658
5.2	Belanja Langsung	4.657.957.140.280	4.112.329.583.300	241.645.459.720

NO	URAIAN	APBD TA 2018	RKPD TAHUN 2019	+ / (-)
5.2.1	Belanja Pegawai	273.413.783.100		(273.413.783.100)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.195.894.937.116		(2.195.894.937.116)
5.2.3	Belanja Modal	2.188.648.420.064		(2.188.648.420.064)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(996.763.985.000)	(754.364.722.300)	
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000	754.364.722.300	(242.399.262.700)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000	804.364.722.300	(192.399.262.700)
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000	804.364.722.300	(192.399.262.700)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	-	300.000.000.000	300.000.000.000
	PT AGRO BISNIS		25.000.000.000	25.000.000.000
	PT BGD		25.000.000.000	25.000.000.000
7	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	-	-	-

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pendataan potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, penyesuaian pajak progresif, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah, mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu di

kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain-lain.

Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp10.844.595.570.400,00. Rincian Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.680.710.148.400,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp6.303.618.288.000,00 yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp21.791.860.400,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp55.300.000.000,00 yang terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp300.000.000.000,00 yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, BULD dan Lain-lain.
2. Dana Perimbangan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4.157.815.422.000,00 terdiri atas :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp707.384.582.000,00. Merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil

Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp1.072.903.468.000,00. Merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp2.377.527.372.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.070.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Banten diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 73,82%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dan dijadikan andalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan, razia pajak daerah, dan penagihan pajak langsung pada masyarakat wajib pajak;
- 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru;
 - 7) Peningkatan kompetensi aparaturnya pemungut pajak daerah;
 - 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
 - 10) Melihat kecenderungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang statis, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018, yang telah dirintis sejak Tahun 2015 adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta Unit-unit Pelayanan Teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dimana pendapatan BLUD memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan retribusi daerah.
- b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK baik itu DAK fisik dan Non Fisik. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp11.598.960.292.700,00 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Struktur belanja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak langsung pada Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp7.486.630.709.400,00. Penganggaran Belanja Tidak langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.301.876.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Perlu juga diinformasikan bahwa besarnya belanja hibah pada pemerintah provinsi banten lebih didominasi oleh Belanja Hibah Dana BOS untuk Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. Belanja Hibah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.128.212.850.000,00;

- 3) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 direncanakan sebesar Rp54.479.000.000,00;
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.621.269.383.000,00 Penganggarannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan ditampung dalam P-APBD Tahun 2019;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Kabupaten/ Kota di fokuskan untuk membiayai urusan wajib

pelayanan dasar. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.325.793.476.400,00;

- 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Belanja Tidak Terduga tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,00.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.4.112.329.583.300,00 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Berdasarkan jenis belanja, Belanja Langsung diklasifikasikan kedalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan fungsi output (outcome);

4) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit ataupun surplus anggaran. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan struktur anggaran dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Pada Tahun 2019 struktur anggaran diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp.754.364.722.300,00. Pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00, untuk penyertaan modal (investasi) PT Agro Bisnis sebesar Rp25.000.000.000,00 dan PT BGD sebesar Rp25.000.000.000,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian RPJMD Tahun 2012-2017, identifikasi isu strategis yang berkembang serta permasalahan-permasalahan mendesak tingkat Nasional dan Regional, kerangka ekonomi daerah, dan kerangka pendanaan tahun 2019. Selanjutnya Penyusunan RKPD tahun 2019 juga memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Banten sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Daerah akan didukung dengan pelaksanaan program sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pembangunan yang

digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni:

- 1) norma pembangunan;
- 2) tiga dimensi pembangunan;
- 3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta
- 4) program-program *quick wins*.

Dimensi dan kondisi pembangunan perlu strategi pembangunan untuk memuat sektor- sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Selain dijabarkan dalam strategi pembangunan, untuk mencapai Nawacita ditetapkan Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah:

1. Pembangunan Ekonomi dengan indikator: Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran
2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator: Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan
3. Kebutuhan Energi dengan Indikator: Produksi Minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Pembangunan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
4. Ketahanan Air dengan indikator: Terselesaikannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator: Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator: Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api, *Dwelling Time* Pelabuhan, *On-time Performance* Penerbangan, Kab/Kota yang dijangkau broadband

7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
8. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
9. Penegakan Hukum dengan indikator: Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5), Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100%
10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator: Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator: Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun, Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminankesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility

Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all methods*)

14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
15. Kesehatan dengan indikator: Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan langkah mewujudkan visi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dengan tujuan dan sasaran :

- a. Misi 1 (satu) yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- b. Misi 2 (dua) adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- c. Misi 3 (tiga) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan

- d. Misi 4 (empat) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

4.1.3 Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Provinsi Banten

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 yang tertuang didalam RKP Tahun 2019 diterjemahkan kedalam sasaran pokok pembangunan, yang dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Makro, meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga

kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);

5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;
6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2019 di Provinsi Banten menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Provinsi Banten memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional. Sasaran pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMD Tahun 2017-2022. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran
Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
Sasaran makro	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,06
	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	30
		Angka Kematian Ibu (AKI)	300
	Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten	Harapan lama sekolah	13,5
	Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit	Rata rata lama sekolah	8,7
	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah		
	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,06
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten	LPE Sektor Perdagangan	5,4
		Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis	4
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industridan Pembangunan Industri di Provinsi Banten	LPE Sektor Perindustrian	3,95
	Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	3,89
		Index Gini	0,39
Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,95
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,34
	Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	35
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatkan Cabang	Indeks Pembangunan Kepemudaan	20

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
	Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan kejuaraan tingkat nasional		
		Indeks Pembangunan Olahraga	20
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	85
	Meningkatkan koleksi Museum	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	100
Sasaran pembangunan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan	Rasio elektrifikasi	98
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90,6
	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	13
	Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	88,22
	Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Nilai Investasi	60,80 trilyun
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	1
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44.67
	Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,80
	Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	6
	Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan)	Pertumbuhan Sektor Pertanian	5,6
Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah	Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	20
	Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten	Tingkat Kemantapan Jalan	89
	Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten		

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi	Pemenuhan tingkat layanan irigasi	16722
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	26,27
	Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis dalam Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	85
	Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten	cakupan pelayanan pengelolaan sampah	20
	Meningkatnya Penataan Perumahan, Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Luasan Kawasan Kumuh	203,2
		Persentase Rumah Layak Huni	85,18
Sasaran politik, hukum dan pertahanan keamanan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	60,62
	eningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,2
		Capaian LAKIP Provinsi Banten	BB
		Index Gini	0,39
	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan profil penduduk	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	80
	Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3.00

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
		Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	75
	Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	61,83
	Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID dengan pelayanan berbasis teknologi informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	89
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	15
	Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	15
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	133
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	74
		Angka Kriminalitas	4.500
	Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,91

Didalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi pusat dan daerah, pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Banten dan secara teknis operasional menjadi sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten.

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu.

Agenda pembangunan nasional tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tema Pembangunan Nasional tahun 2019 yaitu :

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Sesuai sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Prioritas nasional tahun 2019 terbagi menjadi 5 prioritas nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan;

- 1) Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) Memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) Memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) Memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- 1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) Mencegah dan pengendalian penyakit;
 - 4) Mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) Meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
- c. Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- 1) Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) Menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
- 1) Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) Menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
- e. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar.
- 1) Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) Mempercepat pencapaian SPM di daerah.
2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan konektivitas;

- 1) Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. Mengembangkan Telekomunikasi dan Informatika;
- 1) Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. Mengembangkan pusat kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa;
- 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. Melaksanakan Pembangunan Daerah Afirmasi;
- 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
- e. Pembangunan Konektivitas untuk mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu Hilir Perikanan.
- 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;

- g. Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
 - i. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
- c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
- d. Peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan

- e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi energi primer;
- b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. meningkatkan aksesibilitas air;
- d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m.meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Energi;

Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.

b. Pemenuhan kebutuhan Pangan

Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat

c. Pemantapan ketahanan Sumber Daya Air

1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan

2) suplai air minum.

d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

e. Perencanaan pembangunan rendah karbon.

Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan KAMTIBMAS dan Keamanan SIBER;

1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;

2) menyelesaikan konflik sosial;

3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba;

4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan

5) meningkatkan penanganan terorisme.

b. Menjamin Kesuksesan Pemilu

1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;

2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;

3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan

4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.

c. Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional;

1) mengamankan wilayah yuridiksi nasional;

- 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara;
dan
- 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
- d. Meningkatkan Kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi;
 - 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
 - 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
 - 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
 - 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
- e. Efektivitas Diplomasi
 - 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
 - 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
 - 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
 - 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

Proyek STRategis Nasional di Provinsi Banten:

- 1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
 - a. Jalan Tol Serang-Panimbang (83,6 KM)
 - b. Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2 KM)
 - c. Jalan Tol Serpong-Cinere (10,1 KM)
 - d. Jalan Tol Serpong-Balaraja (30 KM)
- 2. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota
 - a. Kereta API EKspres SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman)
- 3. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah
 - a. Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang)
- 4. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi
 - a. Bendungan Sindang Heula
 - b. Bendungan Karian
- 5. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
 - b. Kawasan Industri Wilmar Serang

6. Pariwisata

- a. Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih (Tanjung Lesung)

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu:

- 1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
- 3. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
- 4. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha.

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten
Tahun 2019

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan	a) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan b) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah	a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat b) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampung dan Penyediaan Air Baku f) Pembangunan Bendung, empang dan situ g) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi h) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional j) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>lingkungan yang sehat</p> <p>k) Pembangunan TPST Regional</p> <p>l) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi</p> <p>m) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi</p> <p>n) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan</p> <p>o) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi</p> <p>p) Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi</p> <p>q) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh</p>
3. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	<p>a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan</p> <p>b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan</p> <p>c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian</p> <p>d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia</p> <p>e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit</p>
4. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	<p>a) Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur</p> <p>b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal</p>

4.2.3 Interkoneksi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Provinsi Banten berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan Provinsi Banten dengan Nawacita dapat dilihat pada tabel berikut:

Interkoneksi Fokus Pembangunan dan Arah Kebijakan
Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Provinsi Banten	Arah Kebijakan
1.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pendidikan	a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan
		Pembangunan kesehatan	c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Provinsi Banten	Arah Kebijakan
2	e. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman f. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	Pembangunan infrastruktur wilayah	a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat b) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampung dan Penyediaan Air Baku f) Pembangunan Bendung, empang dan situ g) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi h) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional j) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat k) Pembangunan TPST Regional l) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi m) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi n) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan o) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi p) Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi q) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif	Pembangunan ekonomi	a) Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

Sasaran pembangunan di Provinsi Banten yang dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD) menjadi agenda prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahunan pada tahun ke-2 (dua) RPJMD tahun 2017-2022 dan RPJMD ke-IV (empat) tahap akselerasi II dari RPJPD Provinsi Banten. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Provinsi Banten dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten, serta sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Interkoneksi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten 2. Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit 3. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah I10	1. Rata rata lama sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	8.70 Tahun 13.5 tahun	Pendidikan			DINDIKBUD
					Program Pendidikan Menengah			
						Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	74,67	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	65,14	
						Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	60,33	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai)	57,74	
						Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0,19	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0,38	
						Angka Kelulusan SMA (Satuan:%)	98,64	
						Angka Kelulusan SMK (Satuan:%)	99,89	
						Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	53,22	
						Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	56,30	
						Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	49,76	
						Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	97,16	
						Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	34,00	
						Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	60,97	
					Program Pendidikan Khusus			
						Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	34,00	
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)	57.74	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	65.14	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan:%)	97.16	
						Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan:%)	60.97	
					Program Peningkatan Mutu Pembelajaran			
						Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	30,00	
		Meningkatkan koleksi Museum	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %)	100,00	Kebudayaan			DINDIKBUD
					Program Pelestarian Kebudayaan	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	90,00	
						Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	90,00	
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
						Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	90,00	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
						Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	35,00	Perpustakaan			DPKD
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
						Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	80,00	
						Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan			
						Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	80,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	85,00	Kearsipan			DPKD
					Program Pengelolaan Sistem Kearsipan			
						Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan	Indeks Pembangunan Kepemudaan	20,00	Kepemudaan dan Olahraga			Dispora

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		kejuaraan tingkat nasional						
			Indeks Pembangunan Olahraga	20,00				
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan			
						Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi)	80,00	
						Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	80,00	
					Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga			
						Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	75,00	
					Program Peningkatan Prestasi Olah Raga			
						Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	80,00	
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	80,00	
		Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPD)	91,95	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			DP3AKKB
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,34				
					Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera			
						Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	63,33	
						Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	55,00	
						Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	62,27	
						Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	75,00	
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,91	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DP3AKKB
					Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
						Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2,29	
						Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	61,00	
					Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %)	10,18	
						Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	25,18	
		Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,06	Kesehatan			Dinkes dan RSUD Banten dan Malingping
		Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan 70 Orang						
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	30				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
			Angka Kematian Ibu (AKI)	300				
		Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten 100 %	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100				
					Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
						Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	81,00	
						Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100,00	
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
						Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	60,00	
						Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	85,00	
					Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	100,00	
						Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	81,00	
						Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	35,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah			
						Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	37,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat			
						Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	6,40	
					Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang)	170,00	
						Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	80,00	
						Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	60,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
						Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)	70,00	
						Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	70,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	70,00	
						Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	50,00	
2.	Peningkatan infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten	Tingkat Kemantapan Jalan	89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			DPUPR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten						
		Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	26,27				
			Pemenuhan tingkat layanan irigasi	16.721,78 Ha				
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
						Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	84,67	
						Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km)	89,70	
					Program Pembangunan Sumber Daya Air			
						Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	26,27	
						Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	16.721,78	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Presentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	28,99	
						Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	56,97	
						Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	20	
		Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	85,00				DPUPR
					Program Penataan Ruang			
						Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen)	37,50	
		Meningkatnya Penataan Perumahan, Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	85,15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			DPRKP
			Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	203,20 Ha				
		Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten	cakupan pelayanan pengelolaan sampah	20,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	50,00				
					Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit)	85,18	
						Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203,20	
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			
						Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %)	75,57	
					Program Keciptakarya			
						cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha)	20,00	
					Perhubungan			
						Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung)	69,00	
		Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi	20,00	Perhubungan			Dishub
		Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	20,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan			
						Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi)	100,00	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	20,00	
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	20,00	
						Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0,00	
						Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	20,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44,67	Lingkungan Hidup			DLHK
					Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			
						Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	52,00	
						Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	59,20	
						Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar)	8000,00	
						Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	60,00	
		Meningkatnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	31,71	Kehutanan			DLHK
					Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan			
						Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi (Satuan: Hektar)	5000,00	
						Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	10,00	
		Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan	Rasio elektrifikasi	98,00	Energi dan Sumberdaya Mineral			Dinas ESDM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan			
						Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: SS)	15000,00	
					Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan			
		Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	13	Energi dan Sumberdaya Mineral			
					Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara			Dinas ESDM
						Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	44,52	
						Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	44,52	
3.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan	Pertumbuhan Sektor Pertanian	5,30	Pertanian			Distan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Peternakan)						
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan			
						Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,420,714.00	
						Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	8,970.00	
						Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	771.75	
						Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	44,858.00	
						Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	87,00	
					Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
						Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Ketersediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	22,657.00	
						Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7,498.10	
						Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)	3,510.36	
						Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1,762.00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan			
						Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton)	34,18	
					Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian			
		Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90,60	Pangan			Dinas Ketapang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		ketersediaan pangan						
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	3,05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
						Ketersediaan pangan (Satuan: %)	95,10	
					Program Peningkatan Keterjangkauan pangan			
						Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	82,50	
					Program Perlindungan Konsumen Pangan			
						Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	90,00	
					Pariwisata			Dispar
					Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
						Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	15,601,344.00	
						Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,39	
						Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,852,216.00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	1,00	
					Program Pemasaran Produk Pariwisata			
					Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten	LPE Sektor Perindustrian	3,95	Perindustrian			Disperindag
					Program Peningkatan Daya Saing Industri			
						Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	20,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	20,00	
						Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	20,00	
					Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri			
						Persentase Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: %)	200,00	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4,00	Perdagangan			Disperindag
			LPE Sektor Perdagangan	5,40				
					Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			
						Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5,00	
						Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	12,00	
						Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100,00	
						capaian stabilitas harga	5,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						barang pokok (Satuan: %)		
					Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri			
						Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	3,118.79	
					Program Perlindungan dan Pengawasan Industri			
						Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	112,00	
					Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			
						Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)	85	
		Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten	Jumlah Nilai Investasi	60,80 trilyun	Penanaman Modal			DPMPTSP
		Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	88,22				
					Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Investasi			
						Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun)	13,80	
						Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	47,00	
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
						Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100,00	
					Program Pengendalian Penanaman Modal			
						Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	17,09	
					Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal			
						Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	1,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas KUKM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi			
						Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah)	6,00	
					Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi			
						Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	6,00	
		Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	6,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas KUKM
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil			
						Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	1,00	
					Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM			
						Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan	6.00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)		
						Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	1,00	
4.	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	3,89	Sosial			Dinsos
			Index Gini	0,39				
					Program Rehabilitasi Sosial			
						Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Satuan: orang)	608.00	
						Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah)	230,00	
						Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah)	1,300.00	
						Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang)	25,000.00	
					Program Pemberdayaan Sosial			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan PSKS yang meningkat partisipasi sosialnya (Satuan: orang)	1,520.00	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
						Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100,00	
						Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	1,300.00	
						Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	25,000.00	
					Program Penangan Fakir Miskin			
						Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	949.00	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti			
						Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	110.00	
					Program Pelayanan dan Perlindungan			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Sosial Dalam Panti			
						Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	230.00	
5.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,07	Kelautan dan Perikanan			DKP
					Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
						Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8,08	
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
						Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	65.00	
					Program Peningkatan Daya Saing Perikanan			
						Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
						Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %)	117,00	
6.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,06	Ketenaga Kerjaan			Disnakertrans
					Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			
						Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,40	
					Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	4,40	
						Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10,00	
						Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9,53	
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan			
						Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	3,04	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
						Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	15,55	
					Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri			
						Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1,26	
7.	Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75,00	Administrasi Pemerintahan			Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD
					Program Tata Kelola Pemerintahan			Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD
						Nilai IKM (Satuan: skala)	3,00	
					Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			Biro Organisasi
						Persentase OPD yang memiliki nilai LAKIP B (Satuan: %)	30,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan			Biro Pemerintahan
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	75,00	
						Persentase Lembaga Keuangan yang memberikan Fasilitas Pinjaman bagi Masyarakat (Satuan: %)	100,00	
						cakupan rekening kredit per penduduk dewasa yang disalurkan oleh kantor bank umum konvensional di prov banten (Satuan: %)	100,00	
					Program Perumusan Kebijakan Perekonomian			Biro Perekonomian
						Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	18,28	
					Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum			Biro Hukum
						Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100,00	
						Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						hukum nasional (Satuan: %)		
						Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	80,00	
					Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur			Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	80,00	
					Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Biro Kesra
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	80,00	
					Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan			
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	80,00	Biro Administrasi Pembangunan
						Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	80,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan			
						Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	80,00	
						Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	80,00	
						Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	80,00	
					Program Pelayanan Umum			
						Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	80,00	
					Program Pembangunan Kemitraan			Badan Penghubung
						Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	80,00	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Sekretariat DPRD
						Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	80,00	
						Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	80,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD (Satuan: %)	80,00	
		Mewujudkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	74,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Badan Kesbangpol
			Angka Kriminalitas	4500,00				
					Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	70,00	
						Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	0,00	
						Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	0,00	
						Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	0,00	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional			
						Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi			
						Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70,00	
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan			
						Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	24.00	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional			
						Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100.00	
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi			
						Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00	
		Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Kebencanaan	125,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			BPBD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Masyarakat			
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			BPBD
						Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100,00	
					Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			
						Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100,00	
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			
						Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	75,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Satpolpp

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			
						Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	75,00	
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum			
						cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100,00	
					Program Perlindungan Masyarakat			
						Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	80,00	Program Penanganan Bencana Kebakaran			DP3AKKB
						Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100,00	
					Administrasi Kependudukan dan Sipil			
						Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	67,38	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	30,81	
						Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	86,46	
						Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	80,99	
						Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100,00	Keuangan			BPKAD
					Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah			
						Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	90,00	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
						Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	85,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penatausahaan Aset Daerah			
						capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	60,62	Keuangan			BPD
		Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi						
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			
						Persentase Potensi Tunggal Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	15,22	
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah			
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	58,94	
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	41,06	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3,00	Pengawasan			Inspektorat
					Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
						Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	75.00	
						Indeks Integritas (Satuan: poin)	74.48	
						Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	3.00	
						Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00	
		Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	61,83	Komunikasi dan Informatika			Diskominfo
		Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	89,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		dengan pelayanan berbasis teknologi informasi						
					Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik			Diskominfo
						Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	48,38	
					Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			
						Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	40,00	
					Persandian			
					Program Tata Kelola Persandian			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %)	40,00	
					Statistik			
					Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
						Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	60,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						(Satuan: %)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70,00	Perencanaan			Bappeda
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah						
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
						Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	00,00	
						Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Pembangunan Ekonomi			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Penelitian dan Pengembangan			Bappeda
					Program Penelitian dan Pengembangan			
						Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	60,00	
						Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	60,00	
					Statistik			Bappeda
					Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
						Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	60,00	
		Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	15,00	Kepegawaian			BKD
					Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah			
						Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	90,00	
						Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	90,00	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
						Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	15,00	Pendidikan dan Pelatihan			BPSDM
					Program Pengembangan SDM Aparatur			
						Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85,00	
						Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85,00	
					Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur			
						Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	85,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,80	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Dinas PMD
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
						Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %)	2,00	
						Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %)	2,00	
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			
						Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)	2,00	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
						Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %)	41,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab

4.3 Tema Pembangunan Tahun 2019

4.3.1 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

Tema pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan, permasalahan, tematik pembangunan serta prioritas pembangunan. Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi makna dari tema ini, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur kedepan diarahkan untuk membuka akses-akses kawasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di selatan Provinsi Banten untuk menghilangkan ketimpangan antara utara dan selatan wilayah Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah Provinsi Banten melalui pengembangan sektor-sektor unggulan khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung sektor industri. Pembangunan sektor industri di Provinsi Banten merupakan sektor strategis yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat menopang sektor non bisnis lainnya. Basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dengan terus memacu dukungan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini sejalan dengan usaha untuk mewujudkan Provinsi Banten yang berdaya saing untuk meningkatkan investor yang berinvestasi di Provinsi Banten.

2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan yang ada saat ini masih dirasakan oleh masyarakat adanya kesenjangan antara utara dan selatan di wilayah Provinsi Banten. Untuk mengurangi kesenjangan ini

pada Tahun 2019 pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial akan diarahkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan Provinsi Banten. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan di Provinsi Banten.

Program-program pembangunan di Provinsi Banten harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2018 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2019, langkah-langkah yang harus diterapkan antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan *money follow program* yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

4.3.2 Internalisasi RPJPD dengan Tema RKPD Tahun 2019

RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 adalah tahun kedua yang berada pada tahapan akselerasi ke-II (Periode 2017–2022) RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan ke-II RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern.

Adapun prioritas pembangunan RPJPD tahap IV yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha

perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri. Penyelenggaraan Tata
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Pemantapan fungsi kawasan strategis sebagai 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten:
 - (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta;
 - (2) kawasan pelabuhan hub internasional Bojonegara;
 - (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja;
 - (4) Operasionalisasi tol ruas baru.

Gambar 4.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2019 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025
dan RPJMD Tahun 2017-2022



4.3.3 Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema
RKPD Tahun 2019

Tematik pembangunan Tahun 2019 dibangun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didapatkan dari hasil Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Tematik pembangunan daerah yang disusun dalam kerangka perencanaan yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah:

4.3.3.1 Tematik Kemiskinan dan Pengangguran

Tabel 4.5
Matrik Tematik Kemiskinan dan Pengangguran

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja			
			Bimbingan Konsultansi Penghargaan Paramakarya	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Identifikasi Kesenjangan Produktivitas Mikro	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
		Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan			
			Kemitraan Jejaring LPK	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelatihan Dasar Kewirausahaan	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemagangan Berbasis Pengguna	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM				
		Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi			
			pelatihan pengembangan produk Koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			pelatihan peningkatan pemasaran produk koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			pelatihan peningkatan teknologi kapasitas produksi Koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
		Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil			
			Pelatihan Pengembangan Produk Usaha Kecil	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			Pendidikan dan Pelatihan SDM kewirausahaan usaha kecil	Kab. Lebak	Dinas KUKM
	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Kerja Industri				
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten			
			Sertifikasi Uji Kompetensi	Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel	BLKI
			Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel	BLKI
	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri				
		Standarisasi dan sertifikasi Industri			
			Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Pemasaran Produk Pariwisata				
		Promosi Pariwisata Provinsi Banten			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Nasional	Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pariwisata
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
		Dukungan infrastruktur jalan untuk investasi			
			Pembangunan jalan dan Jembatan	Provinsi Banten	PUPR
	Program Pembangunan Kemitraan				
		Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan			
			Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII	Jakarta	Badan Penghubung
			Fasilitasi Partisipasi dalam rangka PRJ	Jakarta	Badan Penghubung
			Partisipasi Anjungan Provinsi Banten pada Kegiatan di TMII	Jakarta	Badan Penghubung
			Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Provinsi Banten	Jakarta	Badan Penghubung

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Pembangunan Sumberdaya Air				
		Dukungan infrastruktur pada sektor agribisnis			
			Rehabilitasi Irigasi	Provinsi Banten	PUPR
	Program Pendidikan Menengah				
		Revitalisasi SMK Agribisnis untuk mendukung produktivitas agribisnis			
			Revitalisasi SMK agribisnis	Provinsi Banten	Dinas Pendidikan
	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
		Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja			
			Bimtek Analisis Pengembangan Pasar Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penguatan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui BKOL	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penguatan Informasi Pasar Kerja (IPK) di Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Peningkatan Pelayanan Bursa Kerja Khusus	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan				
		Pengawasan Ketenagakerjaan			
			Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Perikanan				
		Penanganan Pelanggaran			
			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	Provinsi Banten	DKP
			Patroli Laut Terpadu	Provinsi Banten	DKP
			Penanganan Pelanggaran	Provinsi Banten	DKP
			Pencegahan Konflik Nelayan Antar Daerah	Provinsi Banten	DKP
			Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan	Provinsi Banten	DKP
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan			
			Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	20 kelompok (Lebak, Serang, Pandeglang)	DLHK

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang			
			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	20 kelompok (Pandeglang)	DLHK
		Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)			
			Pengembangan Hutan Rakyat	300 Ha (Pandeglang, Lebak, Serang)	DLHK
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			
			Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Panimbang Tanjung Lesung Kab Pndglnng	DKP
			Identifikasi CSR di Wilayah Pesisir Provinsi Banten	Kab Serang, Kab Tgr, Kab Pndglnng, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab Lebak 6 KAB/KOTA	DKP

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir	Kec Titrayasa Desa Lontar Kab Serang	DKP
		Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi			
			Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional	Kec Sumur Desa Cigorondong, Kab Serang Kec Pulau Ampel	DKP
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
		Dukungan integrasi pariwisata dengan sektor agribisnis			
		Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten			
			Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan	5 Lokasi (1 Lokasi di Kab Pandeglang)	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten			
			Pengelolaan Wisata Alam	Kab Pandeglang	Dinas Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengelolaan Wisata Budaya / Religi	Kota Serang	Dinas Pariwisata
			Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten			
			Pembinaan managment Homestay / Pondok Wisata	Sawarna, Kab Lebak	Dinas Pariwisata
			Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata	Cikolelet Kab Serang	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
		Pembinaan Usaha Industri Pariwisata			
			Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Nasional	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Produk Industri Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif			
			Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi				
		Kelembagaan dan Perizinan			
			Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Verifikasi dokumen Perizinan pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang diajukan	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Jumlah koperasi KSP/ USP dan KSPPS/ UKSPPS yang dilakukan penilaian kesehatan	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Dukungan perdagangan pada sektor agribisnis			
			Pembangunan Pusat Distribusi	Provinsi Banten	Disperindag
		Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan			
		Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka			
			Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional	Provinsi Banten	Disperindag
			Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional	Provinsi Banten	Disperindag
			Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata	Provinsi Banten	Disperindag
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Bazaar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disperindag
			Forum komunikasi perpupukan di provinsi Banten (data dan informasi pupuk bersubsidi)	Provinsi Banten	Disperindag
			Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri				
		Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah			
			Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Identifikasi Produk Ekspor	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengamatan Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengembangan Produk Ekspor	Provinsi Banten	Disperindag
			Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar	Provinsi Banten	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			luar negeri		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				
		Pengembangan Bina Usaha Kecil			
			Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Volume usaha kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil			
			Pengembangan Wirausaha Kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Ekonomi Kreatif				
		Pengembangan SDM Pariwisata Banten			
			Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
			Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi	Kota Serang, kab Serang, pandeglang, Tangsel	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia			
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Informasi Publik				
		Dukungan informasi kesempatan kerja			
			Informasi pasar kerja melalui Media Cetak, Media Televisi, Media Online, Media Radio, Media Sosial	Provinsi Banten	Diskominfo
	Program Peningkatan Daya Saing Industri				
		Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah			
			Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengembangan Industri Kreatif	Provinsi Banten	Disperindag
			Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan Dekranasda Provinsi Banten	Provinsi Banten	(blank)
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota	Provinsi Banten	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri			
			Pemagangan guru dan siswa SMK untuk program keahlian ganda, prakerin, teaching factory	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan				
		Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya			
			Kelompok Usaha Budidaya Yang Bankable	Kab Pandeglang	DKP
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
		Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			
			Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan (Task Force Equal Employment Opportunity) Tingkat Kabupaten/Kota dan Perusahaan Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
		Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan			
			Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	1. Kec. Majasari (Kab Pndgng) 2. Kec Teluknaga (Kab Tgr) 3. Kec. Kosambi (Kab Tgr) 4. Kec. Curug (Kab Tgr) 5. Kec. Cikande (Kab Serang) 6. Kec. Waringin Kuurng (Kab Serang)	Dinas Ketapang
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan				
		Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda			
			Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP)	8 Kab/Kota	Dispora
			Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan kelompok wirausaha pemuda (KMP)	8 Kab/Kota	Dispora

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pemberian penghargaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan			
			Fasilitasi pemuda wirausahawan baru (80%)	Kota Serang	Dispora
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian				
		Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi			
			Optimasi Lahan (Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar)	Kab. Lebak Kec. Cirinten	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura				
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura			
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah	kab pandeglang, kab serang, kab tangerang	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Buah	kab pandeglang, kab serang	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai	Kab Pandeglang, Kab Serang, Kota Serang	Dinas Pertanian
		Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura			
			Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji	Kec Ciablung Kab Pandeglang, Kec Kramatwatu Kab Serang	Dinas Pertanian
			Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah	Kec Baros Kab Serang, Kec Cisoka Kab Tgr	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			
			Demplot pada Kawasan Budidaya Melon dan Pepaya	Kec Warung Gunung Kab Lebak, Kec Panongan Kab Tngr, Kec Walantaka Kota Serang, Kec Labuan Kab Pandeglang	Dinas Pertanian
			Pengembangan Durian dan Manggis di Pandeglang,Lebak dan Serang	Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Bojong, Kec Gunung Kencana	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demplot Aneka Cabai	Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pabdeglang, Kab Tangerang	Dinas Pertanian
			Demplot Bawang Merah melalui Biji	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu	Dinas Pertanian
			Demplot Bawang Merah melalui Umbi	Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Rajeg Kab Tgr, Sitandu.	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Jamur merang sesuai SOP/GAP	Kec. Baros Kab. Serang, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Jamur tiram sesuai SOP/GAP	Kec Gunung Kaler Kab Tgr, Kec Cimanuk Kab Pndglnng	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Sayuran Daun sesuai SOP/GAP	Kec. Wr. Gunung Kab. Lebak, Sitandu	Dinas Pertanian
		Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura			
			Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
			Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Produksi Bibit Tanaman Durian Secara Vegetatif Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan				
		Pengembangan Komoditas Perkebunan			
			Pengembangan Kawasan Perkebunan	Kec Carita Kab Pndgln, Kec Wansalam, Kec Cigeulis Kab pandgln, Kec Carita Kab pndgln, Kec Munul Kab pndgln, Kec Sobang Kab lebak, Kec Cinoyong Kab Pdglng, Kec Pabuaran Kab serang, Kec Bojong Mnaik Kab lebak, Kec Ciomas Kab Serang	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan	Kec Carita Kab Pndgng,, Kec Padaincang Kab Serang, Kec Cinangka Kab Serang, Kec Ciomas Kab Serang, Kec Mancak Kab Serang, Kec Muncang Kab Lebak, Kec Mandalawangi Kab pdgng	Dinas Pertanian
		Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan			
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Aren Pola Kemitraan	Dragong Kec Taktakan	Dinas Pertanian
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kakao Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kelapa Pola Kemitraan	Drangong Kec Taktakan	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sereal			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demfarm Intensifikasi Jagung	1. Kab. Serang (Kec.Jawilan) 2. Kab. Pandeglang (Kec.Cikeusik)	Dinas Pertanian
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan			
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung	Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Kawasan SITANDU Kec.Curug dan Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai	Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kec.Curug Kota Serang dan Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi	Kab Serang : Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam	Dinas Pertanian
		Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan)	Kec Muncang, Kec Mandalawangi	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	1. Kab. Lebak (Kec.Wanasalam)kedelai 2.Kab Tgr (Kec.Balaraja)kedelai 3.Kota Cilegon (Kec.Purwakarta)kedelai 4.Kota Cilegon (Kec.Cibeber(kedelai) 5.KP3B Dinas Pertanian (kedelai) 6.Kab/Lebak (kec.Rangkasbitung) kcng tanah 7.Kota serang (Kec.Taktakan) kcng tanah 8.Kab Pndgln(Kec.Cibaliung) kcng tnh 9.Kab.Tgr (Kec.Solear) kcng tnh 10.Kota Cilegon (Kec.Citangkil) kcng tnh 11.Kab.Tgr (Kec.Cisoka) kedelai 12.Kota Serang (Kec.Curug) kedelai 13.Kab.Pndgln (Kec Cigeulis) kedelai 14.Kab. Lebak (Kec.Leuwidamar)kedelai 15.Kab.Lebak (Kec	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
				(Kec.Cinagka)kedela 17.Kab.Serang (Gunung Sahari)kedelai 18.Kab Serang (Kwc.Waringin Kurung)kedelai 19.Kab Pndgln (Kec.Cibaliung)kedelai	

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kec.Wanasalam(Kab Lebak), Kec.Balaraja(Kab. TGr), Kec.Purwakarta Kota Cilegon, Kec.Cibber Kota Cilegon,KP3B, Kec Rangkasbitung Kab Lebak, Kec Taktakan Kota Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Solear Kab Tgr, Kec Citangkil Kota Cilegon,Kec Cisoka Kab Tgr, Kec Curug Kota Serang, Kec Cigeulis Kab Pdglng, Kec. Leuwidamar Kab Lebak,Kec Malingping Kab Lebak, Kec Cinangka Kab Serang, Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Waringin Kurung Kab Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Cimanggu Kab Pandeglang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Carita Kab pandeglang KP3B,	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Searelia			
			Demfarm Intensifikasi Padi Ladang	1. Kab.Serang (Kec.Pontang) 2. Kab Serang (Kec.Lebakwangi) 3. Kab.Lebak (Kec.Malingping) 4. Kab.Lebak (Kec.Wanasalam) 5. Kab. Lebak (Kec.Cibeber) 6. Kab.Pandeglang (Kec.Panimbang) 7. Kab.Pandeglang (Kec.Sobang) 8. Kab.Pandeglang (Kec.Sukaresmi) 9. Kota Serang (Kec.Walantaka)	Dinas Pertanian
			Demfarm Intensifikasi Padi Sawah	1. Kab.Lebak(Kec. Wanasalam). 2.Kab. Pandeglang (Kec.Cibaliung)	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demplot Budidaya Mina Padi	1. Kab. Lebak (Kec.Cipanas) 2. Kab.Pandeglang (Kec.Cipeucang)	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
			Identifikasi Lokasi sertifikat hak atas (Sehat) nelayan	1. Kab pandeglang, 2. Kab Lebak, 3. Kab Serang	DKP
			Pembayaran Premi Asuransi Nelayan	Sumur, Wanasalan, Kronjo,Tanahara, Kasemen /Karangantu	DKP
	Program Perlindungan Konsumen Pangan				
		Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan			
			Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)	Provinsi Banten	Dinas Ketapang

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Provinsi Banten	Dinas Ketapang
		Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan			
			Pembinaan Kader Pangan B2SA	Provinsi Banten	Dinas Ketapang
PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL					
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti				
		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan pada BP2S			
			Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan ketrampilan pada BP2S	Kabupaten Lebak	Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
		Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan pada BP2S			
			Jumlah PMKS yang telah diterima dan disalurkan dalam bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan pada BP2S	Provinsi Banten	Balai Pemulihan dan Pengembangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Sosial
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			
			Peningkatan kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi Perempuan (termasuk hibah alat-alat)	Kota Serang	DP3AKKB
	Program Pemberdayaan Sosial				
		Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat			
			Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penganganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Dinsos Prov. Banten-KP3B, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon, Kab. Lebak	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai pendamping	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian				
		Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan	8 Kab/Kota	Dinkes
	Program Penangan Fakir Miskin				
		Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kab.Pandeglang, Kab.serang Kab. Tangerang	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Ds Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Desa Sukawali Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang, Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	Dinsos
		Penanganan Fakir Miskin Perdesaan			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Pandeglang, Desa Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang, Desa Sukamanah Kec. Rajeg Kab. Tangerang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Desa Sindangmandi Kec. Baros Kab. Serang, Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang, Desa Tambak Jaya Kec. Cibadak Kab. Lebak, Desa Pasir Kupa Kec. Karanganyer Kab. Lebak, Desa Pangarengan Kec. Rajeg Kab. Tangerang	Dinsos
		Penanganan Fakir Miskin Perkotaan			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kota Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangsel	Dinsos
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	Dinsos
	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah				
		Dukungan penyediaan guru produktif			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengadaan CPNSD Guru Produktif SMK	Provinsi Banten	BKD
	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit				
		Upaya Kesehatan Jiwa			
			Gerakan Banten Bebas Pasung	Provinsi Banten	Dinkes
	Program Pendidikan Menengah				
		Penjaminan Peserta Didik SMA			
			Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMA	Provinsi Banten	Dindikbud
		Penjaminan Peserta Didik SMK			
			Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMK	Provinsi Banten	Dindikbud
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			
			Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten	8 Kabupaten/Kota	Dinkes
	Program Peningkatan Daya Saing Industri				
		Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri			
			Kerjasama Link And Match Industri dan SMK	Provinsi Banten	Dinas Perindag
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
		Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP			
			Pembahasan Penetapan UMK se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pembahasan Penetapan UMP se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pembahasan Penetapan UMSK se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penangguhan UMP/UMK	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
		Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak			
			Evaluasi Pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola asrama dan panti asuhan	(blank)	(blank)
			Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola pondok pesantren	Provinsi Banten	DP3AKKB
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Membangun Desa				
		Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa			
			Integrasi BKAD dari daerah kabupaten yang berbeda di Provinsi Banten untuk mendukung 5 Dimensi IPD	Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Tangerang	Dinas PMD
			Optimalisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD)	118 BKAD di 118 kecamatan	(blank)
		Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan			
			Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Tentatif, berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait tempat Penyelenggaraan	(blank)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
		Jaminan Sosial Keluarga Miskin			
			Penerima Jaminan Sosial Keluarga Miskin	(blank)	Dinsos
		Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	Provinsi Banten	Dinsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana			
			Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam	8 Kab./ Kota, (TTC) Desa Hambalang, Sentul Kab. Bogor, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial	Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kab. Serang, Desa Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana	Kec. Cinangka Kab. Serang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar	Kec. Ciligrang, Kab. Lebak dan Kec. Grogol, Kota Cilegon	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial				
		Rehabilitasi Anak Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			
			Pendampingan Lanjut Usia	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Rehabilitasi Sosial Anak	Desa Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang, LP Anak Pria (Kel. Sukaasih Kec. Tangerang Kota Tangerang), Dinsos Prov. Banten-KP3B, 8 Kab./ Kota	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	8 Kab./ Kota, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			
			Bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas Berat	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Pasir Haur Kec. Cipanas Kab. Lebak	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Rehabilitasi Sosial ODGJ	Desa Sinar Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Waringin Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang			
			Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan	LBK Kab. Serang (Kec. Curug Kota Serang)	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Korban Trafficking	8 Kabupaten/Kota dan DKI Jakarta	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Pekerja Migran	Kab. Pandeglang, Kab. Serang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	LBK (Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak), Desa Belimbing Kec. Kosambi Kab. Tangerang, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat				
		Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi			
			Penanganan Stunting	8 Kab./ Kota : Prioritas pada Ds. Inten Jaya Kec.cimarga (Lebak), Ds.Tanjung Jaya Kec.Cikeusik (Pandeglang), Ds.Paku alam Kec.Paku Haji (Kab.Tangerang), Ds. Umbul Tanjung Kec. Cinangka (Kab.Serang)	Dinkes
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH					
	pemanfaatan ketenagalistrikan				
		pengusahaan ketenagalistrikan			
			rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	Dinas ESDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Keciaptakaryaan				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi			
			Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Provinsi Banten	DPRKP
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				
		Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan			
			Pemasangan unit terpasang pembangkit dan reaktor dari energi terbarukan	Daerah Perbatasan/ Pulau-Pulau Terluar	Dinas ESDM
			Pembangunan Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor Energi Terbarukan	Provinsi Banten	Dinas ESDM
		Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan			
			Pemasangan instalasi dan sambungan rumah(listrik perdesaan)	Provinsi Banten	Dinas ESDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara				
		Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan			
			Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penumpang regional Panimbang	Provinsi Banten	Dishub
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api			
			Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Stasiun Kereta Api Karangantu	Kota Serang	Dishub
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten	Provinsi Banten	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak	Kabupaten Lebak	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	Kota Cilegon	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang	Kota Serang	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni			
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Provinsi Banten	DPRKP
PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN					
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana			
			Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Pengembangan pelayanan KBKR melalui kemitraan	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Revitalisasi program KB bagi masyarakat di wilayah miskin perkotaan se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	DP3AKKB
	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum				
		Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum			
			Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Provinsi Banten	Biro Hukum
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
		Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemanfaatan hasil Karya TTG Tahun 2018	Desa Paku Alam, Kali Baru, Umbul Tanjung, Cikolelet, Ciherang Jaya, Kadu Ronyok, Sarageni, Karya Jaya	DPMD
			Pemberdayaan Desa Inovasi berbasis IT	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pembinaan dan Pengembangan Posyantek dan Posyantek Des/Kel	Kecamatan Pakuhaji, Kec. Cinangka, Kec. Cisata, Kec. Cimarga	DPMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG)	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG)	8 Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat	DPMD
		Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Karang Taruna	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD
			Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan para Kepala Dusun pada Desa Tertinggal (Peningkatan Pemahaman Kepala Dusun tentang Perkembangan dan Pembangunan Desa)	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD
			Peningkatan kapasitas manajemen Lembaga Kemasyarakatan Melalui Pelaku Usaha Perdesaan/kelurahan	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Kapasitas masyarakat Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang	DPMD
		Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa			
			Pembinaan dan Pengembangan Bumdes	SUKARESMI, MAJASARI, INTEN JAYA, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG	DPMD
			Pengembangan PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Kecamatan Jiput	DPMD
			Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa	SUKARESMI KEC. SOBANG, INTEN JAYA, TANJUNGAN, Kali Baru Kecamatan Paku, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka, Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka, CIKADONGDONG, kec.cikeusik	DPMD
		Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang Potensi Ekonomi Desa	SUKARESMI, MAJASARI, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG	DPMD
			Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri	Desa Paku Alam, Kec Pakuhaji, Desa Kali Baru, Kec Pakuhaji, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka-serang, Desa Cikolelet, CIHERANG JAYA, Kadu Ronyok, Sarageni	DPMD
		Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa			
			Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Profesional Terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa	Desa Tertinggal dan Berkembang, (70 PLD), Pendamping Lokal Desa	Dinas PMD
			Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	D PMD Prov. Banten - KP3B	Dinas PMD
			Pendampingan kegiatan padat karya di pembangunan perdesaan	Kabupaten Pandeglang	Dinas PMD
	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Rakyat				
			Verifikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat	Provinsi Banten	Biro Kesra

4.3.3.2 Tematik Kedaulatan Pangan

Tabel 4.6
Matrik Tematik Kedaulatan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	1	Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Kota Serang	Dinas Ketahanan Pangan
				2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	2	Rakor Satgas Pangan		
				3	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	3	Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
		2	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan		Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan		Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Provinsi Banten	
		3	Program Perlindungan Konsumen Pangan		Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan		Analisis kebutuhan konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
							Pembinaan Kader Pangan B2SA	Dinas Ketahanan Pangan	
		4	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis di Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Bazaar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten		
							Forum Komunikasi Perpupukan (data dan informasi pupuk bersubsidi)		
		5	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri		Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan		Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Serang	
							Pembentukan BUMD Agribisnis	Kota Setang	
		6	Program Peningkatan Daya Saing Industri		Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri		Peningkatan Nilai Tambah Produk	Provinsi Banten	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		7	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia		Demfarm Intensifikasi Padi Sawah	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	Dinas Pertanian
							Demfarm Intensifikasi Padi Ladang	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab.Pandeglang (Cibaliung)	
							Gerakan Tanam dan Panen Padi	Kab. Serang (Pontang)	
							Demfarm Intensifikasi Jagung	Kab. Serang (Jawilan), Kab. Pandeglang (Cikeusik)	
							Gerakan Tanam dan Panen Jagung	Kab. Serang (Jawilan)	
							Demplot Budidaya Mina Padi	Kab. Lebak (Cipanas), Kab. Pandeglang, (Cipeucang)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi		Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis), Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber), Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung)	
					Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan		Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Padi Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
							Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Jagung Pola Kemitraan		
							Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Kedelai Pola Kemitraan		
							Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan		
							Evaluasi Mutu Stock Benih		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan		Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi	1. Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. 2. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam	
						Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung	1. Kec. Cibaliung,Kabupat en Pandeglang 2. Kawasan SITANDU Kec.Curug 3. dan Kabupaten Lebak		
						Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai	1.Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, 2.Kec.Curug Kota Serang 3. Kabupaten Lebak		
					Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan		Sertifikasi benih sumber dan sebar tanaman Pangan	Kab lebak, Kab Tangerang, dan kota serang	
							Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Pemetaan Zona Varietas	Kab. Pdg, Kab. Lbk, Kota serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab. Trg, Kota Tangsel	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pengawasan Mutu Benih	Kab.Srg, Kota Srg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel	
							Pengujian Benih Secara Laboratoris	Kota Srg, Kab.Srg, Kota Clg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel	
							Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman	BPSBTPH	
							Pengembangan Plasmanutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas	kab.tgr, kota tgr, kota tangsel, kab.lbk, kab.pdg, kota serang, kota clg, kab. Serang	
		8	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura		pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura		Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah	1. kab pandeglang, 2. kab serang, 3. kab tangerang	
							Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai	1. kab pandeglang, 2. kab serang, 3. kota serang	
							Demplot Aneka Cabai	Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Tangerang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Demplot Bawang Merah Melalui Umbi	Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec. Panimbang Kab. Pdg, Kec. Rajeg Kab. Tng, Sitandu	
							Demplot Bawang Merah Melalui Biji	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu	
							Operasional Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan		
					Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura		Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
							Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan		
		9	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan		Pengembangan Perbibitan Ternak		Pemetaan dan pendataan Potensi wilayah populasi produksi bibit ternak sapi dan kerbau dalam mengukur kinerja pembangunan peternakan	Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Banthani, Palima Curug - Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pengawasan Mutu benih, Bibit Ternak Sapi dan Kerbau serta Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	4 kabupaten : Kabupaten pandeglang, kabupaten Lebak, kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang	
							Pemetaan Penggunaan semen beku	Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Banthani, Palima Curug - Serang	
							Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock di unit Usaha dan masyarakat	Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis	
							Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock diunit Usaha dan masyarakat	Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				Pengembangan Pakan ternak		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Teknologi Pakan Sederhana di Wilayah Provinsi Banten	SITANDU Kecamatan Curug Kota Serang		
						Asuransi Ternak Ruminansia	Cikulur Kabupaten Lebak		
						Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pengolahan Produk Hewan	Kecamatan Carita		
						Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Hewan	Kecamatan Rangkasbitung		
				Perbibitan Ternak		Budidaya Ternak Domba/Kambing	UPT Balai Pengembangan Peternakan		
						Budidaya Ternak Sapi			
						Budidaya Ternak Kerbau			
						Budidaya Ternak Ayam Buras			
				Perbibitan Ternak Itik Damiaking					
		10	Program Peningkatan		Penyediaan Prasarana dan		Penyediaan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		Sarana Pertanian		Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida	KAB PDG, KAB LBK,KOTA SERANG,KAB.SERANG,KOTA TANGSEL,KAB TANGERANG,KOTA TANGERANG	
							Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi	Dinas Pertanian	
							Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	8 KAB/KOTA	
					Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi		Penataan Prasarana Pertanian Untuk Lahan (Kesuburan Lahan)	Kec.Pandeglang Kab.Pandeglang	
							Penataan Prasarana Pertanian Untuk Irigasi	Kec.Pandeglang, Rangkasbitung, Sepatan	
							Optimasi Lahan (Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar)	Kab. Lebak Kec. Cirinten	
		11	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia		Peningkatan Kapasitas petugas pengumpul data Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	8 Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pangan		Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
							Evaluasi Mutu Stock Benih	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi		Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis), Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber), Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung)	
					Perlindungan Tanaman Pangan		Pertemuan Teknis Sinkronisasi Pelaporan Serangan OPT Tanaman Pangan	BPTPH Prov. Banten	
							Pembinaan Petugas Pengendali OPT, Lab. PHP di 8 Wilayah Kerja Pengamatan OPT	BPTPH Prov. Banten	
							Sosialisasi Hasil Peramalan OPT Tanaman Pangan	Lebak, Pandeglang, Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Surveillance OPT WBC dan Penggerek Batang Padi	Jiput, Pagelaran, Panimbang, Sindang Resmi, Kramatwatu, Pontang, Lebakwangi, Malingping, Wanasalam, Kasemen, Kronjo, Mekarbaru	
							Peningkatan Operasional LPPHP untuk OPT Pangan (2 Instalasi LAB)	Lebak, Pandeglang, Serang	
							Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan pada Wilayah Tersebar	Provinsi Banten	
							Pengawasan dan Peredaran Pestisida	Provinsi Banten	
							Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pengendalian OPT Tanaman	Provinsi Banten	
					Perlindungan Tanaman Hortikultura		Terfasilitasinya Lab. LPHP Wilayah Serang dan Lebak	Laboratorium Wilayah I Serang, Laboratorium Wilayah 2 Lebak	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Terfasilitasinya Sarana Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Tanaman Hortikultura	Laboratorium Lab. Wilayah 1 Kota Serang	
							Terbinanya SDM Petugas Lapang POPT/PHP	BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang-Lebak	
							Tersusunnya Peramalan dan Terpetakannya OPT Utama Hortikultura	BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang-Lebak	
					Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan		Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Pangan (susut Hasil)	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	
							Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan)	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	
					Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura		Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah	Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dan Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji	Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang	
							Peningkatan Penerapan Good Handling Practice pada Komoditas : Cabai Merah, Bawang Merah, Manggis, Melon	Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak dan, Kota Cilegon	
		12	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular		Surveilans Brucellosis	Provinsi Banten	
							Jaminan Kesehatan Hewan		
							Public Awareness Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza (AI)		
					Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Provinsi Banten	
							Public Awareness Produk Hewan ASUH	Provinsi Banten	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan		Pengawasan Produk Asal Hewan dan Pertemuan Pengawasan Produk Asal Hewan	Provinsi Banten	
							Profiling data unit usaha obat hewan	Provinsi Banten	
					Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular		Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Provinsi Banten	
							Penguatan Kapasitas Klinik Hewan	Provinsi Banten	
							Pemeriksaan Ante Mortem Hewan Qurban	Provinsi Banten	
							Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AI	Provinsi Banten	
							Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan	Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Serpong), Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Cipanas)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pemeriksaan dan Pencegahan Penyakit Brucellosis	Provinsi Banten	
							Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi	Provinsi Banten	
							Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Hewan	Laboratorium UPT BPPV	
					Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)		Pengujian Sampel PHM pada lab Kesmavet	Provinsi Banten	
							Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Provinsi Banten	
		13	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani		Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi	Kota Serang	
		14	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		Pembuatan Apartemen Ikan	Sumur Pandenglang, Pulo Panjang Serang	Dinas Kelautan Dan Perikanan
							Restocking Ikan	Wanasalam, Sumur Taman Jaya	
							Produktifitas Alat Tangkap	Panimbang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Ikan		
							Rekomendasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Sumur, Bayah, Mauk, Puloampel, Pulomerak	
					Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan		Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) Ukuran 10 - 30 GT	Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel, Kramatwatu	
							Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Ukuran 5-10 GT	PPI Cituis	
							Pengadaan Kapal Ikan Ukuran 5-10 GT		
							Pelayanan Buku Kapal Perikanan Ukuran 5 -30 GT	Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel, Kramatwatu	
							Pelayanan Rekomendasi Teknis Bagi Kapal Penangkapan Ikan	Wanasalam, Sumur, Panimbang, Kronjo, Karangantu	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	STP Karangantu	
							Koordinasi Pengendalian Nelayan Andon	1. Jabar (Bandung) 2. Jateng (Semarang) 3. DKI Jakarta 4. Bandar Lampung	
							Standarisasi Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan	Dinas Kelautan Perikanan	
					Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan		Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Penyusunan DED (Redesign) Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Revitalisasi Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Operasional PPI Binuangeun dan PPI Cituis	KAB LEBAK DAN KAB TANGERANG	
					Pengembangan Usaha Pelabuhan		Oprasional Pabrik Es	UPTD BPPP LABUAN	
							Operasional Cold Storage		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pelayanan Air Bersih		
					Tata Operasional BPPP Labuan		Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan kesyabandaran		
							Kapal yang tambat labuh		
							Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)		
							Surat Hasil Tangkap Ikan (SHTI)		
							Pengumpulan Data, Pengelolaan, dan Pengembangan Informasi Pelabuhan Perikanan		
					Penanganan Pelanggaran		Penanganan Pelanggaran	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
							Pencegahan konflik nelayan antar daerah	DKI, Lampung, Jabar, Jateng	
							Patroli Laut Terpadu	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
							Pengoperasian kapal pengawas perikanan	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
					Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Panimbang, Cilegon, Kab Tangerang	
							Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	
							Pembinaan Pokmaswas	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	
		15	Program Peningkatan daya saing perikanan		Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan		Bazar Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten / GEMARIKAN	Kab. Serang	
							Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Kab Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Labuan	
							Rekomendasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Kab. Pandeglang	
							Rekomendasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Kab. Tangerang	
							Penerbitan IUP Budidaya Ikan Lintas Kab/Kota	Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD		
		16	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Panimbang, Tanjung Leseung			
							Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir	Panimbang			
		17	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi		Bina Usaha Koperasi			Provinsi Banten	Dinas Koperasi UKM		
		18	Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil		Bina Usaha Kecil						
							Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil				Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya
											Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT
											Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT
											Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		Program Pembangunan Sumberdaya Air		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			Provinsi Banten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara		Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal-Boru)	Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal- Boru)	
							Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Ciruas - Pontang	Ciruas - Pontang	
					Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan		Tanjung Lesung - Sumur	Ruas Jalan Tanjung Lesung - Sumur	
							Mengger - Mandalawangi - Caringin	Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin	
							Saketi - Malingping - Simpang	Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang	
							Cipanas - Warung Banten	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	
							Jalan Raya Labuan (Pandeglang)	Ruas Jalan Raya Labuan (Pandeglang)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pembangunan Jembatan		Jembatan Cimayan Ruas Picung-Munjul	Jembatan Cimayan Ruas Picung-Munjul	
							Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama- Pontang	
							Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	
							Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama-Pontang	Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama-Pontang	
		Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan			Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan		Pengembangan Hutan Rakyat (KBD, Demplot Hutan Rakyat, Tanaman Bawah Tegakan)	Kota Serang	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
					Konservasi SDA dan Ekosistem		Bintek Budidaya Tanaman di BawahTegakan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESE HATAN DAN SOSIAL		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian		Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan		Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas Kesehatan
	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN		PROGRAM PENGEMBAN GAN, PENDAYAGUN AAN, PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika		Pembangunan Sistem Informasi	Provinsi Banten	Dinas Komunikasi Informatika
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMI AN		Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD			Provinsi Banten	Biro Bina Perekonomi an
					Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM				
					Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan				
					Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKT UR		Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Provinsi Banten	Biro Infrastrukt ur & SDA
					Perumusan Kebijakan Pertanahan				
					Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan				

4.3.3.3 Tematik Pariwisata

Tabel 4.7
Matrik Tematik Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
1	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Pengembangan Sarana dan prasarana telematika	1	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	1	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Kp. Cikadu, Desa Tanjungjaya, Kec. Panimbang)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Panimbang, Bayah, Cipanas, Cibaliung, Cigeulis		
		4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Pengembangan dan peningkatan jalan wilayah selatan	1	Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (16 Km)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana	1	Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten		Dinas Perhubungan
		6	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	1	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut	1	Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut		
						2	Pembinaan Keselamatan Angkutan laut Antar Pulau		
				2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	1	Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang		
						2	Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						3	DED pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang		
				3	Penyelenggaraan Perhubungan Udara	1	Apraisal Pengadaan lahan Bandar Udara Banten Selatan		
		7	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	1	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi	1	Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinai Banten Wilayah Kerja III		
						2	Kajian Kebutuhan Navigasi Antar Pulau di Provinsi Banten		
		8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1	Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign)		
						2	Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi Banten		
				2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	1	Pengadaan Marka Jalan		
						2	Pengadaan guard rail		
						3	Pengadaan Warning Light		
						4	Pengadaan Rambu Standar		
						5	Pengadaan Paku Jalan		
						6	Pengadaan PJU		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				3	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	1	Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/ Organisasi dan Pengaturan Lainnya		
						2	Posko Hari Libur Nasional		
						3	Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional		
2	PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL	1	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	Bantuan Sosial UEP Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Sosial
		2	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	Peningkatan Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM		Dinas Kesehatan
		3	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Kerjasama Pelayanan Kesehatan	1	Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		
		4	Program Pendidikan Menengah	1	Peningkatan Peserta Didik SMK	1	Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik		Dinas Pendidikan
3	PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	1	Program Pemasaran Produk Pariwisata	1	Promosi Pariwisata Provinsi Banten	1	Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Nasional		
						2	Gebyar Wisata Banten		
						3	Banten Beach Festival		
						4	Festival Tanjung lesung		
						5	Promosi di Media Cetak ,Elektronik dan Website		
						6	Launcing Kalender Event		
						7	Banten Travel Exchange		
						8	Komunitas Familiar Trip		
						9	Banten Tourism Week		
				2	Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	1	Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten		
						2	Pembuatan materi Promosi Audiovisual Pariwisata Banten		
				3	Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata	1	Identifikasi segmen pasar Pariwisata		
						2	Pengembangan sistem manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						3	Penyusunan / Pembuatan Buku NESPADA Banten		
						4	Pembuatan Buku Pariwisata dalam angka		
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	1	Pengelolaan Wisata Alam		
						2	Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan		
						3	Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata		
				2	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten	1	Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata		
						2	Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata		
						3	Gerakan Aksi sadar wisata		
				3	Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten	1	Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan		
		3	Program pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf	1	Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber	1	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Daya Manusia	2	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata		
				2	Pengembangan SDM Pariwisata Banten	1	Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten		
						2	Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata		
						3	Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi		
				3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1	Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi		
						2	Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan intelektual		
		4	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf	1	Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	1	Peningkatan Produk Industri Pariwisata		
						2	Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan		
						3	Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata		
						2	Penghargaan Industri Usaha terbaik		
				3	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	1	Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah		
		5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	1	Bina Usaha Kecil	1	Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan Internasional		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2	Peningkatan Volume usaha kecil		
						3	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis		
						4	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar		
						5	Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten		
				2	Pengembangan Penguatan dan	1	Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD	
					Perlindungan Usaha Kecil	2	Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten			
						3	Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil			
						4	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya			
						5	Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT			
						6	Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT			
						7	Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku			
						3	Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil			
							1			Perencanaan Pelaksanaan dan Monev UKM
							2			Pengembangan Wirausaha Kecil
		6	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	1	Bina Usaha Koperasi	1	Promosi Usaha Koperasi lingkup regional, nasional dan internasional			
						2	Penganekaragaman Volume Usaha Koperasi			
						3	Peningkatkan kapasitas			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							produksi Koperasi		
						4	Jumlah Akses Pasar koperasi yang terfasilitasi		
						5	Jumlah Kemitraan strategis koperasi dengan badan usaha lainnya		
						6	Implementasi Teknologi Tepat Guna Bagi Koperasi pesantren		
				2	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi	1	Fasilitasi akses permodalan		
						2	Implementasikan Sistem Teknologi Informasi dan Manajemen Keuangan		
						3	Sosialisasi perpajakan, asuransi dan penjaminan		
						4	peningkatan akses permodalan di PLUT		
				3	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	Peningkatan SDM pada Akses Pasar, Pemasaran, Manajemen dan Keuangan		
		7	Program Peningkatan iklim, promosi dan	1	Penyelenggaraan Promosi dan kerjasama	1	Penyelenggaraan Promosi melalui Media Massa		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
			kerjasama investasi		penanaman modal	
		9	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	
		10	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				1	Pembentukan Pulau Bahari	
				2	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				3	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	
		11	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DLHK
		12	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	
				1	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi keanekaragaman hayati	
		13	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-	1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
				1	Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pulau Kecil	2	Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	1	Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional		
						2	Penataan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		
		14	Program Peningkatan Daya Saing Industri	1	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1	Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	1	Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata		
4	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN	2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). (Tersedianya Alat TTG yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di 1022 Desa Berkembang)	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						2 Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) (Terinventarisirnya Alat TTG di 4 Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan dan Penggunaan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Desa)		
						3 Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG (Tersedianya Alat TTG dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam)		
				2	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa	1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Lembaga Kemasyarakatan melalui Pelaku Usaha Perdesaan (Jumlah Pelaku Usaha Perdesaan yang diberdayakan tentang Manajemen Usaha)		
				3	Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa	1 Pembinaan dan Pengembangan Bumdes (Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Bumdes di 158 Desa Tertinggal)		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa (Tersediaanya Potensi Inovasi Desa terhadap Ekonomi Desa)		
				4	Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Pengembangan Potensi Desa (Kearifan Lokal)		
		3	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Pengelolaan Teknologi Informasi	1	Pengelolaan domain bantenprov.go.id		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		4	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Penertiban Terpadu/Tim Terkoordinasi Pemeliharaan Trantibum, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Peraturan Daerah (Non Justisial) di wilayah Provinsi Banten		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		5	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	1	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Perumusan Kebijakan Penataan Percepatan Progres Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Destinasi Wisata Tanjung Lesung		Biro Bina Perekonomian
		6				2	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten Tahun 2019		
		7	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	1	Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten		Biro Infrastruktur & SD

4.3.3.4 Tematik Penataan Kawasan Banten Lama

Tabel 4.8

Matrik Rencana Aksi Revitalisasi Kawasan Banten Lama

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
1	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	1	Pembangunan Jalan Wilayah Utara	1	Pembangunan Jalan Lopang - Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPUPR
						2	Pembangunan Jalan Akses Masjid Agung Banten Lama		
						3	Pembangunan Jalan Banten Lama-Tonjong		
						4	Pembangunan Jalan Terate - Banten Lama		
						5	Pembangunan Jalan Kramatwatu - Tonjong		
						6	Pembangunan Jalan Baru (Tonjong - Banten Lama/short cut)		
				2	Pengadaan Lahan Kebinamargaan	1	Pembebasan Lahan Relokasi Jalan Tonjong - Banten Lama (short cut)		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan Kramat Watu - Tonjong		
						3	Pengadaan Lahan Tonjong - Karangantu		
						4	Pengadaan Lahan Terate - Banten Lama		
		2	Penataan Ruang	1	Penataan Dan Pemanfaatan Ruang	1	Penyusunan Perda Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama	Kota Serang	
		3	Pembangunan Sumber Daya Air	1	Operasi Dan Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Pada Bpsda Ciujung-Cidanau	1	OP / Pembersihan kanal Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

				2	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	2	Revitalisasi Kanal Banten Lama (termasuk lahan dan jembatan rantai)		
		4	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS	1	MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1	Pengadnan Dan Pemasangan Lampu Lpju (Mekanikal Dan Electrical)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISHUB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						2	PJU Ruas Jalan Banten Lama – Pontang	
						3	PJU Ruas Jalan Terate - Banten Lama	
						4	PJU Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong	
						5	PJU Ruas Jalan Lopang - Banten Lama	
						6	PJU Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu	
						7	PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN (RPPJ/RPPJ PERINGATAN)	
						8	Ruas Jalan Banten Lama - Pontang (Rambu, Marka, Guadrill)	
						9	Ruas Jalan Terate - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill)	
						10	Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong (Rambu, Marka, Guadrill)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						11	Ruas Jalan Lopang - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill)		
						12	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu (Rambu, Marka, Guadrill)		
						13	Pengadaan Dan Pemasangan Warning Light Di Ruas Jalan Banten Lama – Pontang		
				2	Pengendalian Dan Penyelenggaraan Lalu Lintas	1	Pengaturan Lalu Lintas Banten Lama		
		5	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1	Perencanaan Dan Pengembangan Jaringan Transportasi	1	Pengadaan Lahan shelter Bus dan gerbang akses dari arah barat	Kota Serang	
						2	Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Park and Drive sekitar stasiun KA		
						3	Perencanaan Teknis pembangunan Kereta Gantung		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Keciptakaryaan	1	Peningkatan Kualitas Rtlh	1	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPRKP
				2	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	2	Pasangan Paving Blok		
				3	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Bersih	3	Pembangunan Sumur Bor dan MCK		
				4	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan	4	Normalisasi Drainase Lingkungan		
				5	Pembebasan Lahan Di Banten Lama	5	Pembebasan Lahan Kawasan Pendukung Wisata (KPW)		
				6	Sarana Pendukung Kebersihan	6	Mobil Pembersih Jalan, Kendaraan Roda Tiga	Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		7	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	1	Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Provinsi	1	Penataan Kauman, Pembangunan IPAL Komunal, penataan Kaibon, spelwijk, Pembangunan Akses Antar Situs, Penyediaan Sarana Sosial (Perpustakaan, Lapangan, RTH)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	2	Penyusunan AMDAL kawasan Banten Lama	Kota Serang	
		8	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Perumahan	1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1	Pengadaan Lahan Relokasi Rumah	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Penyediaan Dan Pembangunan Perumahan	2	Pembangunan Rumah Khusus pada Kawasan Strategis Provinsi		
				3	Pengelolaan Dan Pengembangan Persampahan	3	Penyediaan Tempat Pembuangan sampah Sementara		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		9	Tata Kelola Pemerintahan	1	Pengadaan Sarana Dan Prasara Kantor	1	Pengadaan Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup	Kota Serang	DLHK
						2	Pengadaan Truk Arm Roll Penganngkut Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup		
						3	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga (Motor Pengangkut Sampah)		
				2	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	1	Outsourcing Pengemudi Kendaraan Pengelola Sampah		
		10	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1	Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial	1	Penghijauan dijalan Akses menuju Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Penanaman Pohon untuk Mendukung RTH pada jalan provinsi akses banten lama		
2	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan,Kesehatan Dan Sosial	1	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	Jaminan Sosial Keluarga	2	jumlah penerima jaminan sosial keluarga	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINSOS
		2	Rehabilitasi Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Anak Dan Usia Lanjut	1	jumlah anak yang mendapat rehabilitasi sosial (desa kasunyatan kec. kasemen kota.serang)		
						2	Bimbingan Sosial keluarga dan anak jalanan 50 orang di Banten Lama		
						3	Bimbingan Sosial dan keterampilan anak jalanan 80 orang di Banten Lama		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	1	jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Bimbingan dan keterampilan bagi pengemis)		
		3	Pemberdayaan Sosial	1	Pemberdayaan Sosial Kelurga Dan Masyarakat	1	jumlah PSKS yng dibina (kelembagaan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial		
		4	Penanganan Fakir Miskin	1	Penanganan Fakir Miskin	1	jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui KUBE Kel. Banten Kec. Kasemen		
				2	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	1	jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui UEP Kel. Banten Kec. Kasemen		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Bimbingan sosial motivasi bagi penerima KUBE fakir miskin perkotaan tahun 2019, 20 KK di Banten Lama		
						3	Bantuan Sosial KUBE fakir miskin perkotaan 20 KK di Banten Lama		
						4	Bimbingan sosial motivasi bagi penerima UEP fakir miskin perkotaan tahun 2019, 12 KK di Banten Lama		
						5	Bantuan Sosial UEP fakir miskin perkotaan 12 KK di Banten Lama		
		5	PENDIDIKAN MENENGAH	1	PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMK	1	Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINDIKBUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Pelestarian Kebudayaan	1	Pelestarian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Permuseuman	1	Pendataan, Pendaftaran, dan Pemeringkatan Cagar Budaya		
						2	Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya		
						3	Pembinaan Dan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat terhadap Cagar Budaya Banten		
						4	Pembuatan Film Dokumentasi Cagar Budaya		
		7	Tata Kelola Pemerintahan	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1	pengadaan/pembangunan gedung/kantor (Sarana Kesehatan di banten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINKES
		8	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1	pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Banten Lama		
		9	Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1	kerjasama ormas dan dunia usah dalam mendukung program germas di banten lama		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	peningkatan jumlah kab/kota yang melaksanakan kab/kota sehat di banten lama		
						2	peningkatan jumlah desa yang melaksanakan STBM (banten lama)		
		10	Pencegahan Pengendalian Penyakit	1	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	1	penanggulangan penyakit TBC di Banten Lama		
				2	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	skrining deteksi dini penyakit tidak menular di Banten Lama		
				3	Surveilans Imunisasi Dan Kriisi Kesehatan	1	penguatan imunisasi rutin di Banten Lama		
3	Peningkatan Ekonomi Dan Kesempatan Berusaha	1	Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1	Pengembangan Sdm Pariwisata Banten	1	Pelatihan Guide Wisata Banten Lama.	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISPAR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		2	Pemasaran Produk Pariwisata	1	Promosi Pariwisata Provinsi Banten	1	Komunitas Familiar Trip (Promosi, Kerjasama dengan Travel Agent) Banten Lama		
				2	Penyiapan Sarana Dan Prasarana Promosi Pariwisata	1	pengadaan materi dan sarana promosi pariwisata (banten lama)		
						2	pembuatan materi promosi visual pariwisata (banten lama)		
						3	sewa bando/bilboard/video tron/reklame/pavilion banten lama		
		3	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata BanteN	1	Pembuatan Atraksi Wisata		
						2	Pengembangan atraksi wisata alam, budaya dan buatan (1 objek wisata budaya/religi di Banten Lama		

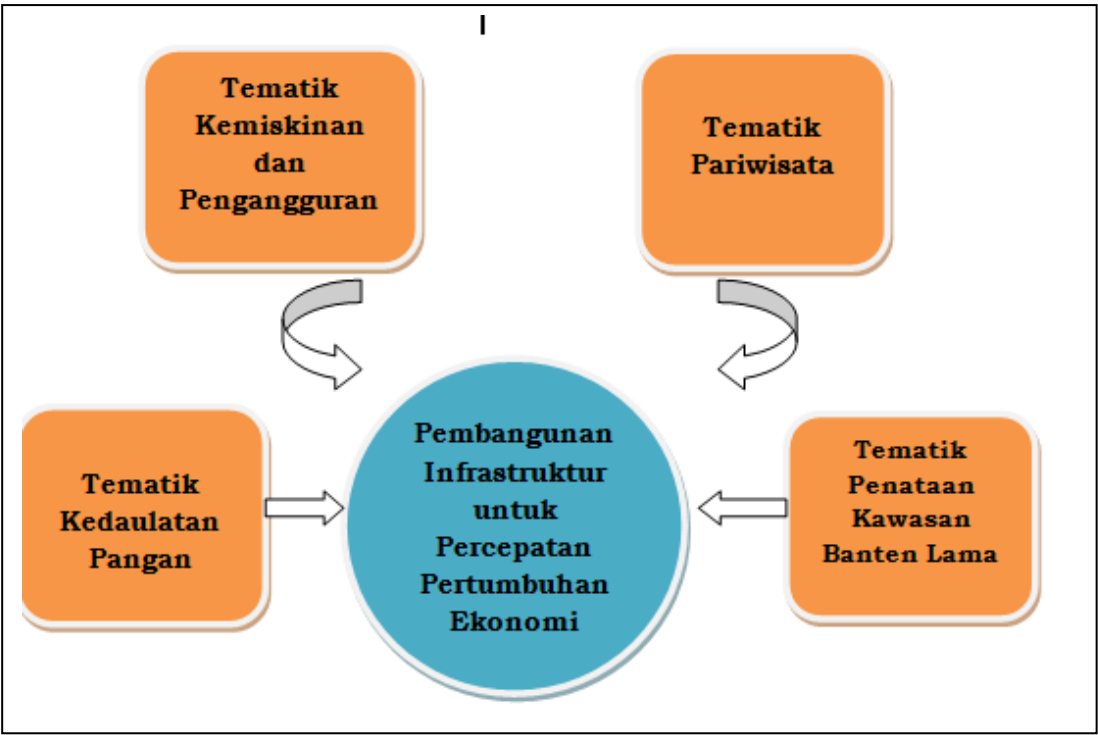
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	1	Pengelolaan wisata budaya/religi (Pembentukan Badan Pengelola)		
						2	FGD pengembangan kawasan strategis pariwisata (PKS tasikardi)		
						3	Pembuatan Kampung Wisata		
		4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	1	Bina Usaha Kecil Dan Koperasi Dibanten	1	Peningkatan Usaha Kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis(Pembinaan UKM)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINKOPUKM
						2	Sentra pemasaran di provinsi banten (Pelatihan keterampilan kerajinan Khas Banten)		
		5	Peningkatan Daya Saing Industri	1	Peningkatan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1	Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata	Kota Serang	DISPERINDAG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Peningkatan Sarana Prasarana	1	Pemanfaatan Lahan Dan Air Irigasi	1	pengadaan lahan Sawah Abadi Banten Lama untuk wisata pertanian	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISTAN
						2	Penghijauan pekarangan/halaman dengan tanaman pertanian		
4	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN	1	Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1	Perencanaan Penganggaran Dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	1	SK Deliniasi Kawasan Strategis Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	BAPPEDA
						2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan dan Pengendalian Revitalisasi Banten Lama)		
		2	Peningkatn Akses Dan Kualitas Informasi Publik	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1	Publikasi Revitalisasi Banten Lama	Provinsi Banten	DISKOMINFOTIKSAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		3	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1	Penegakan Dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten	1	operasi penegakan perda/pegub di wilayah provinsi banten (Relokasi PKL, Kios dan Bangunan Lainnya banten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	SATPOL PP
		4	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	Kerjasama Peningkatan Ketrentaman Umum Dan Ketertiban Masyarakat	1	patroli kerjasama tribum dan trammas lintas provinsi dan Kabupaten/Kota banten	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Pemeliharaan Dan Penanggulangan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	Penataan/Penertiban Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi Banten	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		5	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Pembinaan Dan Pengembangan Masyarakat Desa	1	peningkatan kapasitas manajemen lembaga kemasyarakatan melalui pelaku usaha perdesaan/kelurahan (pelaku usaha BKM dan KSM dibanten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPMD

Gambar 4.2
Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema RKPD
Tahun 2019

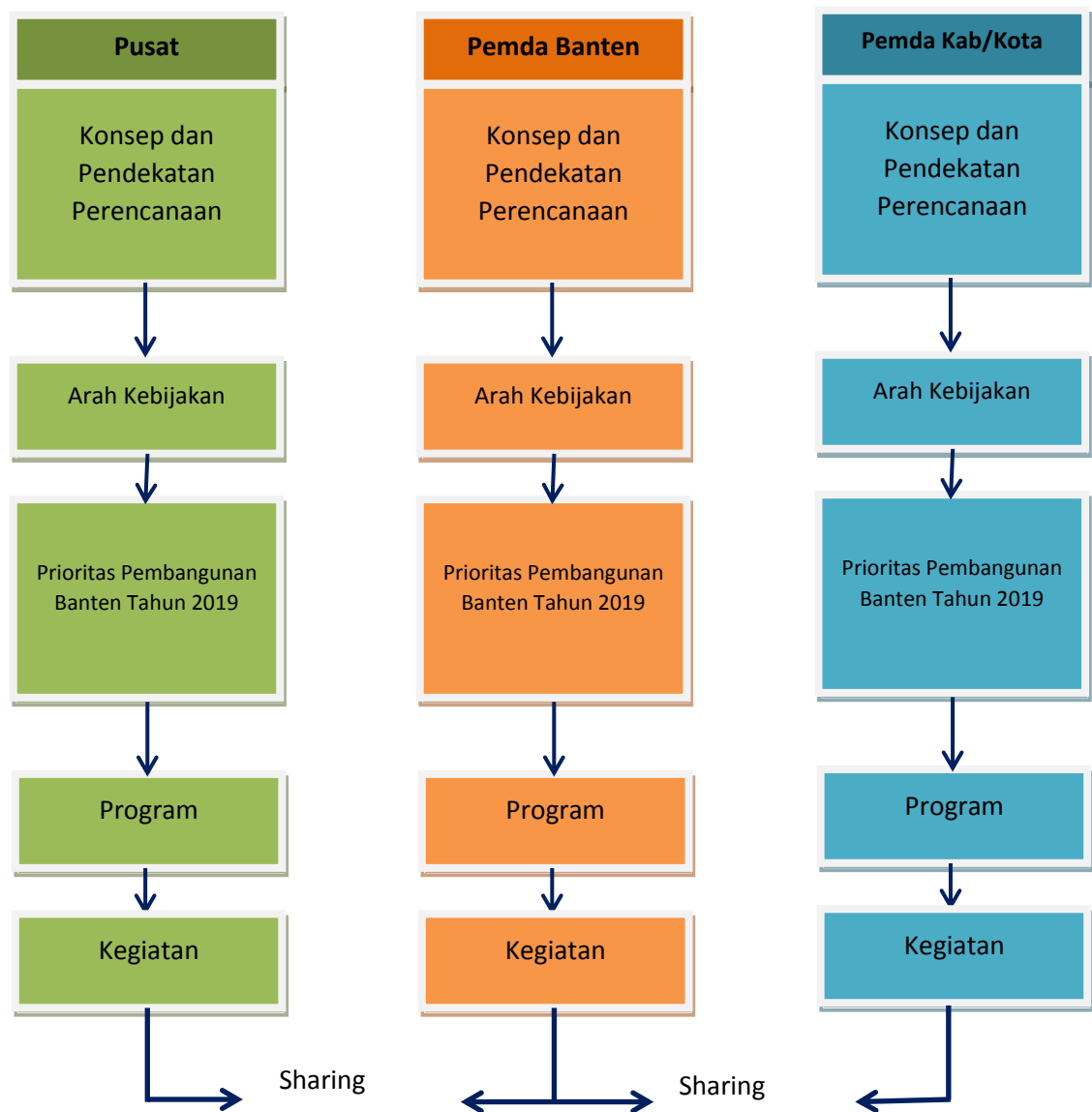


Berdasarkan ke-4 (empat) hal tersebut menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2019, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Integrasi Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota



4.3.4 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019

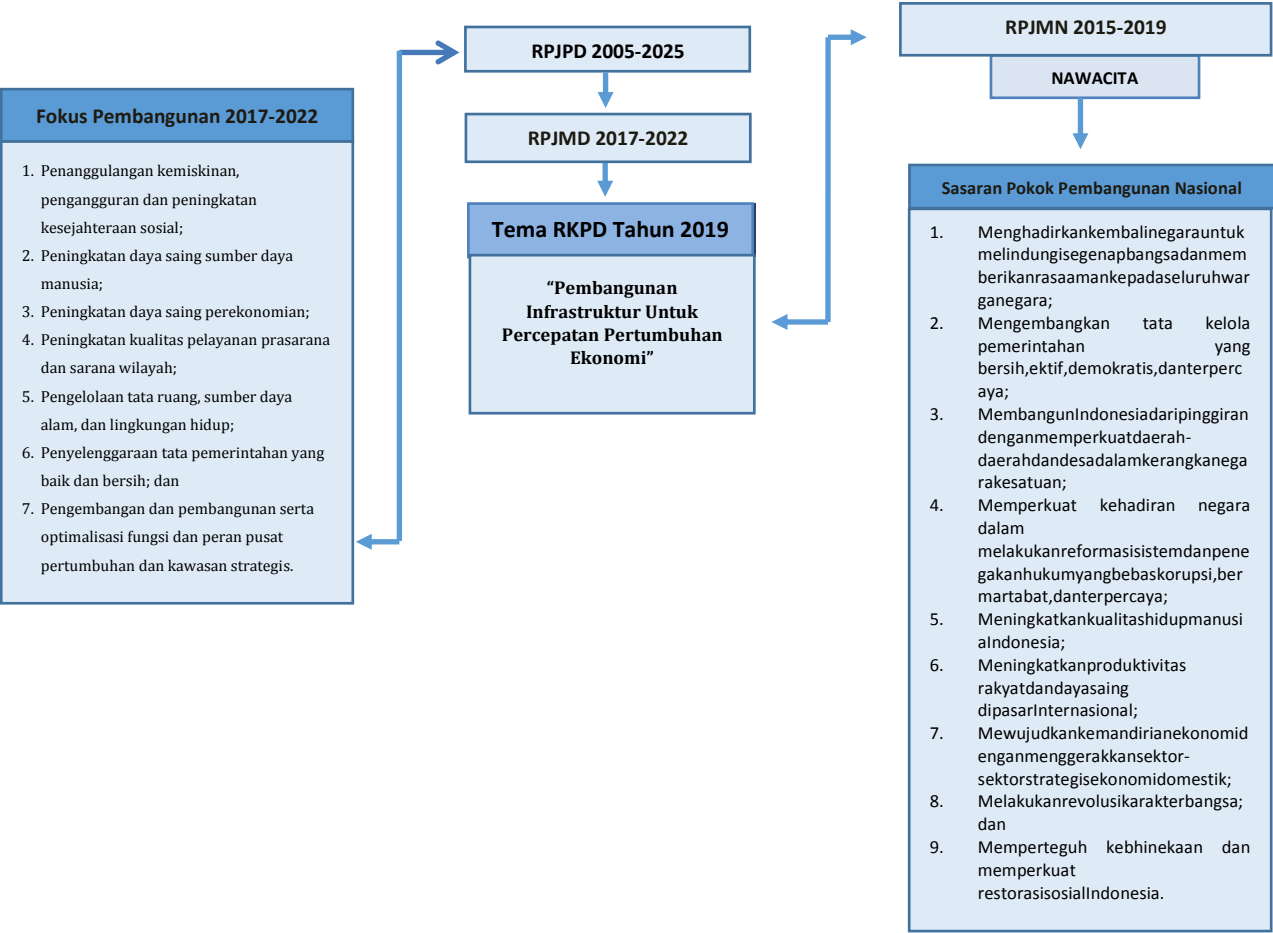
RPJMN 2015-2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,dengan visi pembangunan yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Lebih lanjut, guna mencapai visi tersebut disusun pula misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Didalam konteks keselarasan antara Tema RKPD Tahun 2019 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2019 adalah menjaga “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Tema ini sejalan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019 dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2019 dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional serta akan melahirkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
2. Percepatan dan Pemerataan sejalan dengan usaha untuk mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis, menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Gambar 4.4
Posisi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional



4.3.5 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2019

Dalam RKP Tahun 2019 pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2019 sebagai upaya yang berkelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Kata kunci Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi menjadi dimensi penting dalam menopang pembangunan Provinsi Banten.

Gambar 4.5
Integrasi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional
Tahun 2018 dan 2019



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Internalisasi Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota dengan Tema RKPD Tahun 2019. Internalisasi pembangunan kewilayahan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yang tercermin pada prioritas pembangunannya ke depan. Didalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2019, sehingga aspek tersebut sinergis dengan perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Provinsi Banten.

Prioritas pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kota Tangerang

Isu Strategis

a) Daya Saing Sumberdaya Manusia

- Kemiskinan dan Pengangguran
- Peningkatan Kualitas Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Kesehatan

b) Daya Saing Ekonomi Daerah

- Koperasi dan UKM
- Ekonomi Lokal
- Ketersediaan Energi
- Ketahanan Pangan

c) Daya Saing Pelayanan Publik

- Penataan Ruang yang berkelanjutan
- Penataan banjir
- Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas
- Penanganan system transportasi

d) Daya Saing Infrastruktur Kota

- Pelayanan administrative
- Pelayanan jasa
- Pelayanan regulasi

Program Prioritas

- a) Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau;
- b) Pelayanan kesehatan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau (Peningkatan akses kesehatan);
- c) Pelayanan sarana dan prasarana (Fasilitas umum) yang layak dan memadai;
- d) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e) Pariwisata dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi, teknologi, serta daya saing masyarakat;
- f) Kondusivitas iklim investasi dan usaha kondusivitas iklim investasi dan usaha;
- g) Ketahanan pangan daerah;
- h) Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (social, ekonomi, lingkungan);
- i) Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta pelayanan yang prima;
- j) Peningkatan ketersediaan energi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019:

- 1) Mengatasi berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pengangguran, peningkatan investasi, kemiskinan, peningkatan daya saing UKM untuk menunjang pariwisata serta peningkatan pertumbuhan ekonomi
- 2) Peningkatan produktivitas yang membuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru tidak hanya dari sektor industri dan jasa serta pariwisata
- 3) Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran

2. Kota Serang

Isu strategis

- a) Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - Kemiskinan dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - Ketahanan Pangan & peningkatan produksi pangan
 - Pengangguran
 - Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b) Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:

- Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan
 - Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan
 - Pengembangan RSUD Kota Serang
 - Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan penanganan banjir/genangan sesaat
 - Peningkatan sarana prasarana permukiman
 - Penanganan sampah
- c) Isu strategis pada aspek Daya Saing Daerah, meliputi :
- Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - Pengembangan Destinasi Wisata
 - Penataan ruang dan lingkungan hidup
 - Otimalisasi pelayanan perijinan
 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Dukungan Pileg serta Pilpres

Prioritas pembangunan

- a) Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan;
 - b) Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan;
 - c) Penanganan kemiskinan, pengangguran;
 - d) Pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
 - f) Ketahanan Pangan, dan peningkatan produksi pangan;
 - g) Pengembangan ekonomi kreatif, UKM dan koperasi;
 - h) Pengembangan Destinasi Wisata;
 - i) Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan banjir;
 - j) Peningkatan sarana/prasarana permukiman;
 - k) Pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan penanganan sampah
3. Kota Cilegon

Isu Strategis

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
- b) Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian
- c) Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial
- d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

- e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Prioritas Pembangunan

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan
- b) Peningkatan kualitas daya saing perekonomian
- c) Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan social
- d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan public serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi, dan hukum
- e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2019:

- a) Memantapkan kemandirian perekonomian daerah, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
 - 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui optimalisasi fungsi BLK dan aksesibilitas informasi dan administrasi ketenagakerjaan;
 - 3) Memberdayakan UMK dan koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi;
 - 4) Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan;
 - 6) Meningkatkan konektivitas industri kecil menengah terhadap rantai produksi industri besar;
 - 7) Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar;
 - 8) Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan fasilitasi usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - 9) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
- b) Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari, dengan arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung Negara
 - 2) Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas
 - 3) Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu
 - 4) Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan
 - 5) Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan
 - 6) Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas
- c) Memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan:
- 1) Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar dan menengah pertama
 - 2) Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus
 - 3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan
 - 4) Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya
 - 5) Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga
 - 6) Meningkatkan Jaminan Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan

- 7) Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
 - 8) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai
 - 9) Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet
 - 10) Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan
 - 11) Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
 - 12) Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah
 - 13) Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk
 - 14) Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga
 - 15) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak
- d) Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi
 - 2) Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)
 - 3) Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat
 - 4) Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan

- 5) Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir
- e) Memantapkan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan:
- 1) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan
 - 2) Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - 3) Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi
 - 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran
 - 5) Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah
 - 6) Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah
 - 7) Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu
 - 8) Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa
 - 9) Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu
 - 10) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum
 - 11) Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong

pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat

- 12) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum
- 13) Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah
- 14) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 15) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah
- 16) Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran

4. Kota Tangerang Selatan

Isu Strategis

- a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- b) Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas di wilayah
- c) Angka pertumbuhan penduduk
- d) Tingkat pengangguran
- e) Kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Prioritas Pembangunan

- a) Pengurangan kesenjangan wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur
- b) Peningkatan Daya Saing Daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan
- c) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan
- d) Pengurangan kemiskinan melalui jaminan social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- e) Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi

5. Kabupaten Serang

Isu Strategis

- a) Penanggulangan Kemiskinan:

b)Penanggulangan masalah pengangguran:

Program Prioritas

- a)Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya serta kesejahteraan social masyarakat;
- b)Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar;
- c)Peningkatan kualitas penataan ruang, permukiman, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- d)Peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian;
- e)Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan public yang prima;
- f) Peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2019:

- a) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b) Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar;
- c) Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- d) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
- e) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan desa;
- f) Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Jalan dan Jembatan;
- g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan;
- h) Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Jaringan Irigasi, Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir;
- i) Meningkatkan pelayanan persampahan;
- j) Meningkatkan cakupan akses pelayanan air bersih/air minum, sanitasi, pembangunan Rumah Tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh;

- k) Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang;
- l) Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup;
- m) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi/penanaman modal;
- n) Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja;
- o) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif;
- p) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- q) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata);
- r) Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur;
- s) Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD;
- t) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- u) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Kabupaten Pandeglang

Isu Strategis

- a) Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya pedesaan.
- b) Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
- c) Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian.

Program Prioritas

- a) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur
- b) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- c) Peningkatan persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan, Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Desa Tertinggal
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021:

- a) Meningkatkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, bahagia, dan peduli sesama.
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan;
 - 3) Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu bagi masyarakat miskin melalui kartu Pandeglang Berkah yang mencakup pelayanan berobat gratis, beasiswa, dan tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, serta rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di Sekolah, peduli keluarga binaan, dan penanganan desa tertinggal;
 - 4) Pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
 - 5) Pembinaan dan bantuan sosial kepada PMKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian;
 - 6) Pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan;
 - 7) Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - 8) Penciptaan pasar logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok;

- 9) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan;
- 10) Peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui gerakan konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- 11) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 12) Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq;
- 13) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama;
- 14) Pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- 15) Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan;
- 16) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda;
- 17) Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda;
- 18) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 19) Peningkatan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak-hak anak;
- 20) Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri;
- 21) Peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
- 22) Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan;

23) Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran.

b) Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian

- 1) Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam);
- 2) Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang;
- 3) Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan;
- 4) Mendorong percepatan terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah;
- 5) Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik;
- 6) Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tanjung Lesung;
- 7) Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan;
- 8) Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang;
- 9) Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan *e-governance*;
- 10) Pembangunan wi-fi/hotspot pada setiap kecamatan;
- 11) Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (*call centre / sms centre*);
- 12) Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA;
- 13) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan;
- 14) Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup;
- 15) Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha.

c) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian

- 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar;
- 2) Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani;
- 3) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani;
- 5) Perlindungan tanaman, hewan dan masyarakat veteriner;
- 6) Mendirikan pusat agribisnis;
- 7) Pendirian pusat distribusi agro;
- 8) Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agrobisnis;
- 9) Pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan;
- 10) Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

d) Meningkatkan nilai tambah maritim bisnis

- 1) Peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 2) Peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya;
- 3) Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman;
- 4) Penyediaan lahan industri maritim;
- 5) Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan.

e) Meningkatkan wisata bisnis

- 1) Pengembangan atraksi wisata alam (seperti Tahura), wisata buatan (agrowisata), minat khusus;
- 2) Pengembangan agrowisata;
- 3) Penggalan Potensi Wisata;
- 4) Mendorong modernisasi wisata air;
- 5) Mendorong internasionalisasi/tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung;

- 6) Pendirian pusat pelatihan SDM pariwisata;
 - 7) Mendorong terlaksananya Festival Layar/Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon;
 - 8) Peningkatan sadar wisata masyarakat;
 - 9) Digitalisasi dan Promosi pariwisata;
 - 10) Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata;
 - 11) Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi;
 - 12) Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari;
 - 13) Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.
- f) Memperkuat Sistem Inovasi Daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan
- 1) Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;
 - 2) Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung inovasi;
 - 3) Mendorong budaya inovasi;
 - 4) Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan;
 - 5) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemaajuan sistem inovasi;
 - 6) Penyelarasan iptekin dengan perkembangan global;
 - 7) Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM;
 - 8) Mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM;
 - 9) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi;
 - 10) Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai *centre of excellence* atau *Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing;
 - 11) Penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah;
 - 12) Pelayanan prima administrasi kependudukan;
 - 13) Penyelesaian konflik pertanahan di daerah;
 - 14) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan;

- 15) Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 16) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik;
- 17) Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik;
- 18) Pelayanan perizinan satu pintu;
- 19) Penguatan investasi dan penanaman modal;
- 20) Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan;
- 21) Pemberian stimulan bagi investor;
- 22) Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi;
- 23) Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah;
- 24) Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah;
- 25) Peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah;
- 26) Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

7. Kabupaten Lebak

Isu Strategis

- a) Pemerataan ketersediaan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air Bersih, dan Sanitasi).
- b) Peningkatan Sarana prasarana serta tenaga SDM pada bidang Pendidikan dan kesehatan.
- c) Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Peningkatan kapasitas ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan publik.
- e) Menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan

- a) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- b) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- c) Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2019 berdasarkan Tujuan Pembangunan:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
 - 1) Peningkatan pendidikan usia dini
 - 2) Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar
 - 3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
 - 5) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan
 - 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - 7) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - 8) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB
 - 9) Peningkatan daya saing tenaga kerja
 - 10) Peningkatan penempatan tenaga kerja
 - 11) Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja
 - 12) Peningkatan Kerjasama dengan beberapa daerah lain yang potensial untuk 5 tahun ke depan
 - 13) Pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - 14) Pengembangan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi PMKS serta pemberian santunan orang terlantar
 - 15) Peningkatan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS
 - 16) Peningkatan pembinaan dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
 - 17) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya
 - 18) Promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya lokal

- 19) Penyediaan perpustakaan daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan yang lain
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas.
 - 1) Peningkatan kualitas perencanaan daerah
 - 2) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 3) Penyediaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - 4) Peningkatan Kerjasama Kemitraan antar pemerintah daerah
 - 5) Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah
 - 6) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 7) Peningkatan pengawasan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - 8) Pewujudan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 9) Peningkatan koordinasi dalam menyelesaikan aset-aset
 - 10) Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - 11) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi
 - 12) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian daerah
 - 13) Peningkatan kinerja pemerintahan desa
 - 14) Optimalisasi penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan
- c) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Ramah Lingkungan
 - 1) Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi
 - 2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM
 - 3) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk & pembiayaan bagi Koperasi & UMKM
 - 4) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pasar-pasar Desa dan Tradisional

- 5) Peningkatan pengawasan harga dan alur distribusi Barang dan Jasa
 - 6) Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industry
 - 7) Peningkatan Produksi dan Kualitas Produksi unggulan
 - 8) Peningkatan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pangan
 - 9) Menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 10) Pengembangan hasil produksi perkebunan
 - 11) Pengembangan usaha hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan
 - 12) Mendorong Seni dan Budaya menjadi objek wisata potensial
 - 13) Peningkatan promosi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- d) Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas
- 1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
 - 2) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
 - 3) Peningkatan konservasi sumber daya air
 - 4) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan
 - 5) Mengembangkan lingkungan permukiman sehat
 - 6) Mengadakan dan memasang marka, PJU, rambu-rambu dan lampu lalu lintas di lokasi rawan dan belum ada
 - 7) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
- e) Terjaganya kualitas lingkungan
- 1) Pelaksanaan rehabilitasi lahan
 - 2) Merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - 3) Pelaksanaan upaya pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
 - 5) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
 - 6) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
 - 7) Pembentukan relawan bencana diutamakan pada daerah rawan bencana

- 8) Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam kondisi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
- 9) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan

8. Kabupaten Tangerang

Isu Strategis

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan berbasis potensi local
- b) Mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang
- c) Pemenuhan sarana prasarana dasar, perumahan dan permukiman
- d) Optimalisasi sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- e) Tata Kelola Pemerintahan secara berkesinambungan

Prioritas Pembangunan

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan Ketahanan Pangan
- b) Peningkatan kualitas SDM
- c) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- e) Peningkatan Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman
- f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

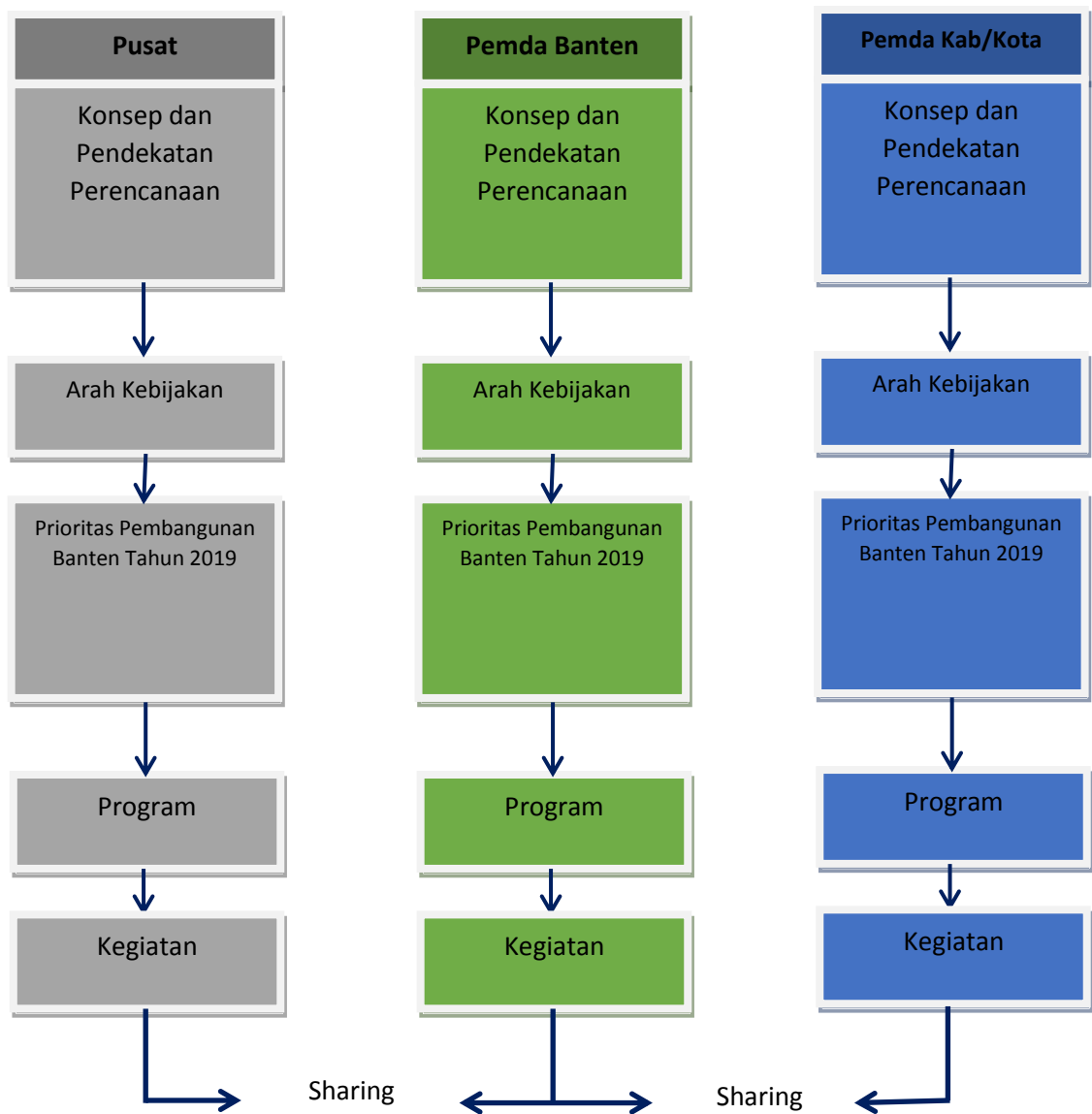
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019:

- a) Melanjutkan program unggulan dan prioritas yang perlu pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan serta mendorong program inovatif daerah;
- b) Mendukung dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Propinsi Banten, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa;
- c) Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan permukiman yang berbasis kawasan dengan sinergi berbagai program dan sumber pendanaan;

- d) Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi;
- e) Penguatan usaha skala kecil dan menengah melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan akses terhadap permodalan, sarana produksi, infrastruktur dan teknologi;
- f) Pembangunan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
- g) Peningkatan program penanggulangan kemiskinan melalui perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan, Peningkatan keterpaduan program dan Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Integrasi Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Selain Indikator kinerja daerah ditetapkan pula indicator kinerja Perangkat Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung PD, merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun target indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah pada tahun 2019 terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Banten Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Target 2019
1	LPE	Persen	5.71	6.20
2	Inflasi	Persen	4.17	4.20
3	Pengangguran	Persen	9.28	8.20
4	Kemiskinan	Persen	5.59	5.00
5	IPM	Poin	71.42	72.20

Sumber : BPS Provinsi Banten

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pencapaian target pada indikator makro pembangunan tersebut diperlukan angka proyeksi yang diharapkan dapat dicapai oleh Kabupaten/Kota sampai sebagaimana Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Daerah	IPM		LPE		Kemiskinan		Pengangguran	
		Capaian 2017	Target 2019	Capaian 2017	Target 2019	Capaian 2017	Target 2019	Capaian 2017	Target 2019
	Provinsi Banten	71.42	72.20	5.71	6.20	5.59	5.0	9.28	8.20
1	Pandeglang	64.09	65.51	5.50	5.70	9.52	9.36	9.45	9.22
2	Kab.Lebak	63.54	65.15	5.50	5.70	8.55	8.36	9.91	9.61
3	Kab.Tangerang	70.83	71.54	5.50	6.00	5.07	4.73	8.11	7.50
4	Kab.Serang	65.63	66.65	6.38	6.60	4.50	4.40	13.66	13.26
5	Kota Tangerang	77.35	78.11	5.88	6.20	4.78	4.53	7.27	6.84
5	Kota Cilegon	72.27	73.05	5.25	6.00	3.47	3.34	10.98	10.46
7	Kota Serang	71.77	72.88	7.70	7.90	5.42	5.19	8.66	8.21
8	Kota Tangerang Selatan	80.98	81.89	7.75	8.25	1.60	1.49	5.52	5.09

Sumber : RPJMD 2017-2022

Indikator kinerja RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 menyajikan penetapan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

2. Aspek Pelayanan Umum

Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, dan jumlah kunjungan wisatawan.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3
Target Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019
1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %)	3.89
2	Index Gini (Satuan: %)	0.39
3	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	8.70
4	Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/ 1000 KH)	30.00
5	Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)	300.00
5	Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun)	70.06
7	Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %)	89.00
8	Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	85.18
9	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar)	203.20
10	Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)	74.00
11	Indeks pembangunan gender (IPD) (Satuan: Nilai)	91.95
12	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)	90.60

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019
13	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %)	89.00
14	Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliyun)	60.80
15	Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %)	35.00
16	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %)	4.67
17	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %)	2.94
18	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD (Satuan: %)	5.60
19	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %)	4.00
20	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	3.00
21	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat)	70.00
22	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Satuan: Opini)	WTP
23	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)	60.62

6.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Setelah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah disusun pula Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai Lampiran RPJMD Tahun 2017-2022, Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut ini :

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
1	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Pendidikan		
		Program Pendidikan Menengah		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	74.67
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	60.33
			Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.19
			Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.38
			Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.85
			Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.90
			Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	53.22
			Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	56.30
			Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	49.76
			Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	34.00
		Program Pendidikan Khusus		
			Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	34.00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)	57.74
			Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	65.14
			Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	97.16
			Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	60.97
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran		
			Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	30.00
		Kebudayaan		
		Program Pelestarian Kebudayaan		
			Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	90.00
			Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	90.00
			Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	90.00
			Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	90.00
		Program Pengelolaan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Kekayaan Budaya		
			Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	90.00
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
			Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	90.00
			Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	90.00
		Kesehatan		
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat		
			Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	81.00
			Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100.00
			Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	60.00
		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian		
			Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang)	170.00
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	80.00
			Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	60.00
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah		
			Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	37.00
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit		
			Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	85.00
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat		
			Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja	6.40

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
			Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	100.00
			Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	81.00
			Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	35.00
			Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	30.00
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
			Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan: %)	70.00
			Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	88.00
			Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %)	75.00
			Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	70.00
			Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	50.00
			Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	70.00
		Sosial		
		Program Rehabilitasi Sosial		
			Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	608.00
		Program Pemberdayaan Sosial		
			Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial (Satuan: Orang)	1,520.00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100.00
			Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	1,300.00
			Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	25,000.00
		Program Penangan Fakir Miskin		
			Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima	949.00

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti		
			Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	110.00
		Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti		
			Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	230.00
		Perpustakaan		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
			Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	90.00
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan		
			Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	80.00
		Kearsipan		
		Program Pengelolaan Sistem Kearsipan		
			Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	85.00
			Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	85.00
			Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	90.00
2	Peningkatan infrastruktur Wilayah	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang		
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	84.67
			Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	28.99
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	89.70

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
			Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	
		Program Penataan Ruang		
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	37.50
		Program Pembangunan Sumberdaya Air		
			Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	26.27
			Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	16,721.78
			Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	56.97
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		
			Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203.20
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85.18
		Program Keciaptakaryaan		
			Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76.15
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75.57
			Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		
			persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50.00
			persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69.00
		Perhubungan		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
			Persentase kebutuhan terminal type B	0.00

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	
			Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	20.00
			Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	20.00
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara		
			Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	20.00
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan		
			Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	20.00
			Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0.00
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
			Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)	100.00
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan		
			Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100.00
		Energi dan Sumber Daya Mineral		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		
			Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10,000.00
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan		
			Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	22.83

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara		
			Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	70.00
			Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	44.52
3	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Ketenaga Kerjaan		
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		
			Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.40
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
			Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	4.40
			Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10.00
			Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9.53
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan		
			Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	3.04
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	15.55
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri		
			Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1.26
		Pangan		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
			Ketersediaan pangan (Satuan: %)	96.30
		Program Peningkatan Keterjangkauan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Pangan		
			Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	85.50
		Program Perlindungan Konsumen Pangan		
			Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	90.00
		Kelautan dan Perikanan		
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		
			Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8.08
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
			Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	65.00
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan		
			Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: nilai)	117.00
		Lingkungan Hidup		
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		
			Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	52.00
			Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	59.20
			Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	60.00
		Kehutanan		
		Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan		
			Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	5,000.00
			Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	10.00
		Koperasi dan UKM		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		
			Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	6.00
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi		
			Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	6.00
		Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM		
			Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	6.00
			Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	1.00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil		
			Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	1.00
		Penanaman Modal		
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi		
			Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	13.80
			Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	47.00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
			Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100.00
		Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		
			Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100.00
		Program Pengendalian Penanaman Modal		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	17.09
		Kepemudaan dan Olahraga		
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan		
			Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	80.00
			Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	80.00
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga		
			Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	75.00
		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga		
			Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	80.00
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
			Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	80.00
		Pariwisata		
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	1.00
		Program Pemasaran Produk Pariwisata		
			Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	15,601,344.00
			Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.39
			Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,852,216.00
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	300.00
		Program		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Pengembangan Destinasi Pariwisata		
			Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)	20.00
		Pertanian		
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		
			Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	59.07
			Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,420,714.00
			Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	22,657.00
			Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7,498.10
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura		
			Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	8,970.00
			Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	771.75
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan		
			Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Kg/Ha)	3,510.36
			Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1,762.00
			Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	44,858.00
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan		
			Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	34.18
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		
			Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	87.00
		Program Penanganan Kesehatan Hewan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100.00
		Perindustrian		
		Program Peningkatan Daya Saing Industri		
			Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	20.00
			Persentase Kerjasama SDM Berkompentensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	20.00
			Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	20.00
		Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri		
			Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: jumlah)	200.00
		Perdagangan		
		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri		
			Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5.00
			Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	12.00
			capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	5.00
			Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100.00
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		
			Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	3,118.79
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri		
			Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	112.00
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
			Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)	85.00

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
4	Peningkatan tatakelola Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera		
			Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	63.33
			Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	55.00
			asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	62.27
			Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	75.00
			Indek Ketahanan Keluarga (Satuan: %)	67.62
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		
			Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	95.00
			Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	95.00
			Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	63.33
		Administrasi Kependudukan dan Sipil		
		Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
			Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	67.38
			Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	30.81
			Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	86.47
			Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	80.99
			Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	100.00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Program Kependudukan dan Keluarga		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Berencana		
			Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.29
			Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	61.00
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.18
			Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	25.18
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100.00
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah		
			Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	75.00
		Program Perlindungan Masyarakat		
			Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100.00
		Program Penanganan Bencana Kebakaran		
			Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100.00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	2.00
			Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	2.00
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Jumlah)	41.00
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		
			Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah)	2.00
		Komunikasi dan Informasi		
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
			Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	48.38
		Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		
			Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	40.00
		Persandian		
		Program Tata Kelola Persandian		
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	40.00
		Statistik		
		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah		
			Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	60.00
		Keuangan		
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	58.94
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	41.06
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	15.22
		Keuangan		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	85.00
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah		
			Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	90.00
		Program Penatausahaan Aset Daerah		
			capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100.00
		Administrasi Pemerintahan		
		Program Tata Kelola Pemerintahan		
			Nilai IKM (Satuan: skala)	3.00
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		
			Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	50.00
		Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		
			Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	75.00
		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian		
			Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	18.28
		Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum		
			Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100.00

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	80.00
			Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	80.00
		Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur		
			Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	80.00
		Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
			Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	80.00
		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan		
			Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	80.00
			Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	80.00
		Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan		
			Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	80.00
			Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	80.00
			Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	80.00
		Program Pelayanan Umum		
			Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	80.00
		Kepegawaian		
		Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah		
			Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	90.00
			Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	90.00
			Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	90.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Daya Aparatur		
			Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	90.00
		Pendidikan dan Pelatihan		
		Program Pengembangan SDM Aparatur		
			Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85.00
			Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85.00
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur		
			Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	85.00
			Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	100.00
		Perencanaan		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
			Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	0.00
			Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100.00
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	85.00
			Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	75.00
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi		
			Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75.00
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
			Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75.00
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
			Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75.00
		Penelitian dan Pengembangan		
		Program Penelitian dan Pengembangan		
			Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	60.00
			Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	60.00
		Pengawasan		
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
			Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	75.00
			Indeks Integritas (Satuan: poin)	74.48
			Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	3.00
			Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00
		Administrasi Pemerintahan		
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
			Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	100.00
			Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	100.00
			Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	100.00
		Administrasi Pemerintahan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Program Pembangunan Kemitraan		
			Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	100.00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan		
			Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	24.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional		
			Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100.00
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi		
			Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat		
			Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	0.00
			Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	0.00
			Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	70.00
			Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	0.00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		
			Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100.00
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan		

NO	Prioritas Pembangunan	Urusan/Program	Indikator	Target Indikator 2019
		Bencana		
			Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100.00
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		

BAB VII

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

7.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2017, maka disusun Rencana kerja tahun 2019 serta pagu indikatifnya. Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2019 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tahun 2018.

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan *bottom up* yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten.

Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- Perintah normatif Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya
- Aktualisasi peran dan fungsi representasi politik DPRD
- Bentuk pertanggungjawaban politik anggota DPRD terhadap konstituen
- Penegasan tentang kemitraan kepala daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
- Perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance and clean goverment*)
- Pokok – Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan kemudian dimasukkan kedalam e-planning
- Pokok – Pokok Pikiran DPRD diserahkan ke Bappeda dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi

Bahan Dasar Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- Reses anggota DPRD
- Audiensi dan jaring aspirasi masyarakat
- Forum dialog Pimpinan DPRD
- Rekomendasi fraksi
- Nota dan rekomendasi alat kelengkapan DPRD
- Kolom aspirasi media
- Hasil rapat dan kunjungan kerja akd
- Musrenbang kab/kota
- Dokumen pendukung lainnya (RPJPD, RPJMD)

Isu & Usulan Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019:

BIDANG PEMERINTAHAN (KOMISI I)

- Akselerasi Reformasi Birokrasi
- Penerapan E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting
- Penyelenggaraan Pemilu Presiden & Pemilu Legislatif 2019 yang demokratis, aman & kondusif
- Reformasi Tata Kelola Keuangan
- Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota

BIDANG PEREKONOMIAN (KOMISI II)

- Revitalisasi sektor pertanian
- Pengendalian sektor inflasi
- Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin
- Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif & pariwisata
- Penciptaan iklim investasi
- Ketahanan pangan daerah yang terjaga
- Peningkatan pengembangan Sumber Daya Alam yang dimiliki

BIDANG KEUANGAN & ASET (KOMISI III)

- Optimalisasi potensi pendapatan daerah
- Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang proporsional, tepat sasaran & bisa dipertanggungjawabkan
- Pemberian dana hibah & bansos yang transparan, akuntabel & tepat sasaran
- Revitalisasi Kawasan Banten Lama
- Peningkatan tata kelola APBD dalam hal distribusi dan alokasi

BIDANG INFRASTRUKTUR (KOMISI IV)

- Pembangunan infrastruktur jalan & jembatan provinsi yang berkualitas
- Akselerasi pembangunan 12 proyek strategis nasional di Provinsi Banten
- Pengendalian dampak lingkungan hidup & pengelolaan sampah
- Penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan
- Akselerasi pembangunan terminal tipe B & pengembangan sistem transportasi massal
- Optimalisasi pelayanan kelistrikan & energi terbarukan

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (KOMISI V)

- Peningkatan akses & pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
- Peningkatan akses & pemerataan pendidikan berkualitas
- Penanggulangan kemiskinan & pengangguran
- Terwujudnya pemuda wirausahawan baru & olahraga yang berprestasi
- Terwujudnya kelembagaan PUG & PUHA yang berkualitas
- Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

7.1.1 Program Pembangunan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2019, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) program untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 7.1.

Tabel 7.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2019

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Sumberdaya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Keciaptakaryaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanganan Bencana Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosial	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	Dinas Sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Ketenaga Kerjaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Pangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Perlindungan Konsumen Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Perhubungan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penanaman Modal	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Statistik	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persandian	Program Tata Kelola Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
	Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kearsipan	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Produk Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Pertanian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
	Kehutanan	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Saing Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Fungsi	Administrasi Pemerintahan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Penunjang			
			Biro Pemerintahan
			Biro Hukum
			Biro Organisasi
			Biro Bina Perekonomian
			Biro Kesejahteraan Rakyat
			Biro Umum
			Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
			Biro Administrasi Pembangunan Daerah
			Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
			Badan Penghubung
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Pembangunan Kemitraan	Badan Penghubung
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Biro Organisasi
		Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Biro Pemerintahan
		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Biro Bina Perekonomian
		Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum
		Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
		Program Pelayanan Umum	Biro Umum
	Pengawasan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Provinsi

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Provinsi
	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Keuangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penatausahaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kepegawaian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengembangan SDM Aparatur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan kedalam 173 program dan 1384 kegiatan yang akan dijalankan oleh 42 Perangkat Daerah. Daftar program pembangunan dan pagu belanja langsung menurut urusan, bidang urusan, program dan kegiatan untuk masing-masing PD Provinsi Banten Tahun 2019 terlihat sebagaimana terdapat pada lampiran bab ini.

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten yang akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 pada Bab II, Pembangunan di Provinsi Banten menghadapi 4 (empat) masalah pembangunan saat ini yaitu masih terdapat kesenjangan wilayah antar Kabupaten/Kota, perlunya percepatan peningkatan daya saing daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta masih belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada Bab VII, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4. Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun Anggaran 2019, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program.

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS. Oleh karenanya RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 harus menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2019.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010